



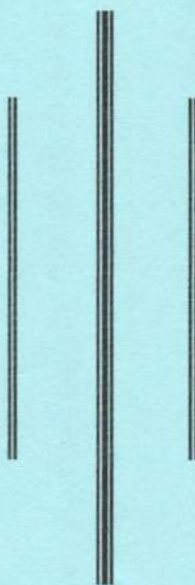
**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



**KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



**KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2020 telah dapat diselesaikan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

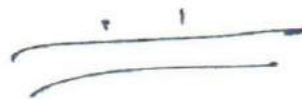
Bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2020 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD harus bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, sedangkan data untuk capaian kinerja makro dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan terima kasih, semoga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

Pasuruan, Maret 2021

WALIKOTA PASURUAN



H. SAIFULLAH YUSUF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-undang pembentukan daerah	1
b. Data geografis wilayah	3
c. Jumlah penduduk.....	5
d. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah, dan	7
e. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah	14
1.1.2 Perencanaan pembangunan daerah	21
a. Permasalahan strategis pemerintah daerah	21
b. Visi misi kepala daerah	42
c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, dan	48
d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	161
1.1.3 Penerapan standar pelayanan minimal	169
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1
2.1 Capaian Kinerja Makro	1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	7
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	7
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	62
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	73
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	76
BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	1
BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	1
4.1 Urusan Pendidikan.....	1
4.1.1 Jenis pelayanan dasar.....	1
4.1.2 Target pencapaian standar pelayanan minimal daerah.....	3
4.1.3 Realisasi	3
4.1.4 Alokasi anggaran.....	5
4.1.5 Dukungan personil	5
4.1.6 Permasalahan dan solusi	6
4.2 Urusan Kesehatan.....	6
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	6
4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah	7
4.2.3 Realisasi	9
4.2.4 Alokasi Anggaran	11
4.2.5 Dukungan Personil	12

4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	13
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	17
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	17
4.3.2	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	17
4.3.3	Realisasi	18
4.3.4	Alokasi Anggaran	18
4.3.5	Dukungan Personil	19
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	19
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	20
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	20
4.4.2	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	20
4.4.3	Realisasi	21
4.4.4	Alokasi Anggaran	21
4.4.5	Dukungan Personil	22
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	22
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .	23
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	23
4.5.2	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	24
4.5.3	Realisasi	25
4.5.4	Alokasi Anggaran	26
4.5.5	Dukungan Personil	26
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	27
4.6	Urusan Sosial	28
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	28
4.6.2	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	29
4.6.3	Realisasi	30
4.6.4	Alokasi Anggaran	31
4.6.5	Dukungan Personil	31
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	32
4.7	Program dan Kegiatan.....	33

BAB V.	PENUTUP	v-1
---------------	----------------------	------------



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KOTA PASURUAN
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Secara administratif, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Kota Pasuruan terdiri atas 4 kecamatan dan 34 kelurahan. Sebelumnya, wilayah Kota Pasuruan terdiri atas 3 Kecamatan dengan 34 kelurahan. Atas dasar pertimbangan dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dengan prasyarat tertentu, wilayah kota terdiri atas minimal 4 kecamatan; maka Kota Pasuruan melakukan penyesuaian.

Tabel 1.1
Jumlah dan Luas Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pasuruan

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)
I.	Kecamatan Purworejo	
1	Kelurahan Purworejo	1,04
2	Kelurahan Purutreja	1,15
3	Kelurahan Tembokreja	1,04
4	Kelurahan Wirogunan	0,61
5	Kelurahan Kebonagung	0,85
6	Kelurahan Pohjentrek	1,90
7	Kelurahan Sekargadung	1,49
II.	Kecamatan Gadingreja	
1	Kelurahan Petahunan	0,97
2	Kelurahan Randusari	0,33
3	Kelurahan Karangketug	1,88
4	Kelurahan Bukir	0,67
5	Kelurahan Gadingreja	1,33

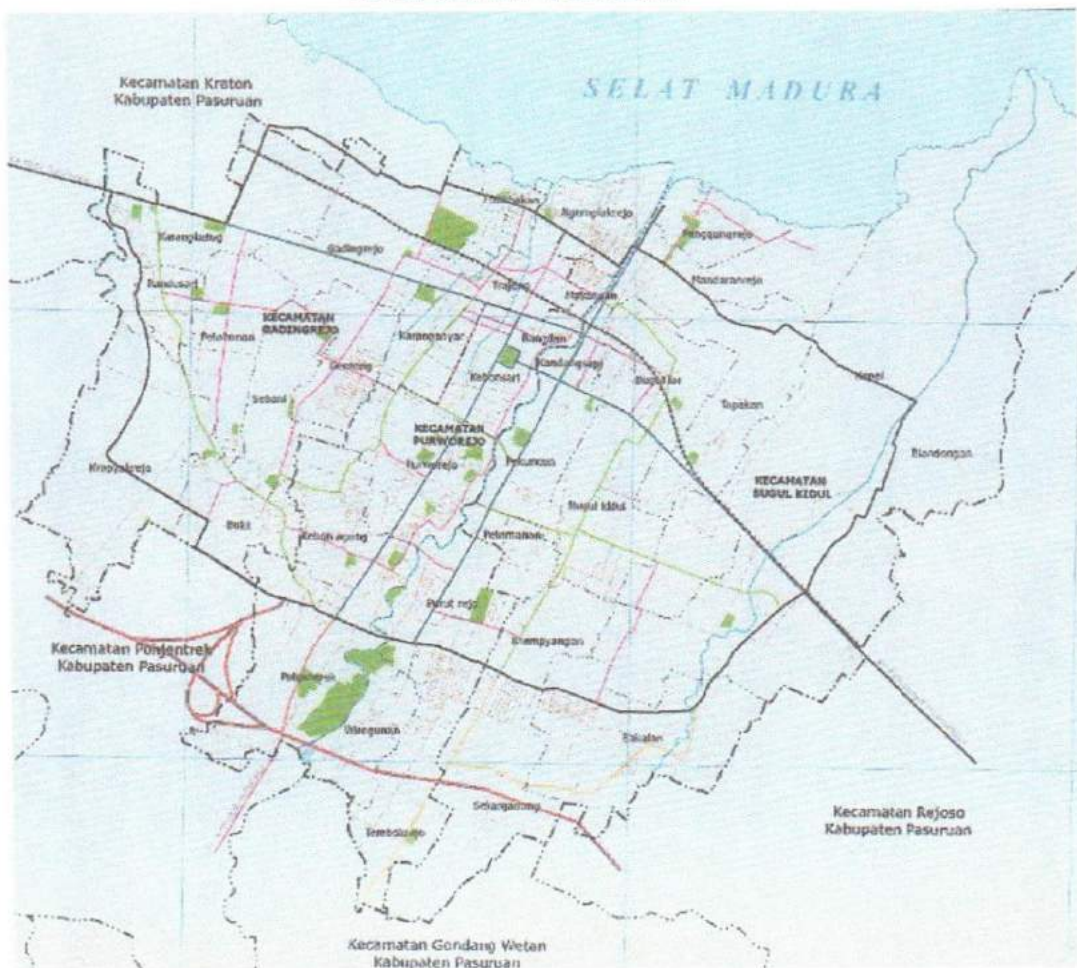
No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)
6	Kelurahan Sebani	0,79
7	Kelurahan Krapyakrejo	1,74
8	Kelurahan Gentong	0,56
III.	Kecamatan Bugul Kidul	
1	Kelurahan Kepel	2,54
2	Kelurahan Tapa'an	0,96
3	Kelurahan Bugul Kidul	0,95
4	Kelurahan Krampyangan	0,55
5	Kelurahan Bakalan	1,86
6	Kelurahan Blandongan	4,25
IV.	Kecamatan Panggungrejo	
1	Kelurahan Kandang sapi	0,45
2	Kelurahan Tamba'an	0,36
3	Kelurahan Mandaranrejo	0,63
4	Kelurahan Bugul Lor	0,76
5	Kelurahan Trajeng	1,13
6	Kelurahan Karanganyar	0,71
7	Kelurahan Bangilan	0,37
8	Kelurahan Panggungrejo	0,6
9	Kelurahan Pekuncen	0,80
10	Kelurahan Ngemplakrejo	0,54
11	Kelurahan Mayangan	0,28
12	Kelurahan Petamanan	0,4
13	Kelurahan Kebonsari	0,8

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah

b. Data Geografis Wilayah

Kota Pasuruan dengan wilayah seluas 35,29 Km² atau 0,07 persen dari luas wilayah Jawa Timur, berlokasi di pesisir pantai utara pulau Jawa, tepatnya di sisi selat Madura. Secara astronomis terletak antara 112°45'-112°55' Bujur Timur dan 7°35'-7°45' Lintang Selatan. Wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, yakni Kecamatan Kraton di sebelah barat, Kecamatan Pohjentrek dan Kecamatan Gondangwetan di sebelah selatan dan Kecamatan Rejoso di sebelah timur; sementara sisi utara, berhadapan langsung dengan selat Madura.

Gambar 1.1.
PETA KOTA PASURUAN



Secara topografi, sebagaimana wilayah pesisir pada umumnya, Kota Pasuruan merupakan wilayah datar, dengan ketinggian daratan rata-rata ± 4 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pasuruan memiliki tingkat kemiringan antara 0-1 persen, yang melandai dari selatan ke utara; di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya lambat.

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan didominasi oleh proses sedimentasi yang dihasilkan oleh tiga sungai yang melintas di Kota Pasuruan, yakni: sungai Gembong, sungai Petung dan sungai Welang. Tanah tersebut dikenal dengan tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari pengendapan atau sedimentasi aliran air permukaan. Lokasi pembentukan tanah aluvial umumnya terjadi di daerah yang berbatasan dengan garis pantai dan lahan yang berada di sekitar muara sungai. Tanah hasil sedimentasi tersebut, sebagian besar dimanfaatkan sebagai areal tambak dan mangrove.

Secara hidrologi, wilayah Kota Pasuruan hanya terdiri atas air permukaan, yakni sungai. Sebagai wilayah pesisir, wilayah Kota Pasuruan menjadi lintasan ataupun muara sungai besar yang berhulu di kabupaten tetangga. Terdapat tiga sungai besar yang melintas di wilayah Kota Pasuruan, yakni: sungai Welang, sungai Petung dan sungai Gembong. Ketiga sungai tersebut berfungsi sebagai drainase alam yang bermuara di selat Madura, berkarakter melandai, sehingga seringkali mengalami sedimentasi, terutama di saat musim hujan.

Tabel 1.2
Sungai di Kota Pasuruan

No.	Nama Sungai	Panjang
1	Welang	1,00
2	Gembong	7,50
3	Petung	6,00
4	Sodo	3,00
5	Kepel	3,00
6	Calung	3,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan

Berhulu di Kabupaten Malang, sungai Welang melintas sepanjang 1 km di sisi barat Kota Pasuruan, tepatnya di wilayah Kelurahan Karangketugdan bermuara di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Tabel 2.2 merincikan kondisi sungai yang ada di Kota Pasuruan. Sungai Gembong merupakan sungai terpanjang yang melintas di wilayah Kota

Pasuruan, tepatnya 7,5 km. Sungai ini berhulu di Kabupaten Pasuruan dan melintas dari selatan ke utara, seakan-akan membelah wilayah Kota Pasuruan.

Muara sungai Gembong berlokasi di perbatasan Kelurahan Mandaranrejo dengan Kelurahan Ngemplakrejo. Dengan ukuran yang cukup lebar, muara sungai Gembong dimanfaatkan sebagai pelabuhan tradisional sejak zaman dahulu hingga saat ini. Berhulu di Kabupaten Pasuruan, sungai Petung melintas sepanjang 6 km di sisi timur Kota Pasuruan, dengan lokasi muara di perbatasan Kelurahan Kepel dengan Kelurahan Blandongan.

c. Jumlah Penduduk

Pada akhir tahun 2020 jumlah penduduk Kota Pasuruan tercatat sebanyak 210.247 jiwa yang terdiri dari 105.138 jiwa penduduk laki-laki dan 105.109 jiwa penduduk perempuan (sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2020).

Sedangkan data jumlah penduduk Kota Pasuruan Per 31 Desember 2020 berdasarkan jenjang umur (Usia) adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Struktur Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4	9.502	9.097	18.599
5-9	9.398	8.777	18.175
10-14	9.057	8.595	17.652
15-19	9.291	8.520	17.811
STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
20-24	8.828	8.259	17.087
25-29	8.126	7.662	15.788
30-34	7.836	7.783	15.619
35-39	8.772	8.794	17.566
40-44	7.912	8.025	15.937
45-49	6.917	7.314	14.231
50-54	6.166	6.727	12.893
55-59	5.009	5.705	10.714
60-64	3.848	4.113	7.961

65-69	2.463	2.528	4.991
70-74	1.058	1.471	2.529
> 75	955	1.739	2.694
Total	105.138	105.109	21.0247

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020

Komposisi penduduk Kota Pasuruan mayoritas berimbang pada struktur usia 0 – 39 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pasuruan memiliki sumber daya manusia yang cukup besar untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan tingkat pertumbuhan masyarakat yang stabil utamanya pada usia dini.

Jumlah penduduk Kota Pasuruan berdasarkanKecamatan Per 31 Desember2020 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Per Kecamatan
Per 31 Desember2020

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	GADINGREJO	24.540	23.862	48.402
2	PURWOREJO	31.016	31.011	62.027
3	BUGUL KIDUL	15.759	16.010	31.769
4	PANGGUNGREJO	33.823	34.226	68.049
	TOTAL	105.138	105.109	210.247

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020

Jumlah Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Kecamatan pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Panggungrejo mempunyai jumlah Penduduk yang terbesar yaitu sebesar 68.049 jiwa dibandingkan dengan 3 Kecamatan yang lainnya.

Jumlah Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Agama Per 31 Desember 2020 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.5
JumlahPenduduk Kota Pasuruan berdasarkan Agama
Per 31 Desember 2020

NO	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kong huchu	Aliran Keperca yaan	Jumlah
1	GADINGREJO	47591	440	198	43	127	0	1	48.402
2	PURWOREJO	60180	1014	573	63	190	0	0	62.027
3	BUGUL KIDUL	31311	272	148	15	23	0	0	31.769
4	PANGGUNGREJO	65216	1135	897	13	772	0	0	68.049
	KOTA PASURUAN	204298	2861	1816	134	1112	0	1	210.247

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020

Jumlah Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2020 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2020

NO	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Seder ajat	Tamat SD/ Sede raja	SLTP/ Seder ajat	SLTA/ Sedera jat	DI / II	Akade mi / DI / SI	DI V / Strata I	SI II	SI III	Jumlah
1	GADINGREJO	16726	4603	8956	5516	9704	171	421	2191	109	5	48.402
2	PURWOREJO	18830	4997	8187	7039	15384	392	1161	5612	411	14	62.027
3	BUGUL KIDUL	9495	2897	5479	3809	6790	173	491	2424	207	4	31.769
4	PANGGUNGREJO	23105	6597	12666	8043	13896	213	489	2907	129	4	68.049
KOTA PASURUAN		68156	19094	35288	24407	45774	949	2562	13134	856	27	210.247

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

1. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dari suatu daerah.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan kemampuan daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara arif, adil dan selaras serta perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut daerah telah diberi kewenangan yang seluasluasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan di Kota Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas :

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. Efisiensi;
4. Efektivitas;
5. Pembagian habis tugas;
6. Rentang kendali;
7. Tata kerja yang jelas; dan
8. Fleksibilitas.

Dari hasil pemetaan kelembagaan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pasuruan, terdapat beberapa Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Pasuruan, diantaranya :

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan pemerintahan pilihan, terdiri atas :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. perdagangan;
- e. kehutanan;
- f. energi dan sumber daya mineral.
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Pasuruan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Kota Pasuruan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah seperti tersebut diatas, maka susunan organisasi Pemerintah Kota Pasuruan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Daerah, Tipe B;
- (2) Sekretariat DPRD, Tipe C;
- (3) Inspektorat, Tipe B;
- (4) Dinas-Dinas Daerah, meliputi :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

- b. Dinas Kesehatan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Dinas Sosial, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Perhubungan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian;
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - o. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - q. Dinas Perikanan, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; dan
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (5) Badan-Badan Daerah, meliputi :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Tipe A, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah, Tipe C, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Tipe B, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 - d. Badan Pendapatan Daerah, Tipe C, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan
- (6) Kecamatan, meliputi :
- a. Kecamatan Gadingrejo, Tipe A;
 - b. Kecamatan Panggungrejo, Tipe A;
 - c. Kecamatan Bugul Kidul, Tipe A; dan
 - d. Kecamatan Purworejo, Tipe A.

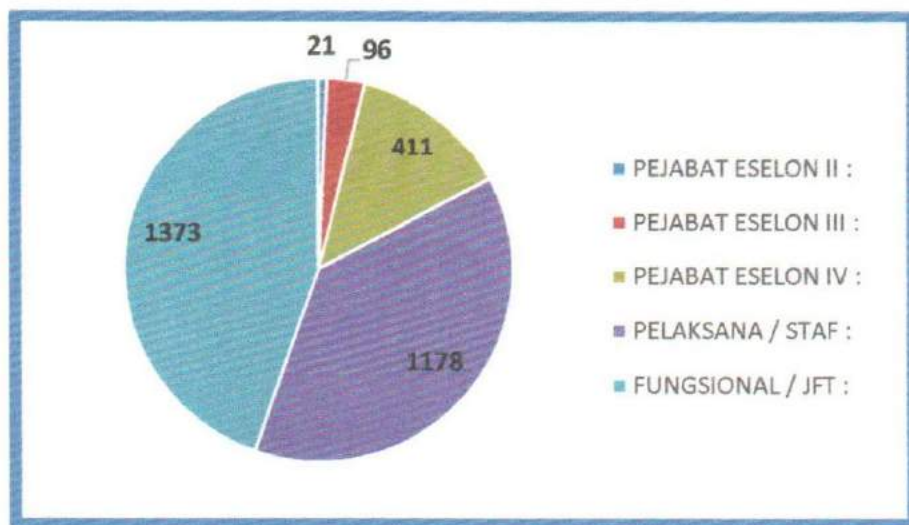
Adapun struktur organisasi secara keseluruhan Pemerintah Kota Pasuruan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



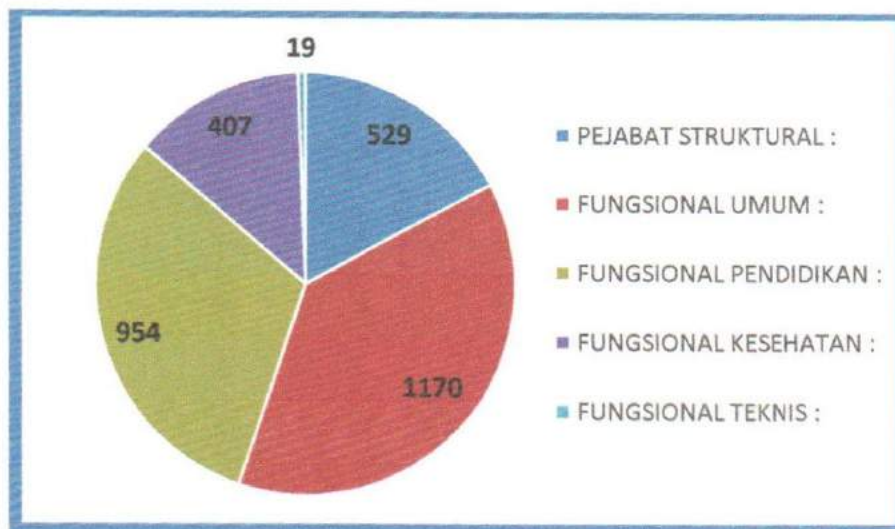
2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan kompetensi. Dalam pengelolaan data kepegawaian, Kota Pasuruan menggunakan Sistem Informasi Manajemen ASN Kota Pasuruan (Si Maskot) yang dilakukan secara online, sehingga mempermudah proses pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Adapun aplikasi Si Maskot ini bisa diakses pada halaman <http://202.148.24.10/simpeg/login>.

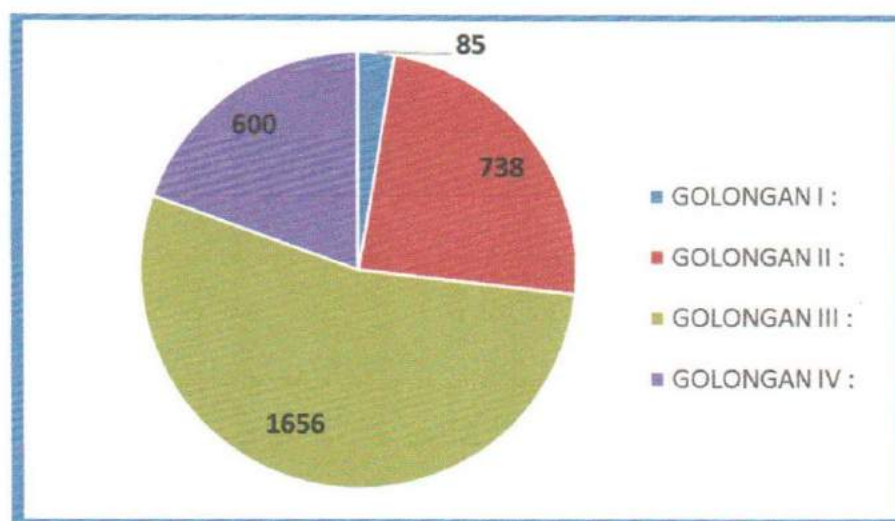
Untuk kondisi sumber daya manusia / kepegawaian Pemerintah Kota Pasuruan secara umum dapat digambarkan pada grafik dibawah ini :



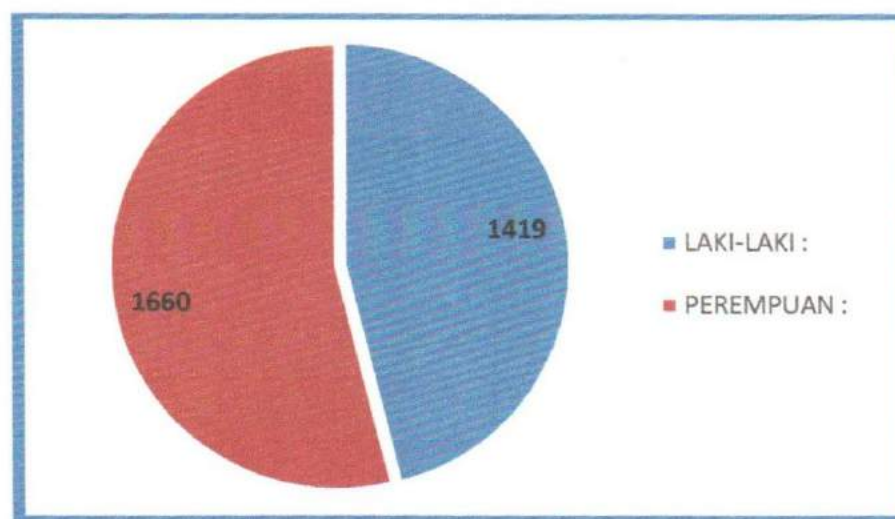
Jumlah ASN Kota Pasuruan berdasarkan Eselon



Jumlah ASN Kota Pasuruan berdasarkan Tipe Jabatan



Jumlah ASN Kota Pasuruan berdasarkan Golongan



Jumlah ASN Kota Pasuruan berdasarkan Jenis Kelamin

e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta bermanfaat untuk masyarakat.

Pemerintah Kota Pasuruan dalam pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD Tahun 2020 Pemerintah Kota Pasuruan disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri dari formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*). Formulasi kebijakan anggaran yang menjadi dasar dalam perencanaan operasional anggaran adalah Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Daerah. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal sedangkan perencanaan rasional anggaran lebih ditekankan

pada alokasi sumber daya keuangan. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Latar belakang penyusunan KUA adalah dalam rangka menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahun 2020 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan tahun 2016-2021 dengan mengacu pada RKPD Kota Pasuruan tahun 2020.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan dan penganggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan Bersama antara pihak DPRD Kota Pasuruan dengan Pemerintah Kota Pasuruan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Data realisasi APBD tahun 2020 dituangkan dalam LKPJ Walikota Pasuruan Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan data *unaudited* atau belum diaudit oleh BPK. Data keuangan yang sudah diaudit akan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2020. APBD tahun 2020 telah selesai dilaksanakan per 31 Desember 2020 dan saat ini masih dalam proses audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Berdasarkan realisasi dan struktur APBD Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

- (a) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta
- (b) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2020, dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 136.640.447.114,65
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 568.264.301.262,00
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 72.990.798.143,00 +
Rp. 777.895.546.519,65

Secara rinci uraian pendapatan daerah Kota Pasuruan bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 136.640.447.114,65
Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 31.598.349.894,00
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 6.783.403.667,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 5.515.529.677,40
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 92.743.163.876,25
PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 615.952.425.482,00
Dana Perimbangan	Rp. 568.264.301.262,00
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 46.736.973.593,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp. 34.802.195.669,00
Dana Alokasi Umum	Rp. 412.604.511.000,00
Dana Alokasi Khusus	Rp. 74.120.621.000,00
Dana Lainnya	-
Dana Penyesuaian	-
Dana Transfer Propinsi	Rp. 47.688.124.220,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp. 47.688.124.220,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp. 25.302.673.923,00
Pendapatan Hibah	Rp. 22.226.944.923,00
Pendapatan Lainnya	Rp. 3.075.729.000,00
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 777.895.546.519,65

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Untuk penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kota Pasuruan tahun 2020, dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| a. Belanja Operasi sebesar | Rp. 867.973.738.080,25 |
| b. Belanja Modal sebesar | Rp. 122.289.227.052,49 |
| c. Belanja Tak Terduga sebesar | Rp. 54.679.973.480,41 + |
| | Rp. 1.044.942.938.613,15 |

Secara rinci uraian Belanja Daerah Kota Pasuruan bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Rincian Belanja Daerah Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN
BELANJA OPERASI	Rp. 867.973.738.080,25
Belanja Pegawai	Rp. 452.938.979.348,53
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 305.544.036.871,72
Belanja Hibah	Rp. 66.097.070.500,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 42.801.334.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 592.317.360,00
BELANJA MODAL	Rp. 122.289.227.052,49
Belanja Tanah	Rp. 24.450.693.150,00
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 42.432.600.697,89
Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 20.636.377.880,60
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 30.015.782.569,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 785.192.000,00
Belanja Aset Lainnya	Rp. 3.968.580.755,00
BELANJA TAK TERDUGA	Rp. 54.679.973.480,41
Belanja Tak Terduga	Rp. 54.679.973.480,41
TOTAL BELANJA	Rp. 1.044.942.938.613,15

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, untuk pembiayaan Kota Pasuruan tahun 2020 dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

- a. Penerimaan Daerah sebesar Rp. 268.547.392.093,50
- b. Pengeluaran Daerah sebesarRp. 1.500.000.000,00 -
Rp. 267.047.392.093,50

Secara rinci uraian pembiayaan daerah Kota Pasuruan bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2020

	URAIAN	ANGGARAN
	PENERIMAAN DAERAH	Rp. 268.547.392.093,50
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp. 243.079.429.454,62
	Pencairan Dana Cadangan	Rp. 25.296.876.900,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 171.085.738,88
	PENGELUARAN DAERAH	Rp. 1.500.000.000,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 1.500.000.000,00
	TOTAL PEMBIAYAAN	Rp. 267.047.392.093,50

4. Target dan Realisasi

Capaian realisasi anggaran Kota Pasuruan tahun 2020 sebesar 78,85 % dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLIDAEARAH	777.895.546.519,65	805.314.148.967,75	103,52
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	136.640.447.114,65	140.678.811.692,75	102,96
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	31.598.349.894,00	34.171.499.456,00	108,14
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.783.403.667,00	7.163.511.862,00	105,60
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.515.529.677,40	5.479.307.832,40	99,34
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	92.743.163.876,25	93.864.492.542,35	101,21
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	615.952.425.482,00	639.845.008.275,00	103,88
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	568.264.301.262,00	559.188.950.840,00	98,40
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	46.736.973.593,00	39.815.751.344,00	85,19
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	34.802.195.669,00	45.379.870.960,00	130,39
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	412.604.511.000,00	403.909.797.000,00	97,89
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	74.120.621.000,00	70.083.531.536,00	94,55
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00	8.271.704.000,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	8.271.704.000,00	0,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.688.124.220,00	72.384.353.435,00	151,79
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	47.688.124.220,00	72.384.353.435,00	151,79
1.3.1	Pendapatan Hibah	25.302.673.923,00	24.790.329.000,00	97,98
1.3.3	Pendapatan Lainnya	22.226.944.923,00	22.024.600.000,00	99,09
2	BELANJA	3.075.729.000,00	2.765.729.000,00	89,92
2.1	BELANJA OPERASI	1.044.942.938.613,15	823.954.678.736,67	78,85
2.1.1		867.973.738.080,25	727.177.635.493,67	83,78

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
2.1.1	Belanja Pegawai	452.938.979.348,53	411.897.154.369,00	90,94
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	305.544.036.871,72	229.704.116.198,65	75,18
2.1.5	Belanja Hibah	66.097.070.500,00	60.657.923.177,00	91,77
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.801.334.000,00	24.326.124.389,02	56,83
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	592.317.360,00	592.317.360,00	100,00
2.2	BELANJA MODAL	122.289.227.052,49	75.952.991.656,00	62,11
2.2.1	Belanja Tanah	24.450.693.150,00	71.820.188,00	0,29
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	42.432.600.697,89	34.708.382.204,00	81,80
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	20.636.377.880,60	20.122.736.875,00	97,51
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.015.782.569,00	18.473.815.298,00	61,55
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	785.192.000,00	545.633.755,00	69,49
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	3.968.580.755,00	2.030.603.336,00	51,17
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	54.679.973.480,41	20.824.051.587,00	38,08
2.3.1	Belanja Tak Terduga	54.679.973.480,41	20.824.051.587,00	38,08
	SURPLUS / (DEFISIT)	(267.047.392.093,50)	(18.640.529.768,92)	6,98
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN DAERAH	268.547.392.093,50	243.094.211.358,62	90,52
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	243.079.429.454,62	243.079.429.454,62	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	25.296.876.900,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	171.085.738,88	14.781.904,00	8,64
3.2	PENGELUARAN DAERAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	267.047.392.093,50	241.594.211.358,62	90,47
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN(SILPA)	0,00	222.953.681.589,70	0,00

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini. Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren).

Permasalahan daerah Kota Pasuruan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain :

1. Dalam mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Peningkatan kesejahteraan pendidik belum diikuti dengan kualitas tenaga pendidik.
- Belum optimalnya kualitas lulusan anak didik.

2. Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Balita gizi buruk.
- Tingginya penyakit tidak menular.
- Masih terdapat stunting.
- Tingginya angka kematian bayi.
- Tingginya angka kematian ibu melahirkan.
- Masih adanya kekerasan rumah tangga pada perempuan dan anak.
- Masih kurangnya sebagian masyarakat terhadap pola hidup sehat.

3. Dalam meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha dengan sasaran meningkat kesempatan kerja.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.
- Masih rendahnya kesempatan kerja.
- Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

- Masih rendahnya tata kelola lembaga koperasi.
 - Masih rendahnya produktivitas usaha mikro.
4. Dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial dengan sasaran meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa serta menurunkan kemiskinan.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Rendahnya pertumbuhan industri.
 - Menurunnya laju pertumbuhan perdagangan.
 - Pendapatan per kapita lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur.
 - Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan.
 - Tingginya angka kemiskinan.
5. Dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur serta prasarana dan sarana wilayah serta kualitas lingkungan hidup.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Belum optimalnya konektivitas wilayah pertumbuhan baru.
 - Belum optimalnya kelayakan infrastruktur prasarana dan sarana wilayah.
 - Belum optimalnya kualitas air.
 - Belum optimalnya kualitas udara.
 - Belum optimalnya tutupan lahan.
6. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah serta menurunkan ketergantungan keuangan daerah.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Belum maksimalnya indeks kepuasan masyarakat.
 - Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja.
 - Masih rendahnya pendapatan asli daerah.
 - Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun

harmonis sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan sasaran meningkatnya kerukunan masyarakat serta meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Belum optimalnya apresiasi dan partisipasi pengembangan dan pelestarian budaya.
- Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah.
- Belum optimalnya masyarakat dalam tanggap bencana.

Isu strategis pembangunan Kota Pasuruan tahun 2016-2021 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Kota Pasuruan tahun 2016- 2021 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal, yakni: permasalahan pembangunan, penelaahan RPJPD Kota Pasuruan 2005-2025, RPJMN 2014-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, RPJMD Kabupaten Pasuruan 2013-2018 dan isu-isu global.

Adapun Visi, Misi serta Janji Kerja Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan juga menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Pasuruan 2016-2021. Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021, dikelompokkan ke dalam kelompok isu utama yaitu Isu Pembangunan Manusia, Isu Percepatan Ekonomi dan Infrastruktur, Isu Kota Hijau dan Isu Integritas Aparatur dan Birokrasi.

Isu Strategis Pembangunan
Internasional, Nasional, Propinsi dan
Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Kota Pasuruan
1	Pembangunan manusia	Isu pendidikan dan kesehatan
		Isu narkoba
		Isu kesetaraan akses untuk disabilitas
		Isu Pemuliaan Perempuan
		Isu pemuda, seni, budaya dan olahraga
2	Percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur	Isu ketahanan pangan
		Isu industri kreatif
		Isu Ketimpangan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
		Isu Banjir, Rob dan Genangan
		Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
3	Integritas aparatur	Isu Reformasi Birokrasi
		Isu Pembiayaan Pembangunan
4	Lingkungan lestari	Isu Perumahan dan Permukiman
		Isu Lingkungan Hidup
		Isu Strategis Internasional
		Masyarakat Ekonomi ASEAN
		Sustainable Development Goals (SDGs)
		Isu Strategis Nasional
		Isu Strategis dan Pilihan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
		Isu Strategis dan Pilihan Kebijakan Pembangunan Manusia
		Isu Strategis dan Pilihan Kebijakan Pembangunan Ekonomi
		Isu Strategis dan Pilihan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
		Isu Strategis dan Pilihan Kebijakan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
		Isu Strategis Provinsi
		Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
		Kemiskinan, Pengangguran dan Lapangan Kerja
		Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi
		Infrastruktur dan Perhubungan
		Perumahan, Pemukiman Kumuh, dan Persampahan
		Reformasi Birokrasi
		Isu Strategis Kabupaten Pasuruan

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Kota Pasuruan
		Pelestarian DAS Sungai Gembong, Sungai Petung dan Sungai Welang yang berhulu di Kabupaten Pasuruan
		Pembangunan prasarana dan sarana wisata Gunung Bromo via Kabupaten Pasuruan, perlu didukung sarana akomodasi di Kota Pasuruan

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kota Pasuruan Perubahan 2016-2021, diolah

1. Isu Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya, akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan.

Kebijakan pemerintah untuk mengalihkan kewenangan pendidikan menengah atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, menimbulkan pertanyaan sejumlah kelompok masyarakat mengenai keberlanjutan pendidikan gratis di Kota Pasuruan, khususnya untuk SMA/SMK. Kegundahan sebagian kelompok ini, dirasa cukup wajar mengingat pendidikan gratis di Kota Pasuruan sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat adalah mengurangi ketimpangan kualitas sekolah. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya kecenderungan penumpukan minat siswa di suatu sekolah padasaat penerimaan siswa baru, sementara di sekolah lain terjadi hal yang sebaliknya.

Upaya pengurangan ketimpangan ini antara lain dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala, sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.

Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala

diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah di Kota Pasuruan. Diharapkan dengan berkurangnya ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah, maka para siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dalam setiap klasternya.

Selain akses layanan pendidikan yang belum merata, kurangnya mutu pelayanan pendidikan, belum optimalnya tata kelola lembaga pelayanan pendidikan juga rendahnya kualitas materi dan metode pembelajaran, masih menjadi persoalan penting untuk pencapaian target urusan pendidikan.

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumberdaya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan daerah. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.

Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan secara lintas sektoral.

Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan ibu dan bayi usia di bawah lima tahun (balita).

Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Klinik Kesehatan, dan Rumah Sakit.

2. Isu Narkoba

Isu strategis narkoba merupakan tindak lanjut dari kondisi darurat narkoba secara nasional. Status tersebut didasari realitas bahwa Indonesia telah menjadi pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara serta bahwa kerugian yang ditimbulkan semakin meluas baik dari jumlah korban maupun manifestasi dampak negatifnya. Narkotika juga menjadi isu yang cukup relevan bagi daerah.

Penyalahgunaan narkoba tidak saja menjadi masalah keamanan dan penegakan hukum, namun juga terkait dengan isu kesehatan, sosial, ekonomi hingga politik. Oleh karena itu penanganan isu narkoba melibatkan lintas program, PD dan sektor. Pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan anti-narkoba dapat ditempuh melalui dua arah, yakni: (a) Menurunkan demand side melalui intensifikasi upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba; dan (b) Menekan supply side melalui peningkatan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain: Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; Pengadaan tes penggunaan narkoba secara berkala dilingkungan Pemerintahan Kota. (iii) information-sharing antar instansi dan oleh seluruh komponen masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (iv) razia di kawasan potensial sentra produksi dan peredaran narkoba.

3. Isu Kesetaraan Akses Untuk Disabilitas

Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan. Salah satunya adalah belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang, yang secara jelas menyebutkan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah di antaranya adalah hak untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.

Upaya untuk mendorong partisipasi para disabilitas antara lain dengan mendirikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan pemberian insentif kepada pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas minimal satu persen dari jumlah karyawan. Hak difabel lainnya yang perlu untuk difasilitasi secara optimal yaitu hak untuk hidup secara mandiri, termasuk penentuan tempat tinggal dengan menerima bantuan Pemerintah Daerah, serta menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pasuruan akan mendorong perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Disamping itu hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah akan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan publik untuk disabilitas yang hingga saat ini belum maksimal.

4. Isu Pemuliaan Perempuan

Salah satu fakta terkait dengan kesetaraan gender adalah mengenai jumlah pelaku UKM di Kota Pasuruan, yang besarnya mencapai sekitar 90 persen, dimana mayoritas pekerjaannya adalah perempuan yang bekerja adalah sebagai karyawan/buruh

Fakta lain yang cukup berkorelasi terhadap permuliaan perempuan adalah angka capaian ASI eksklusif di Kota Pasuruan, yang masih perlu ditingkatkan. Lebih lanjut dapat kita ketahui bersama bahwa belum semua rumah sakit dan puskesmas menerapkan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM), serta belum semua tempat kerja menyediakan ruang ASI. Dalam rangka mendukung fasilitas publik ramah perempuan dan anak, perlu adanya kebijakan dan program Pemerintah Kota Pasuruan yang menyediakan daycare terjangkau bagi warga menengah ke bawah, terutama di wilayah pusat kegiatan ekonomi warga.

Guna menunjang pertumbuhan anak yang optimal, selain ASI eksklusif ditekankan pula akan pentingnya peran ayah pasca kelahiran anak. Alasan pentingnya paternity leave adalah bahwa secara alami, penting bagi seorang ayah untuk membentuk koneksi yang kuat dan ikatan dengan anaknya. Lebih lanjut juga bahwa kedekatan seorang ayah dan bayinya itu sama pentingnya dengan kedekatan dengan ibunya. Jadi akan sangat berarti buat seorang ayah untuk menghabiskan waktu

sebanyak mungkin dengan bayinya. Sebagai informasi praktik paternity leave telah diterapkan di berbagai negara, diantaranya Islandia selama 4 bulan, Finlandia selama 54 hari dan Portugal selama 20 hari.

Guna menunjang upaya permuliaan perempuan, Pemerintah Kota Pasuruan akan memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas umum yang rawan tidak aman bagi kaum perempuan dan anak, diantaranya adalah penjaminan keamanan. Perlindungan perempuan juga erat kaitannya dengan masih terdapatnya kasus KDRT. Hal ini lah yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan terhadap upaya permuliaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam upaya perlindungan anak, Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan upaya pelaksanaan Kota Layak Anak. Dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Layak Anak dengan melakukan internalisasi Konsep KLA ke dalam kebijakan dan kelembagaan dalam rangka melaksanakan berbagai inisiatif untuk percepatan pencapaian KLA. Maka dari itu untuk mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Layak Anak perlunya meningkatkan upaya penguatan kelembagaan KLA melalui peraturan/kebijakan, pembentukan lembaga tugas dan pelibatan pemangku kepentingan terkait.

5. Isu Pemuda, Seni, Budaya dan Olahraga

Para pemuda di Kota Pasuruan sangat memerlukan wahana seni, budaya dan olahraga sebagai wadah aktualisasi diri. Tanpa adanya hal tersebut, akan membuat para pemuda cenderung menyalurkannya pada kegiatan yang sifatnya negatif. Terkait hal tersebut, diperlukan adanya sarana prasarana yang dapat menjadi media bagi para pemuda untuk mengaktualisasikan dirinya, sekaligus untuk memperkuat bentuk aktivitas komunitas.

Wahana seni, budaya dan olah raga yang berskala paling besar saat ini di Kota Pasuruan adalah Stadion Untung Suropati dan Gelanggang Olahraga. Selain itu di masing-masing wilayah, telah tersedia pula lapangan olahraga. Untuk ke depan, diperlukan banyak prasarana yang dapat mengakomodir penyelenggaraan berbagai kegiatan kepemudaan di bidang seni, budaya dan olah raga yang sesuai standar difasilitasi oleh Pemerintah. Diharapkan dengan peningkatan sarana prasarana tersebut dapat menjadi wahana interaksi sekaligus pengembangan bakat para pemuda dan masyarakat pada umumnya.

6. Isu Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Disisi lain tingkat ketergantungan pangan Kota Pasuruan pada daerah lain masih cukup tinggi. Dengan demikian keterjaminan kelangsungan pasokan pangan bagi seluruh warga Kota Pasuruan menjadi isu penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun diketahui bahwa tingginya inflasi volatile food menunjukkan harga bahan pangan sukar dikendalikan dan membuat warga kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah gangguan kelancaran distribusi bahan pokok; rantai distribusi yang panjang dan pasokan yang tidak menentu, infrastruktur logistik yang kurang, kurangnya moda transportasi untuk mengangkut kebutuhan bahan pokok dari daerah penghasil, dan tidak adanya tempat-tempat untuk menyimpan bahan pangan yang dekat dengan warga. Kondisi ini diperburuk dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan dari sektor pertanian yang setiap tahun terus menurun dan belum digalakkannya pertanian kota.

Kendala lain yang dihadapi adalah masih terdapatnya indikasi bahan-bahan berbahaya dalam pangan yang tersedia di Kota Pasuruan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pengendalian kualitas kesehatan pangan serta pengawasan distribusi pangan. Pengawasan dan pengendalian tersebut juga diharapkan dapat mencegah spekulasi distribusi pangan.

7. Isu industri kreatif

Menurut definisi dari Kementerian Perdagangan RI, Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplotasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Lebih lanjut pengembangan industri kreatif di Kota Pasuruan masih berjalan lambat, sehingga perlu didorong lebih cepat.

Pertumbuhan industri di Kota Pasuruan mengalami tren penurunan. Sebagaimana diketahui, semakin tingginya tingkat persaingan di sektor industri dan makin terbukanya pasar secara global/regional

(hilangnya hambatan/proteksi perdagangan) mengakibatkan pertumbuhan industri Kota Pasuruan mengalami tren penurunan.

Walaupun jika dilihat dari pertumbuhannya, sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan, namun sektor ini dimasa depan diharapkan dapat tetap memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan di Kota Pasuruan.

Salah satu prospek yang menjanjikan adalah menggeliatnya perkembangan industri kreatif yang ada. Dengan dukungan sumberdaya manusia dan potensi ekonomi lokal, ke depan industri ini diharapkan akan memberikan peluang pertumbuhan baru bagi industri di Kota Pasuruan.

Kota Pasuruan memiliki potensi yang menjanjikan untuk menjadi kota kreatif. Setidaknya, terdapat 2 sektor industri kreatif di Kota Pasuruan yakni: (i) desain; (ii) kerajinan tangan/kriya; dan (iii) cor logam. Harus diakui, eksistensi dan perkembangan industri kreatif di Kota Pasuruan relatif tertinggal bila dibandingkan dengan kota-kota lain, yang lebih mapan eksistensi industri kreatifnya, misal: Kota Yogyakarta, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali maupun Kota Bandung.

Pun demikian, karakter dan kontribusi nyata industri Kota Pasuruan, dapat terlihat sebagai fakta umum yang belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan Pemerintah Kota Pasuruan, baik secara finansial melalui anggaran, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan.

Dukungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui: (i) pembangunan pusat kreatif (creative center); (ii) pengembang kawasan kreatif; (iii) pemberian penghargaan di bidang kreatif; (iv) dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Kota Pasuruan yang memiliki kreasi unik; (v) kampanye pengembangan produk-produk kreatif; (vi) pengadaan seminar kreatif, dan lain sebagainya.

8. Isu Ketimpangan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Indeks Gini menunjukkan ketimpangan, yang juga menginformasikan semakin rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah.

Lebih jauh lagi, kemiskinan hakikatnya tidak hanya mengenai

kesenjangan pendapatan, melainkan bersifat multidimensi sehingga hal ini berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini di Kota Pasuruan masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak. Adanya persoalan tersebut dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian Kota Pasuruan, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, salah satunya melalui penggunaan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), yang mencakup akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup, serta perlu adanya perlindungan fiskal dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Penyediaan lapangan kerja menjadi aspek krusial dalam menekan angka kemiskinan, namun penyediaan lapangan kerja masih menjadi masalah utama bagi mayoritas warga Kota Pasuruan. Selain penyediaan lapangan kerja, aspek penilaian kemudahan berbisnis juga cukup mendasar dalam upaya mendorong perekonomian Kota Pasuruan. Selain penyediaan lapangan pekerjaan dan mengupayakan terwujudnya kemudahan berbisnis, diupayakan pula pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat Kota Pasuruan. Hal ini penting mengingat bahwa prospek kewirausahaan di Kota Pasuruan cukup baik dan pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

9. Isu Banjir, Rob dan Genangan

Rentannya kondisi Kota Pasuruan terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari geografi Kota Pasuruan, yang memiliki tingkat kemiringan 0-3 persen dan aliran 3 sungai besar di dalam wilayahnya. Disamping itu adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi di wilayah Kota Pasuruan serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di Kota Pasuruan sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan (stake holder) terkait pengelolaan skema pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi penanggulangan banjir dan genangan adalah diperlukannya penguatan

kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiap-siagaan masyarakat.

Selain banjir, Pemerintah Kota Pasuruan juga perlu mengantisipasi fenomena banjir rob yang disebabkan oleh pasang surut air laut maupun penurunan muka tanah(land subsidence) pada beberapa kawasan. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pembangunan tanggul laut dan tanggul muara sungai.

10. Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan untuk menjamin pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang guna terwujudnya visi, misi, dan tujuan penataan ruang. Adapun beberapa instrumen yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain terdiri atas: Peraturan Zonasi, arahan pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana/sarana umum, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif,sertapenjatuhan sanksi.

Peraturan Zonasi merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat uraian zonasi pada setiap zona peruntukan, meliputi: ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Ketinggian Bangunan, dan sebagainya, termasuk ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimum, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang

Selanjutnya mengenai pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk: meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Dalam implementasi pemanfaatan ruang, seringkali ditemukan adanya pelanggaran.Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administrasi

dan/atau pidana.Salah satu bentuk pelanggaran adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang atau izin yang diberikan.

Dalam praktek pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang saat ini, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain belum adanya peraturan dan instrumen yang mengatur tentang insentif dan disinsentif dari Pemerintah, keterbatasan data dan informasi, serta belum efektifnya kelembagaan dan peran serta masyarakat.

Keterbatasan data/ informasi, dokumen, dan peta terkait kondisi di lapangan seringkali menyulitkan upaya-upaya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.Oleh karena itu, untuk pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, selain diperlukan adanya peraturan dan panduan yang implementatif, juga diperlukan dukungan sistem informasi yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang di lapangan.

Permasalahan dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang sangat erat kaitannya dengan isu efektivitas kelembagaan dalam pengendalian penataan ruang. Agar dapat menciptakan tertib ruang sesuai dengan rencana tata ruang, maka pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya oleh perangkat daerah yang berwenang, tetapi juga harus didukung oleh lembaga lain, baik pemerintah dan non- pemerintah di level pusat sampai dengan daerah. Kurangnya koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berakibat pada rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang, mengingat penataan ruang merupakan urusan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Keterbatasan perangkat daerah atau sumber daya manusia dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan solusi. Selama ini pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 telah mengatur bentuk dan tata cara masyarakat dalam berpartisipasi dalam penataan ruang. Namun dalam pelaksanaannya,partisipasi masyarakat dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada masih belum optimal. Selama ini LSM dan masyarakat baru dilibatkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang, namun belum dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Isu Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari high cost economy diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

12. Isu Pembiayaan Pembangunan

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Kota Pasuruan dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan Kota Pasuruan akan hal tersebut di atas.

Ada beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan Obligasi Daerah. Namun demikian, Pemerintah Kota Pasuruan harus mempertimbangkan dan

mampu menghitung kemampuan Pemerintah Kota Pasuruan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud. Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kota Pasuruan, sehingga Pemerintah Kota Pasuruan perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / Corporate Social Responsibility (CSR). Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema TSLDU. Namun demikian, dirasakan masih ada peluang dan ruang untuk optimalisasi baik dari sisi swasta maupun Pemerintah Kota Pasuruan didalam pengelolaannya, diantaranya sinergi antara kegiatan TSLDU dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat.

Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dan berasal dari komunitas/masyarakat itu sendiri. Selama ini, pola pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktifitas sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Untuk lebih menggerakkan potensi "swa-pendanaan" Pemerintah Kota Pasuruan perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi yang ada di mereka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

13. Isu Perumahan dan Permukiman

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Pasuruan, kebutuhan akan perumahan dan permukiman pun semakin meningkat. Hingga saat ini peruntukan lahan untuk perumahan dan permukiman sudah menduduki proporsi terbesar di Kota Pasuruan. Namun dalam

kenyataannya tingginya permintaan terhadap perumahan dan permukiman, tidak disertai dengan penambahan jumlah perumahan dan permukiman, sehingga mengakibatkan adanya backlog.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan adalah permukiman kumuh. Area permukiman di wilayah Kota Pasuruan belum tertata sepenuhnya, sehingga perlu ditekankan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota melalui prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk penataan kampung, perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. Kota Pasuruan sebagai magnet bagi migrasi penduduk merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya kawasan-kawasan kumuh di Kota Pasuruan, sehingga optimalisasi pencegahan dan penanganan terhadap penertiban permukiman kumuh perlu terus ditingkatkan melalui penataan kawasan sungai, penertiban tanah negara, dan penertiban jalur hijau yang saat ini masih terdapat permukiman kumuh. Dengan melakukan perbaikan lingkungan tempat tinggal dan penyediaan hunian yang layak dapat membantu mewujudkan salah satu sasaran SDGs, yakni 'Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan'.

14. Isu Lingkungan Hidup

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Tingginya tingkat kegiatan di Kota Pasuruan mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) kota. Sekalipun luasan RTH di Kota Pasuruan selama periode 2010-2015 cenderung meningkat,

tetapi masih jauh dari target nasional sebesar 30 persen dari luas kota secara keseluruhan. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun taman Rukun Tetangga (RT), taman Rukun Warga (RW), taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, jalur hijau, permakaman, penghijauan sempadan sungai, dan penghijauan sempadan rel kereta api yang tersebar merata di berbagai lingkungan/permukiman.

Untuk pengelolaan sampah perkotaan relatif meningkat dari tahun ke tahun, dimana cakupan pelayanan pengangkutan sampah pada tahun 2014 berkisar 62,13 persen dan meningkat menjadi 63,01 persen pada tahun 2015. Permasalahan sampah perlu ditangani sesegera mungkin karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blandongan memiliki batas masa pakai tertentu. Gerakan seperti pengembangan bank sampah di lingkungan masyarakat perlu lebih diintensifkan lagi. Optimasi 3-R (reuse, reduce, dan recycle) di lingkungan keluarga juga perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat dihasilkan sampah yang sangat sedikit (zero waste home). Penggunaan plastik harus diminimalisasi, selain itu dapat dikembangkan suatu produk hasil dari daur ulang sampah (recycle) skala lingkungan yang bernilai ekonomis. Pola waste to energy skala kota perlu segera diinisiasi, untuk kemudian juga dapat diterapkan dalam lingkup yang lebih kecil lagi, seperti di tingkat RW. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 di tingkat kota juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Sarana truk sampah, motor sampah, dan sarana lainnya perlu disediakan secara layak dan cukup. Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang inovatif akan menjadi salah satu perhatian agar tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Pengakuan melalui penghargaan dari individu yang berjasa dalam menggalakkan kebersihan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, disamping pelaksanaan kampanye di media cetak/digital.

Air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air dengan kualitas baik sesuai standar tertentu sudah cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga menyebabkan kualitas air menurun, begitupun dengan kuantitasnya. Secara umum, sumber-sumber pencemaran air adalah limbah industri

(bahan kimia baik cair maupun padatan, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak atau oli), limbah pertanian, limbah pengolahan kayu, serta limbah rumah tangga. Usaha-usaha yang dapat dilakukan menjaga air agar tetap bersih diantaranya adalah menempatkan daerah industri jauh dari daerah perumahan atau permukiman, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran, memperluas gerakan penghijauan, penindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait arti lingkungan hidup sehingga masyarakat lebih mencintai lingkungan hidupnya.

Fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim berdampak terjadinya perubahan sosial atau kependudukan dan budaya, berbagai kajian sosial menemukan bahwa pola hubungan sosial berkaitan sangat erat dengan pola iklim. Hasil kajian IPCC (2007) menunjukkan bahwa sejak tahun 1850 tercatat adanya 12 tahun terpanas berdasarkan data temperatur permukaan global. Sebelas dari duabelas tahun terpanas tersebut terjadi dalam waktu 12 tahun terakhir ini. Kenaikan temperatur total dari tahun 1850-1899 sampai dengan tahun 2001-2005 adalah 0,76ES. Permukaan air laut rata-rata global telah meningkat dengan laju rata-rata 1,8 mm per tahun dalam rentang waktu antara lain antara tahun 1961-2003. Kenaikan total permukaan air laut yang berhasil dicatat pada abad ke-20 diperkirakan 0,17 m. Laporan IPCC juga menyatakan bahwa kegiatan manusia ikut berperan dalam pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20. Pemanasan global akan terus meningkat dengan percepatan yang lebih tinggi pada abad ke-21 apabila tidak ada upaya menanggulangnya. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrem. IPCC menyatakan bahwa pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis, seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi (termasuk di daerah Arktika dan Antartika), lokasi yang tinggi serta ekosistem-ekosistem pantai. Jika tidak ada upaya

yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan. Penanganan masa perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada saat bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Juga membutuhkan pendekatan lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Dalam menghadapi perubahan iklim, peningkatan ketahanan sistem dalam masyarakat untuk mengurangi resiko bahaya perubahan iklim dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Namun upaya tersebut akan sulit memberi manfaat secara efektif apabila laju perubahan iklim melebihi kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, adaptasi harus diimbangi dengan mitigasi, yaitu upaya mengurangi sumber maupun peningkatan rosot (penyerapan) gas rumah kaca, agar supaya proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, generasi yang akan datang tidak terbebani oleh ancaman perubahan iklim secara lebih berat.

Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya. Sedangkan lahan itu sendiri bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi. Keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan kota berkembang secara fisik ke arah pinggiran kota. Terkait dengan penggunaan lahannya, daerah pinggiran merupakan wilayah yang banyak mengalami perubahan penggunaan lahan terutama perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan kota di dekatnya. Penurunan luas lahan pertanian di wilayah ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat hal ini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat

perkotaan. Mengingat wilayah ini merupakan wilayah yang akan berubah menjadi kota sepenuhnya di masa mendatang maka perlu komitmen dari penentu kebijakan untuk mengelola dan menatanya agar menjadi kota yang ideal sesuai dengan konsep kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang Kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di Kota.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

b.1. Visi Kota Pasuruan

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam periode waktu tertentu. Visi pembangunan daerah Kota Pasuruan untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

"Kota Pasuruan lebih sejahtera mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri"

Berdasarkan visi pembangunan yang hendak dicapai, maka dalam perumusan dan penjelasannya, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan sebagai berikut:

1. Kota Pasuruan lebih sejahtera :

Tema "sejahtera" yang menjadi cita-cita pembangunan Kota Pasuruan 5 tahun ke depan, merupakan konsekuensi dari amanat pembukaan UUD 1945 pada alinea IV. Visi pembangunan nasional 2015–2019 secara implisit mengangkat tema kesejahteraan. Sementara visi pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014–2019, secara eksplisit juga memuat tema kesejahteraan.

Kondisi lebih sejahtera dicapai dengan mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai warga negara.

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.

Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna.

2. Kota Pasuruan lebih mandiri :

Cita-cita untuk mewujudkan pembangunan yang mampu memberdayakan potensi lokal, adalah hal yang melatarbelakangi tema "kemandirian" dalam visi pembangunan Kota Pasuruan. Dalam pada itu, kemandirian menjadi tema yang secara tersurat dikandung dalam

visi pembangunan nasional 2015–2019 dan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014–2019.

Mandiri adalah suatu kondisi yang mengindikasikan keberdayaan untuk membangun dan memelihara kelangsungan hidup dengan menggunakan potensi sumberdaya yang dimiliki sendiri. Membangun Kota Pasuruan berdasarkan potensi yang ada di Kota Pasuruan dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Kota Pasuruan, Jawa Timur, nasional, maupun internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan parapihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Kemandirian juga membawa pesan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara mandiri. Artinya, dalam pembangunan harus ada upaya untuk menggali dan memberdayakan segenap potensi lokal yang dimiliki. Dalam konteks sosial, membangun kemandirian bukan berarti menjadi asosial. Namun, mengerahkan segenap potensi diri untuk melepaskan hambatan struktural yang menjerat potensi, baik potensi ekonomi maupun sosial-budaya.

Prinsip kemandirian adalah membuka ruang bagi seluruh warga Kota Pasuruan untuk dapat mengakses, dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses warga terutama warga miskin untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini merupakan upaya pemberdayaan, untuk mengubah ketidakberdayaan masyarakat, hingga mampu untuk berdikari.

3. Kota Pasuruan lebih berdaya saing :

Keterbukaan hubungan antar negara, yang lajunya dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi, menjadikan persaingan adalah sebuah keniscayaan. Daya saing menjadi hal yang strategis dan relevan dalam pelaksanaan pembangunan hingga 5 tahun ke depan. Daya saing menjadi salah satu poin dalam 7 misi dan nawacita pembangunan nasional 2015–2019. Daya saing juga menjadi poin penting dalam uraian visi pembangunan Provinsi Jawa Timur 2014–2019.

Daya saing adalah kondisi keunggulan, baik secara komparatif (comparative advantage) maupun kompetitif (competitive advantage), dalam sebuah perbandingan. Era regionalisasi ekonomi, misal pemberlakuan pasar tunggal dengan label masyarakat ekonomi ASEAN, menjadikan daya saing merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh pelaku usaha di Kota Pasuruan, baik pada aspek permodalan, sumberdaya, produksi hingga pemasaran.

Dalam konteks budaya, daya saing budaya lokal menjadi relevan dalam kondisi interaksi budaya antarbangsa yang bebas. Kebudayaan daerah yang merupakan ragam kebudayaan bangsa harus terus dipelihara, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi budaya asing, termasuk sosio-kultural ASEAN.

Kearifan lokal sebagai identitas budaya, yang dapat mewujudkan berupa pengetahuan setempat (indigenous or local knowledge), atau kecerdasan lokal (local genius). Kearifan lokal sebagai unsur budaya (local wisdom) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai modal pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan.

4. Perdagangan, Jasa dan Industri :

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, sektor perdagangan, jasa dan industri telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian Kota Pasuruan. Kondisi ini mencerminkan karakteristik perekonomian wilayah perkotaan, yang mana sektor sekunder dan tersier menunjukkan dominasinya dibandingkan dengan sektor primer. Dominasi ini cukup wajar mengingat, antara lain, luas wilayah perkotaan yang relatif kecil, ditambah lagi dengan laju alih fungsi lahan pertanian yang cukup cepat.

Tanpa mengesampingkan sektor-sektor ekonomi lainnya, ke depan, perekonomian Kota Pasuruan masih bertumpu pada tiga sektor utama ini. Sinergitas antarsektor ekonomi, diharapkan semakin memberikan peluang kepada pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan peran pelaku usaha kelompok mikro, kecil dan menengah atau UMKM.

Dalam dinamika ekonomi Kota Pasuruan, UMKM memiliki peran yang cukup besar, khususnya di sektor ekonomi utama. Sektor industri

pengolahan kayu didominasi oleh kelompok industri kerajinan rumah tangga, dengan skala mikro hingga kecil. Begitu pun dengan sektor industri cor logam, hingga industri olahan makanan dan minuman. Kinerja sektor perdagangan di Kota Pasuruan tidak bisa dilepaskan dari kiprah pedagang-pedagang dengan skala usaha mikro-kecil, baik di pasar tradisional maupun yang tersebar sebagai toko pracangan di rumah-rumah.

b.2. Misi Kota Pasuruan

Perwujudan Visi Pembangunan Kota Pasuruan yang telah ditetapkan diatas, dilaksanakan melalui Misi pembangunan Kota Pasuruan 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau.

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui **sisi** peningkatan **layanan kualitas pendidikan**, yang mengarah pada pendidikan yang berkeadilan bagi semua warga. Peningkatan layanan kualitas pendidikan dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: 1) pembebasan biaya pendidikan pada berbagai jenjang, 2) pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin; 3) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama laboratorium dan perpustakaan; serta 4) peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan.

2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Perwujudan visi Kota Pasuruan dari **sisi kesehatan** ditempuh melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yang mengarah pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: 1) pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan puskesmas pembantu; 2) penambahan jam layanan kesehatan puskesmas, yang ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai; 3) peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan kesehatan, khususnya di puskesmas dan jaringannya; 4) peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan bagi keluarga miskin; 5) meningkatkan kualitas

kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan sinergitas Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB) di setiap keluarahan; serta 6) peningkatan kinerja manajemen dan layanan RSUD dr. Soedarsono.

3. Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif.

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui **sisi** peningkatan **ketenagakerjaan dan iklim usaha**, yang mengarah pada peningkatan kesempatan kerja.

Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: 1) pemerataan kesempatan memperoleh pelatihan ketenagakerjaan bagi pengangguran, 2) mengembangkan jejaring kerja untuk pemagangan dan penempatan kerja; 3) mengembangkan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru; serta 4) meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi, sehingga tercipta kesempatan kerja baru.

4. Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak.

Perwujudan visi Kota Pasuruan dari **sisi ekonomi** ditempuh melalui **penguatan peran sektor perdagangan, jasa dan industri** untuk mendukung pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), secara mandiri dan berdaya saing. Peran ini utamanya diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, terutama yang bergerak di sektor-sektor ekonomi utama.

Penguatan peran sektor perdagangan, jasa dan industri dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: 1) percepatan pemecahan masalah pasokan bahan baku kayu yang dihadapi oleh IKM mebel, 2) peningkatan upaya fasilitasi standarisasi produk IKM, terutama produk mebel dan logam, 3) peningkatan kelayakan sarana dan prasarana pasar tradisional; serta 4) penguatan peran koperasi sebagai lembaga ekonom kerakyatan.

5. Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh melalui **sisi** peningkatan **ketersediaan infrastruktur dan**

penataan ruang, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan.

peningkatan ketersediaan infrastruktur dan penataan ruang, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut: 1) pemantapan jaringan jalan dalam kondisi baik, 2) percepatan penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara, 3) peningkatan cakupan layanan sanitasi, persampahan dan permakaman, 4) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, antara lain melalui: pembangunan ekowisata mangrove, dan taman pendidikan; 5) peningkatan proporsi dan kualitas ruang terbuka hijau; serta 6) peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik.

Misi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan dari **sisi birokrasi dan pelayanan publik**, yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang bersih (*good governance*).

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

7. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial.

Misi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi keamanan dan ketertiban lingkungan, yang mengarah pada terbangunnya kohesi sosial.

Kohesi sosial adalah kondisi kehidupan bermasyarakat yang "*rukun agawe guyub*" dengan modal sosial (*social capital*), antara lain terejawantah sebagai nilai-nilai kearifan lokal, yang menjadi perekatnya. Misi ini mendukung perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan dari **sisi kohesi sosial**, mengingat tanpa kerukunan (harmoni sosial) dan keguyuban (kesalehan sosial), mustahil pembangunan dapat terlaksana.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah Yang Disertai Pagu Indikatif Kota Pasuruan Tahun 2016-2019

Rekening	Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran / Program)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Trgt	Rp juta	Trgt	Rp juta	Trgt	Rp juta	Trgt	Rp juta		Trgt	Rp juta
	Misi 1 : Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau														
	Tujuan : Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	Indeks pendidikan	85,0	Indeks	85,2		85,4		85,7		85,9		85,9		-
	Sasaran 1 : Meningkatnya keterjangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas	APK jenjang pendidikan PAUD	80,1	%	81,1		82,2		82,8		83,4		83,4		-
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	90,0	3.004,0	90,0	940,2					-		Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	90,0	187,7	90,0	201,9					-		Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proposisi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	90,0	76,7	90,0	25,3										Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	82,5	100,0	82,5										Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peningkatan anak usia dini yang bersekolah	100,0	%	100,0	669,0	100,0	1.230,4										Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Kelulusan PAUD	100,0	%	100,0		100,0											Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah peserta didik PAUD	7.048,0	Anak														Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	-	%														Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B dan C	353,0	Warga belajar														Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kursus	240,0	Orang														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah siswa/siswi yang memiliki sertifikat baca Al Quran dengan nilai minimal 70	-	Siswa/i														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah peserta didik PAUD	7.048,0	Anak														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	-	%														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Jumlah masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B dan C	353,0	Warga belajar							540,0					-	-	
	jumlah masyarakat yang mengikuti kursus	240,0	Orang							240,0					-	-	
	Jumlah siswa/siswi yang memiliki sertifikat baca Al Quran dengan nilai minimal 70	-	Siswafi							400,0					-	-	
Sasaran 2 : Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,1	Tahun	9,3					9,9	10,6		11,3		11,3		-	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	110,0	%	100,0					100,0	100,0		100,0		100,0		-	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	77,9	%	79,7					81,6	83,4		85,4		85,4		-	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK + Paket C	71,1	%	73,0					74,1	75,2		76,3		76,3		-	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI + Paket A	122,2	%	100,0					100,0	100,0		100,0		100,0		-	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs + Paket B	99,1	%	99,3					99,4	99,5		99,6		99,6		-	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK + Paket C	99,0	%	99,1					99,2	99,3		99,4		99,4		-	
	Angka kelulusan SD/MI	97,1	%	97,2					97,2	97,3		97,3		97,3		-	
	Angka kelulusan SMP/MTs	99,0	%	99,1					99,1	99,2		99,2		99,2		-	
	Angka kelulusan SMA/MA	99,1	%	99,1					99,2	99,2		99,3		99,3		-	

			79,3	%	79,4		79,5		79,6		79,7		79,7	-	
	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SD/MI														
	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SMP/MTs		86,4	%	86,5		86,6		86,7		86,7		86,7	-	
	Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SMA/MA		94,4	%	94,4		94,5		94,6		94,6		94,6	-	
	Jumlah penambahan sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi SD/MI	NA		Unit	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	-	
	SMP/MTs	NA		Unit	2,0		1,0		1,0		1,0		1,0	-	
	SMA/SMK/MA	NA		Unit	4,0		1,0		1,0		1,0		1,0	-	
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		100,0	%	100,0	4.710,8	100,0	10.171,4						-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase peningkatan akses pendidikan Dasar yang berkualitas SD/MI		100,0	%	100,0		100,0							-	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		110,0	%							100,0	9.089,6	100,0	9.089,6	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		77,9	%							85,4		85,4	-	
	Angka kelulusan SD/MI		97,1	%							97,3		97,3	-	
	Angka kelulusan SMP/MTs		99,0	%							99,2		99,2	-	
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar		57,0	Anak					60,0	8.732,5			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka putus sekolah		0,1	%					0,7	-			-	-	

1.01.1.01.01.23	Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan	Jumlah siswa yang mengikuti pondok romadhon	750,0	siswa	750,0	152,5	900,0	1.952,8						-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.24	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase siswa penerima BOS	100,0	%		-	-	-	100,0	20.254,1	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.32	Program Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Dasar	Angka kelulusan SD/MI	97,1	%		-	-	-	97,3	5.438,0	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka kelulusan SMP/MTs	99,0	%		-	-	-	99,2		-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.32	Program Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Angka Partispasi Mumi (APM) SD	101,0	%		-	100,0	615,4			-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka kelulusan SD/MI	97,1	%							97,3	5.660,5	97,3	5.660,5	5.660,5	
		Angka kelulusan SMP/MTs	99,0	%							99,2		99,2			
1.01.1.01.01.34	Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	Angka Partispasi Mumi (APM) SD	101,0	%	100,0	805,3	-	-						-	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	Angka Partispasi Mumi (APM) SD	101,0	%		-	100,0	806,0						-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.35	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partispasi Mumi (APM) SD	101,0	%	100,0	345,4	1,0	351,7						-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.36	Program Pendidikan Menengah	Angka Partispasi Mumi (APM) SMP & SMA	77,9	% SMP	77,9	3.196,6			-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			71,9	% SMA	71,9				-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.36	Program Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Angka Partispasi Mumi (APM) SMP & SMA	77,9	% SMP			78,0	2.493,9	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			71,9	% SMA			71,9		-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.1.01.01.43	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Mumi (APM) SD	110,0	%		100,0	625,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase siswa penerima BOS	100,0	%														21.082,5	
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Kualifikasi Guru SD/MI menurut Ijazah ≥ D4/S1	86,7	%		86,9	87,2	87,4	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6	-	
		Persentase Kualifikasi Guru SMP/MTs menurut Ijazah ≥ D4/S1	93,1	%		94,2	95,3	96,5	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	-	
		Persentase Kualifikasi Guru SMA/MA menurut Ijazah ≥ D4/S1	94,1	%		96,8	97,4	98,1	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	-	
		Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI bersertifikat pendidik	55,4	%		55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	-	
		Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs bersertifikat pendidik	50,2	%		50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	-	
		Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA/MA/SMK bersertifikat pendidik	45,6	%		45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	-	
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang berkualitas (sertifikasi S-1, meraih prestasi regional dan nasional)	80,0	%		80,0	80,0	1.571,3										-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Jumlah guru bersertifikat pendidik	2.259,0	Guru							5.651,6	1.092,0	5.882,7	1.092,0	5.882,7	
		Jumlah guru yang berprestasi	24,0	Guru						9,0		9,0				
1.01.1.01.01.30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran SD	12,0	Bulan	12,0	427,7				-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekolah Dasar	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran SD	12,0	Bulan			12,0	421,9		-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.31	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah	12,0	Bulan	12,0	1.662,0				-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.31	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah	12,0	Bulan						-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.33	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru SD yang telah memiliki kualifikasi D4/S1	84,4	%	86,7	85,1				-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.33	Program Peningkatan Mutu Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru SD yang telah memiliki kualifikasi D4/S1	84,4	%						-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.37	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah	Jumlah guru SMP dan SMA yang telah memiliki kualifikasi D4/S1	93,1	% SMP	93,1	272,4				-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.37	Program Peningkatan Mutu Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah	Jumlah guru SMP dan SMA yang telah memiliki kualifikasi D4/S1	94,1	% SMA	94,1					-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			93,1	% SMP						-	-	-	-	-	-	
			94,1	% SMA						-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	

		Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas dan rumah bersalin per satu penduduk	25,7	per 100.000 penduduk	26,3		27,0		27,6		28,3	-	-	
		Rasio dokter umum per satu penduduk	26,2	per 100.000 penduduk	27,1		28,0		28,9		29,9	-	-	
		Indeks kepuasan layanan masyarakat untuk layanan puskesmas	79,5	Indeks	79,7		80,0		80,3		80,6	-	-	
1.02.1.02.01.09	Program Peningkatan Pengelolaan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial	Meningkatnya pengelolaan penyaluran hibah dan bantuan Sosial	80,0	%	80,0	10,0	80,0	12,0			-	-	-	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan pengelolaan penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial	1,0	Kegiatan					1,0	6,4	-	-	-	
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	80,0	%	80,0	4.181,7			-		-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15	Program Penyediaan dan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman	Meningkatnya Penyediaan dan Pengawasan Obat, makanan dan minuman	80,0	%			80,0	6.749,6	-		-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Pengawasan Obat dan Makanan	80,0	%	80,0	97,5	80,0	99,0	-		-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Terapainya Pengembangan Obat Asli Indonesia	80,0	%	80,0	20,0	80,0	22,0	-		-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	70,0	%	70,0	952,6	70,0	942,8	-		-	-	-	Dinas Kesehatan

	Persentase penyakit menular potensial yang dapat dicegah dan dikendalikan	100,0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	1.905,3	100,0	1.905,3	100,0	1.905,3
	Persentase penyakit tidak menular yang dapat dicegah dan dikendalikan	100,0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	-	-
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penyakit menular potensial yang dapat dicegah dan dikendalikan	100,0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	1.750,3	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase penyakit tidak menular yang dapat dicegah dan dikendalikan	100,0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	75,0	%	75,0	207,5	868,5	75,0	80,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	80,0	%	80,0	1.575,7	1.576,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan	80,0	%	80,0	77,5	79,5	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.34	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Meningkatnya Pembinaan Lingkungan Sosial	80,0	%	569,0		1.207,0	80,0	80,0							-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik		%												80,0	2.805,9	90,0	2.920,7	90,0	2.920,7
1.02.1.02.01.36	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		%	80,0	3.026,9	3.340,0	80,0	80,0							-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase peningkatan kualitas mahasiswa		%												90,0	3.553,9	90,0	3.699,2	90,0	3.699,2

	Sasaran 1 : Menurunnya tingkat pengangguran	Indeks Gini	Indeks										
			0,3	%	0,3	93,9	0,3	93,9	0,3	94,0	0,3	94,0	
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	-	-	90,0	307,4	95,0	262,9	95,0	249,9	Dinas Tenaga Kerja
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	-	-	80,0	45,0	90,0	217,6	90,0	317,5	Dinas Tenaga Kerja
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	-	-	80,0	23,8	90,0	15.414,0	90,0	16,2	Dinas Tenaga Kerja
2.01.2.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	-	-	90,0	75,0	95,0	26,6	95,0	68,2	Dinas Tenaga Kerja
2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pertumbuhan dan penambahan wirausaha baru	-	WUB	-	-	55,0	231,0	-	746,3	-	2.682,8	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja
		Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100,0	%	193,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketrampilan	-	%	-	-	-	-	95,0	-	95,0	-	-
		Persentase pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan	-	%	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-

2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	100,0	%	100,0	486,8	20,0	870,8	-	-	91,0	1.576,6	91,0	-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja
		Persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan informasi tentang lapangan kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja	-	%	-	-	-	-	-	-	91,0	1.576,6	91,0	1.576,6	-	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja
2.01.2.01.01.16	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	Persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan informasi tentang lapangan kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja	-	%	-	-	-	-	89,0	648,9	-	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
2.01.2.01.01.18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Meningkatnya pembinaan lingkungan sosial	-	%	85,0	596,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinsosnaker trans
2.01.2.01.01.19	Program Peningkatan Pendidikan dan Ketampilan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pendidikan dan Ketampilan Tenaga Kerja	100,0	%	100,0	138,9	100,0	718,0	-	-	-	-	-	-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja
3.08.2.01.01.17	Program Transmigrasi regional	Meningkatnya Transmigrasi regional	10,0	KK	10,0	355,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja
		Jumlah transmigran yang ditempatkan	-	KK	-	-	-	377,6	5,0	114,0	5,0	405,0	5,0	405,0	405,0	
	Sasaran 2 : Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial	11,0	Kasus	10,0	-	10,0	-	9,0	-	8,0	-	8,0	-	-	
2.01.2.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	80,0	%	80,0	362,4	80,0	462,9	-	-	-	-	-	-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja

		Persentase kelompok PMKS yang menjalankan aktifitas sosialnya (anjali, WRSE, korban trafficking, anak terlantar, anak yatim, dhuafa, ABH, lanjut usia potensial		%	-	-	-	-	45,6	-	2,1	-	2,1	-	-
				%											
	Sasaran 5 : Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan	Prosentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	51,1	51,2	51,3				51,4		51,5		51,5	-	
		Indeks pembangunan gender	96,3	96,4	96,5				96,6		96,7		96,7	-	
		Indeks pemberdayaan gender	53,5	54,2	54,8				55,5		56,2		56,2	-	
		Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga	13,5	12,8	12,1				11,4		10,8		10,8	-	
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	90,0	90,0	424,3			90,0	316,9	90,0	251,0	90,0	251,0	BPPKB / DP3AKB
2.02.2.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	90,0	90,0	135,3			90,0	487,1	90,0	232,2	90,0	232,2	BPPKB / DP3AKB
2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	90,0	90,0	6,1			90,0	32,0	90,0	22,0	90,0	22,0	BPPKB / DP3AKB

2.02.2.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%		100,0		75,0	100,0		44,6	100,0	49,5	100,0	49,5	BPPKB / DP3AKB
2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah jenis data dan informasi perempuan yang tersedia	5,0	Jenis data	5,0		7,5									BPPKB / DP3AKB
2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan korban KDRT dan kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking) yang tertangani	100,0	%	80,0		264,4	100,0	254,7							BPPKB / DP3AKB
		Jumlah prestasi lomba yang diikuti	2,0	Prestasi	2,0			2,0								
2.02.2.02.01.17	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	51,1	%	-		-	-	51,4	749,4						DP3AKB
		Persentase partisipasi perempuan di dunia usaha	-	%	-		-	-	14,5							
		Persentase pengaduan korban kekerasan pada perempuan yang tertangani	100,0	%	-		-	-	100,0							
2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase perempuan yg bekerja	54,0	%	54,0		124,9		72,4				667,3			BPPKB / DP3AKB
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	51,1	%	51,2			51,3				51,5		51,5		
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	3,0	%	2,9											

2.13.2.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	90,0	475,0	90,0	408,9	90,0	425,7	90,0	425,7	Dinas Pemuda, Olah raga dan kebudayaan / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.13.2.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	90,0	14,4	90,0	16,2	90,0	16,9	90,0	16,9	Dinas Pemuda, Olah raga dan kebudayaan / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.13.2.13.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	21,0	100,0	21,9	100,0	21,9	Dinas Pemuda, Olah raga dan kebudayaan / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.13.2.13.01.15	Program Peningkatan Pengelolaan Penyaluran Hibah dan Bantuan	Meningkatnya Pengelolaan Penyaluran Hibah dan Bantuan	100,0	%	100,0	16,5						-	Dinas Pemuda, Olah raga dan kebudayaan
2.13.2.13.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	100,0	%	100,0	219,0	100,0			100,0	100,0	-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga
		Persentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam kompetisi pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	-	%				13,0	690,8	13,5	719,9	719,9	

2.122.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	100,0	490,0	90,0	476,3	90,0	253,0	90,0	330,5	90,0	330,5	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
2.122.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak		%	80,0	260,0	90,0	252,0	90,0	380,0	90,0	605,0	90,0	605,0	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
2.122.12.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan		%	80,0	11,0	90,0	15,0	90,0	17,0	90,0	20,0	90,0	20,0	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
2.122.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		%	80,0	10,0	90,0	36,2	90,0	18,0	90,0	52,0	90,0	52,0	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP

2.122.12.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	90,0	75,0	90,0	75,0	90,0	33,0	90,0	52,0	90,0	52,0	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
1.16.1.16.01.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi	100,0	%	1,0	342,5								-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
1.16.1.16.01.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya citra daerah sebagai kota tujuan investasi	3,0	%	3,0	163,5	3,0	927,0						-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
2.122.12.01.16		Jumlah potensi daerah yang di promosikan		daerah	-	-	-	-	9,0	318,2	9,0	900,0	9,0	900,0	DPMPTSP
		Jumlah realisasi investasi (Rp milyar)		Milyar	-	-	-	-			403,2	-	-	-	DPMPTSP
1.16.1.16.01.01.17	Program penyediaan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Meningkatnya Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	1,0	%	1,0	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP

1.16.1.16.01.01 ,19	Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perijinan	Meningkatnya Pengembangan Informasi Pelayanan Perijinan	1,0	%	1,0	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
1.16.1.16.01.01 .20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	1,0	%	1,0	762,6	1,0	930,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
2.12.2.12.01.25		Rata-rata -rata hari penyelesaian perijinan	5,0	Hari	-	-	-	-	-	-	5,0	790,0	5,0	790,0	-	790,0	-	-	DPMPTSP
		Persentase izin yang diselesaikan sesuai SOP	80,0	%	-	-	-	-	-	-	80,0	-	80,0	-	-	-	-	-	DPMPTSP
2.12.2.12.01.18	Program pengembangan data potensi investasi dan perijinan	Meningkatnya Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	100,0	%	-	-	100,0	439,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP
2.12.2.12.01.23		Persentase peningkatan data yang dikelola		%	-	-	-	-	-	-	6,0	360,0	6,0	360,0	-	360,0	-	-	DPMPTSP
2.12.2.12.01.24	Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perijinan dan pengaduan	Meningkatnya pengembangan informasi pelayanan perijinan	100,0	%	-	-	100,0	452,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP
2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah potensi daerah yang di promosikan		Potensi daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	318,2	-	-	-	-	-	DPMPTSP
		Jumlah realisasi investasi (Rp milyar)		Milyar	-	-	-	-	-	-	-	403,2	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP

2.12.2.12.01.23	Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Persentase peningkatan data yang dikelola	-	%	-	-	-	-	-	64,2	243,5	-	-	-	-	-	DPMPTSP
		Jumlah pengguna data dan informasi perijinan dan penanaman modal	-	Orang	-	-	-	-	-	482,0	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP
2.12.2.12.01.24	Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	-	%	-	-	-	-	-	100,0	121,8	-	-	-	-	-	DPMPTSP
2.12.2.12.01.25	Program Pelayanan Perijinan	Rata-rata lama hari penyelesaian perijinan	-	Hari	-	-	-	-	-	5,0	199,8	-	-	-	-	-	DPMPTSP
		Prosentase ijin yang diselesaikan	-	%	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP
	Misi 4 : Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak																
	Tujuan : Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi	5,9	%	6,0					6,1		6,2					
	Sasaran 1 : Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian	Persentase pertumbuhan UMKM	5,1	%	5,2					5,2		5,3					
		Persentase koperasi aktif	56,3	%	56,3					56,4		56,5					

2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	-	-	90,0	369,9	90,0	370,0	90,0	305,0	90,0	305,0	DINKOP dan UM
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak		%	-	-	90,0	111,5	90,0	197,2	90,0	325,0	90,0	325,0	DINKOP dan UM
2.11.2.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		%	-	-	90,0	23,8	90,0	24,0	90,0	15,0	90,0	15,0	DINKOP dan UM
2.11.2.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawain dan barang secara tepat waktu		%	-	-	90,0	75,0	90,0	37,3	90,0	51,0	90,0	51,0	DINKOP dan UM
2.11.2.11.01.20	Program Pengembangan Pemberdayaan UMKM	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro		%	-	-	1,2	1.676,7	-	-	-	-	-	-	Dinkop dan UM
		Prosentase peningkatan omset usaha mikro ke usaha kecil		%	-	-	-	-	-	-	3,8	3.811,6	3,8	3.811,6	
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang tepat fungsi		%	-	-	30,9	532,5	-	-	-	-	-	-	Dinkop dan UM
2.11.2.11.01.18	Program Pemberdayaan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi aktif		%	-	-	27,5	407,6	-	-	4,1	1.594,7	4,1	1.594,7	Dinkop dan UM
2.07.2.11.01.15	Program Peningkatan pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase pemberdayaan ekonomi masyarakat		%	-	-	80,0	390,0	-	-	-	-	-	-	Dinkop dan UM
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	Prosentase pertumbuhan koperasi aktif		%	-	-	-	-	4.31	510,5	-	-	-	-	Dinkop dan UM
2.11.2.11.01.20	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru		%	-	-	-	-	14,2	958,1	-	-	-	-	Dinkop dan UM

	Meningkatnya kinerja perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	5,5	%	-	5,7		5,8	-	6,0	-	6,0	-	
		Percentase pertumbuhan pedagang pasar tradisional	10,2	pedagan g	-	11,7		13,5	-	15,5	-	15,5	-	
		Penambahan lokasi PKL yang disediakan dan ditata	8,0	lokasi	-	1,0		1,0	-	1,0	-	1,0	-	
		Paritas daya beli (purchasing power parity)	664,3	Rp ribu	-	672,3		676,3		680,4		680,4	-	
3.06.3.06.1.01	Pelayanan administrasi perkantoran	Percentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	90,0	500,0	90,0	98,0	1.050,0	100,0	1.150,0	100,0	1.150,0	Disperindag
3.06.3.06.1.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Percentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak		%	80,0	300,0	85,0	98,0	450,0	100,0	600,0	100,0	600,0	Disperindag
3.06.3.06.1.03	Peningkatan disiplin aparatur	Percentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan		%	80,0	85,0	85,0	90,0	95,0	97,0	85,0	97,0	85,0	Disperindag
3.06.3.06.1.05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Percentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		%	70,0	10,0	70,0	85,0	40,0	90,0	50,0	90,0	50,0	Disperindag
3.06.3.06.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Percentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	90,0	75,0	90,0	98,0	35,0	100,0	70,0	100,0	70,0	Disperindag
1.15.1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	80,0	%	80,0	600,0	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag

3.06.3.06.01.18	Program Peningkatan Layanan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset usaha perdagangan dan jasa		%	-	-	0,11	650,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag
		Persentase PKL yang tertata		%	-	-	-	-	-	-	10,0	200.000,0	10,0	200.000,0	-	-	-	-	Disperindag
		Persentase pasar yang berstandar SNI		%	-	-	-	-	-	-	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-	Disperindag
3.06.3.06.01.23	Program Pengembangan Perdagangan	Prosentase pertumbuhan IKM subsektor perdagangan besar dan eceran	-	%	-	-	-	-	0,4	4.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag
		Prosentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	-	%	-	-	-	-	85,0	5.300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag
3.06.3.06.01.24	Program Pengelblan Pasar dan Penataan Pedagangan Kaki Lima	Persentase PKL yang tertata	-	%	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pertumbuhan alat ukur, takar dan timbangan yang ditera ulang	7,7	%	-	-	7,9	-	8,0	-	-	8,1	8,1	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya upaya perlindungan konsumen	Pertumbuhan jenis barang dalam keadaan bungkus yang diawasi	26,0	Jenis	-	-	27,0	-	28,0	-	-	29,0	29,0	-	-	-	-	-	
		Persentase laporan keluhan konsumen yang ditindaklanjuti oleh BPSK	33,3	%	-	-	38,3	-	41,1	-	-	44,1	44,1	-	-	-	-	-	
		Jumlah keluhan masyarakat di Bidang Perindustrian dan Perdagangan	35,0	kasus	80,0	274,0	43,0	630,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag/ Disperindag
3.06.3.06.01.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Prosentase penurunan keluhan konsumen		%	-	-	-	-	58,3	1.520,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag
		Prosentase UTTP yang ditera		%	-	-	-	-	75,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag
		Prosentase jumlah barang beredar yang		%	-	-	-	-	78,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag

		Percentase pertumbuhan IKM yang difasilitasi	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	85,0	15,0	85,0	Disperindag
3.02.2.13.01.15	Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung	7,8	wisatawan	-	-	-	8,3	-	-	-	-	8,5	8,7	-	8,7	-	
		Jumlah destinasi wisata baru yang dikembangkan	9,0	unit	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	-	1,0	-	
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100,0	%	100,0	820,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disporabud/Disparpora
		Jumlah wisatawan yg berkunjung ke Kota Pasuruan		orang	-	-	-	300.000,0	1.400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparpora
3.02.2.13.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah promosi pemasaran pariwisata		promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	1.400,0	-	-	-	
		Jumlah kerjasama dengan media		kerjasama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,0	9,0	6.000,0	
	Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Meningkatkan Pengembangan sektor Pariwisata	100,0	%	100,0	207,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disporabud/Disparpora
		Jumlah destinasi pariwisata di Kota Pasuruan		Destinasi/event	-	-	-	14,0	800,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparpora
	Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Jumlah destinasi dan even wisata		Destinasi	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	1.560,0	4.500,0	17,0	4.500,0	
		Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB	0,8	%				0,8					0,8			0,9		
		Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB	0,0	%				0,0					0,0			0,0		

3.03.3.03.01.01	Program administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%			100,0	600,0	100,0	770,0	100,0	500,0	100,0	700,0	100,0	700,0	DPKKP
3.03.3.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	%	80,0	450,0	85,0	300,0	85,0	500,0	90,0	1.600,0	90,0	1.600,0	90,0	1.600,0	DPKKP
2.01.2.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	%	75,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
3.03.3.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	%	70,0	20,0	75,0	35,0	80,0	100,9	85,0	45,0	85,0	45,0	85,0	45,0	DPKKP
3.03.3.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	%	90,0	75,0	90,0	28,0	90,0	135,0	90,0	135,0	90,0	135,0	90,0	135,0	DPKKP
3.03.3.03.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	%	80,0	103,2	-	310,0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP/DPKP
3.03.3.03.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	%	80,0	180,6	80,0	332,4	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP/DPKP
3.03.3.03.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi padi meningkat	ton/tahun	15.607,0	383,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
		Produktivitas pertanian (Padi)	ton/ha	-	-	15.607,0	619,0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
		Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (ton/hektar)	ton/ha	-	-	-	-	-	-	7,1	1.895,6	7,1	1.895,6	7,1	1.895,6	DPKP
		Jumlah kasus kejadian hama dan penyakit tanaman pangan dan	kasus	-	-	-	-	-	-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	DPKP

3.03.3.03.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	holistikultura	80,0	%	80,0	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
3.03.03.01.26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian		30,0	orang	-	-	30,0	56.502,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
			40,0	%	40,0	5.121,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
				%	-	-	40,0	1.281,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
2.01.2.01.01.28	Program Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman		80,0	%	80,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
3.03.3.03.01.27	Peningkatan produksi benih padi bermutu		45,5	ton/ tahun	-	-	45,5	208,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
2.02.2.01.01.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan		80,0	%	80,0	62,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
3.04.3.03.01.23	Program Pengembangan Rehabilitasi hutan dan lahan dengan Tanaman Kehutanan/MPTS/ Perkebunan		80,0	%	-	-	80,0	238,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
2.02.2.01.01.21	Program Pengembangan SDM Kehutanan		100,0	%	100,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
Tokadadi APBD 2017	Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan /Perkebunan		80,0	%	-	-	80,0	97,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.02.2.01.01.22	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya Hutan	Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya Hutan	80,0	%	80,0	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
2.02.2.01.01.24	Program Peningkatan Sumber Daya hutan Mangrove	Meningkatnya Sumber Daya hutan Mangrove	80,0	%	80,0	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
TtkadadiAPBD 2017	Pengembangan Sarana Prasarana Pelestarian dan Pengamanan Kehutanan/Perkebunan Dan Lahan	Meningkatnya Sarana Prasarana Pelestarian dan Pengamanan Kehutanan/Perkebunan Dan Lahan	80,0	%	-	-	80,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TtkadadiAPBD 2017	Pengembangan Usaha Industri Hasil Hutan Kayu / Hasil Hutan Bukan Kayu dan Perkebunan	Meningkatnya Usaha Industri Hasil Hutan Kayu / Hasil Hutan Bukan Kayu dan Perkebunan	80,0	%	-	-	80,0	149,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TtkadadiAPBD 2016	Pengamanan Dan Pelestarian Serta Konservasi Kehutanan/ Perkebunan Dan Lahan	Meningkatnya Pengamanan Dan Pelestarian Serta Konservasi Kehutanan/ Perkebunan Dan Lahan	80,0	%	80,0	78,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (ton/ hektar)	-	(ton/ hektar)	-	-	-	-	6,5	1.023,5	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
3.03.3.03.01.28	Program Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kasus kejadian serangan hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	-		-	-	-	-	20,0	119,0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
3.03.3.03.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Perlambahan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB jumlah ternak sehat, produk pangan/non pangan yang ASUH	0,1	%	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	DPKKP

		tawar																		
2.05.2.01.01.26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	80,0	%																DPKKP
Tdkadadi/APBD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan pada Balai Benih Ikan (BBI)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	80,0	%																
3.01.3.01.01.01	Pelayanan administrasi perkatoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%																Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%																Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%																Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	100,0	%																Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.15	Pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan																		
3.01.3.01.01.20	Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	Terlibit administrasi dan Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Laut		%																Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.18	Pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya pengembangan budidaya perikanan		%																Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.21	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Meningkatnya Peningkatan Produksi		%																Dinas Perikanan

	pasuruan																			
	jumlah wilayah/penduduk rawan pangan	0,75	%	25,0	-	25,0	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Ketahanan Pangan/DPKP
	skor pola pangan harapan (konsumsi)		angka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
	pph ketersediaan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
	Tingkat ketersediaan pangan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
2.03.3.03.01.19	program pangan	-		80,0	210,0	81,0	747,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Ketahanan Pangan/DPKP
2.03.3.03.01.20	program bimbingan dan intensifikasi	-	%	75,0	230,0	75,0	449,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Ketahanan Pangan/DPKP
2.03.3.03.01.21	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	82,1	%	-	-	-	-	-	81,9	1.061,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
	Pesentase keamanan pangan	90,1	%	-	-	-	-	-	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tingkat ketersediaan pangan	83,3	%	-	-	-	-	-	82,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Misi 5 : Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan																			DPU-PR
	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang																			
	Indeks kualitas lingkungan hidup		Indeks	56,9		59,2														

1.03.1.03.1.34	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase luasan pemanfaatan ruang yang ditingkatkan	30,0	%	-	-	-	-	-	-	625,0	30,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap rencana Tata Ruang	82,0	%	-	-	-	-	-	-	145,0	82,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.37	Program Pembangunan Median, Trotoar dan Drainase Jalan	Persentase Kondisi Bangunan Median, Trobar dan Drainase Jalan yang Tertangun	70,0	%	-	-	-	-	-	-	1.952,7	70,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.38	Program Peningkatan Median, Trotoar dan Drainase Jalan	Persentase tingkat kondisi bangunan Median, Trotoar dan Drainase Jalan baik dan sedang	40,0	%	-	-	-	-	-	-	5.088,5	40,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.39	Program Pengawasan Kualitas Mutu Bahan Bangunan & Konstruksi	Persentase Kualitas Mutu Bahan Bangunan & Konstruksi	90,0	%	-	-	-	-	-	-	218,0	90,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.40	Program Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Ketersediaan Informasi Layanan Jasa Konstruksi	65,0	%	-	-	-	-	-	-	110,0	65,0	-	-	70,0	132,0	70,0	132,0	DPU-PR
1.03.1.03.1.41	Program Peningkatan Tertib pembangunan Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	80,0	%	-	-	-	-	-	-	351,0	80,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.42	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Air Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan sedang	71,2	%	-	-	-	-	-	-	6.118,5	90,0	-	-	73,9	5.987,0	76,7	5.987,0	DPU-PR
1.03.1.03.1.43	Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase jaringan Air Irigasi yang terpelihara	90,0	%	-	-	-	-	-	-	1.525,0	90,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.44	Program Pembangunan Drainase Kota	Persentase Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 Cm, selama 2 Jam) lebih	90,0	%	-	-	-	-	-	-	2.069,5	90,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR

1.03.1.03.1.49	Program Peningkatan Tertib Pembangunan Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Negara	70,0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.178,1	82,7	16.178,1	DPU-PR
1.03.1.03.1.50	Program Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan bangunan pelengkap	Persentase Ketersediaan Jalan dan Bangunan Pelengkap	40,9	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.50	Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	Persentase Ketersediaan Jalan dan Bangunan Pelengkap	40,9	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.408,6	45,1	65.408,6	DPU-PR
1.04.1.03.1.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	90,0	%	90,0	2.620,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.04.1.03.1.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	90,0	%	90,0	3.937,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.04.1.03.1.20	Program pengelolaan areal pemukiman	persentase pertumbuhan kapasitas makam	90,0	%	90,0	785,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.04.1.03.1.22	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Tingkat Pelayanan air minum	90,0	%	90,0	6.303,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.05.1.03.1.18	Program Penataan Tata Ruang	Persentase Tingkat Pelayanan air Limbah	90,0	%	90,0	1.304,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.08.1.03.1.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	60,0	%	60,0	9.590,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.08.1.03.1.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	21,0	%	21,0	5.243,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.08.1.03.1.27	Program Peningkatan sarana prasarana Penerangan Jalan	Persentase PJU dalam kondisi baik	78,0	%	78,0	3.619,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR

1.09.1.03.1.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	10,0	%	10,0	-	39.046,7	-	32.715,9	12,6	21.956,5	29,8	31.676,0	-	-	DPU-PR
2.04.1.03.1.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	10,0	%	-	-	-	11,3	32.715,9	12,6	21.956,5	29,8	31.676,0	29,8	31.676,0	DPU-PR
1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,0	%	-	-	-	100,0	798,2	90,0	385,4	100,0	374,7	100,0	374,7	DPR-KP
1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	-	-	-	80,0	256,3	90,0	840,8	100,0	855,3	100,0	855,3	DPR-KP
1.04.1.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	90,0	%	-	-	-	-	-	90,0	39,2	100,0	72,1	100,0	72,1	DPR-KP
1.04.1.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDN	85,0	%	-	-	-	85,0	35,0	90,0	25,0	67,5	20,4	67,5	20,4	DPR-KP
1.04.1.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	100,0	%	-	-	-	100,0	75,0	90,0	26,1	100,0	53,5	100,0	53,5	DPR-KP
1.04.1.03.01.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan perumahan	90,0	%	-	-	2.447,0	90,0	1.261,2	-	-	-	-	-	-	DPR-KP

1.04.1.03.01.01 .16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase prasarana,sarana dan utilitas (PSU) perumahan yang layak	16,6	%	16,6	2.583,3												DPR-KP
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	2,0	%	2,0													DPR-KP
1.04.1.03.01.01 .20	Program pengelolaan areal pemukiman	Persentase areal pemukiman yang memadai	80,0	%		739,8	80,0	1.105,9										DPR-KP
1.04.1.03.01.01 .22	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dan terlayani sistem air limbah yang memadai	85,0	%		5.789,4												DPR-KP
1.04.1.03.01.01 .22	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase Penduduk (rumah) yang mendapatkan akses air minum yang aman	85,0	%	-	-	85,0	2.201,2										DPR-KP
1.04.1.04.01.23	Program Pengembangan Penanganan Kawasan Kumuh perkotaan	Persentase Berturangnya Luasan pemukiman Kumuh di kawasan perkotaan	19,67%	%	-	-	70,0	340,5										DPR-KP
1.04.1.04.01.24	Program Pengembangan Rumah Susun	Persentase kualitas rumah susun sesuai regulasi	100,0	%	-	-	100,0	2.749,9										DPR-KP
1.04.1.04.01.25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Persentase Penduduk (rumah) yang terlayani sistem air Limbah yang memadai	87,4	%	-	-	87,4	2.889,4										DPR-KP
1.04.1.04.01.26	Program Pembangunan dan peningkatan sarpras Lingkungan Permukiman	Persentase Luas Lingkungan Permukiman yang sarprasnya memadai	80,0	%	-	-	80,0	7.656,0										DPR-KP
1.04.1.04.01.27	Program Pemeliharaan sarpras Lingkungan Permukiman	Persentase tingkat kondisi sarpras Lingkungan Permukiman yang	0,8	%	-	-	80,0	3.203,2										DPR-KP

1.07.1.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	100,0	366,0	100,0	100,0	348,0	100,0	100,0	875,1	100,0	625,0	100,0	625,0	Dishub
1.07.1.07.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	80,0	%	100,0	94,0	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	82,0	100,0	90,8	100,0	90,8	Dishub
1.07.1.07.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	100,0	23,3	100,0	100,0	40,0	100,0	62,3	30,0	67,5	33,2	67,5	33,2	Dishub
1.07.1.07.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun	80,0	%	100,0	68,2	100,0	100,0	75,0	100,0	100,0	28,1	100,0	31,1	100,0	31,1	Dishub
1.07.1.07.01.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	80,0	%	80,0	20,5	80,0	80,0	23,0	80,0	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.07.1.07.01.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	80,0	%	80,0	826,2	80,0	80,0	1.719,5	80,0	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.07.1.07.01.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan	80,0	%	80,0	256,7	80,0	80,0	137,5	80,0	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.07.1.07.01.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	80,0	%	80,0	267,2	80,0	80,0	57,5	80,0	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.07.1.07.01.01.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase kelayakan perlengkapan jalan	80,0	%	80,0	1.408,0	80,0	80,0	7.010,3	80,0	90,0	26.263,4	90,0	29.081,7	90,0	29.081,7	Dishub
1.07.1.07.01.01.21	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Meningkatnya Pelayanan Perparkiran	80,0	%	80,0	1.153,1	80,0	80,0	1.326,0	80,0	-	-	-	-	-	-	Dishub

2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	47,0	%					48,0	274,1	49,0	399,4	57,09	700,0	700,0	DLHKP
		Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat	62,0	%					65,0		67,0		70,0	-	-	
2.04.2.05.01.16	Program Penataan Pengusahaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Penataan Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	80,0	%					80,0	3.429,4			-	-	-	DLHKP
1.08.1.08.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase indikator yang terealisasi u/ penyusunan SLHD yang akuntabel	80,0	%			80,0	154,8					-	-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat dan stake holder terkait	62,0	%					80,0	130,0			-	-	-	DLHKP
1.08.1.08.01.01.20	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase peningkatan pengendalian polusi	80,0	%			80,0	32,8					-	-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.20	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase peningkatan pengendalian polusi	80,0	%					80,0	63,7			-	-	-	DLHKP
1.08.1.03.01.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	22,0	%			22,0	1.227,3					-	-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	45,0	%					23,0	898,6			24,5	33,6	33,6	DLHKP
2.05.2.05.01.24	Program Peningkatan ruang terbuka hijau (RTH)	Indeks kualitas tutupan lahan	12,0	Indeks							49,0	20,7	-	-	-	DLHKP

1.08.1.08.01.01.30	Program Kemah Peduli Lingkungan	Prosentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	45,0	%	12,3	152,5											-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.25	Program Peningkatan Partisipasi Penataan Lingkungan	Indeks kualitas tutupan lahan	12,0	indeks			48,5	1.514,6	49,0	1.440,6							-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.25	Program Pengembangan Peduli Lingkungan	Prosentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	82,0	%							14,8	2.077,0	14,8	2.077,0			2.077,0		DLHKP
2.05.2.05.01.26	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan	Indeks kualitas air permukaan		indeks			84,0	32,0			86	974,5	86	974,5			974,5		DLHKP
		Indeks kualitas udara		indeks			84,0				86,0		86,0				-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.28	Program Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Persentase pengelolaan laboratorium lingkungan	80,0	%			80,0	400,5									-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.32	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luasan terbuka hijau	22,0	%			23,0	29.187,2									-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.33	Program Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luasan terbuka hijau	22,0	%			23,0	2.881,7									-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.34	Program pembinaan lingkungan sosial	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	22,0	%			23,0		24,0	639,3		300,0		300,0			300,0		DLHKP
		Indeks kualitas air permukaan	82,0	indeks			84,0	32,0			86	974,5	86	974,5			974,5		DLHKP
		Indeks kualitas udara	82,0	indeks			84,0				86,0		86,0				-	-	
																	-	-	
	Misi 6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik																-	-	

	Tujuan : Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	NA	Indeks	NA		4,0			4,5		5,0		5,0	-	
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kota Pasuruan	Indeks reformasi birokrasi	NA	Indeks	NA		4,0			4,5		5,0		5,0	-	
		Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WDP	Range	WDP		WDP			WDP		WTP		WTP	-	
		Nilai akuntabilitas kinerja	CC	Range	CC		B			B		B		B	-	
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	90,0	%	90,0	659,2	90,0		685,4	90,0	237,9	90,0	291,2	90,0	291,2	Inspektorat
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	90,0	%	90,0	1.129,6	90,0		249,2	90,0	571,1	90,0	716,1	90,0	716,1	Inspektorat
4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	90,0	%	90,0	90,8	90,0		122,0	90,0	266,5	90,0	177,5	90,0	177,5	Inspektorat
4.02.4.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	140,2	100,0		142,0	100,0	148,3	100,0	75,3	100,0	75,3	Inspektorat
4.02.4.02.01.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Perurunan angka temuan		%		705,9			675,0	61,0			491,6		491,6	Inspektorat

4.04.4.04.02.02	Program peningkatan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak		%	85,0	410,0	85,0	550,0	85,0	1.109,4	85,0	1.109,4	DISPENDA/BAPENDA
4.04.4.04.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan		%	-	-	-	12,0	85,0	12,5	85,0	12,5	BAPENDA
4.04.4.04.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		%	80,0	20,0	80,0	17,0	80,0	36,9	80,0	36,9	DISPENDA/BAPENDA
4.04.4.04.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	80,0	75,0	80,0	6,0	80,0	105,0	80,0	105,0	DISPENDA/BAPENDA
1.20.1.20.06.17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100,0	%	100,0	2.897,0	-	-	-	-	-	-	Dispenda
4.04.4.04.02.23	Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	10,0	%	-	-	10,0	1322,67	4,0	2618,94	4,0	2618,94	BAPENDA
4.04.4.04.02.24	Peningkatan Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	75,0	%	-	-	75,0	-	-	-	-	-	BAPENDA
		Persentase Penanganan Pengaduan Keberatan	75,0	%	-	-	75,0	-	-	-	-	-	
		Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah	-	%	-	-	-	-	-	1307,5	80,0	1307,5	BAPENDA
		Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	-	%	-	-	-	-	-	-	83,3	-	
4.04.4.04.02.24	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks kepuasan pelayanan Bapenda	-	Indeks	-	-	-	208,82	65,0	-	-	-	BAPENDA
4.04.4.04.02.25	Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase Penerimaan PBB	77,0	%	-	-	77,0	-	-	-	-	-	BAPENDA

4.04.4.04.02.26	Peningkatan Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase SKPD yg tepat waktu pencatatan penerimaan pendapatan daerah	70,0	%	-	-	-	70,0	918,99	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
4.04.4.04.02.27	Penagihan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio kepatuhan pembayaran pajak daerah	-	%	-	-	-	-	-	119,93	-	-	-	-	-	BAPENDA
4.01.4.01.03.68	Program Peningkatan capaian Reformasi Birokrasi	Nilai akuntabilitas kinerja	CC	Range	B	B	B	50,0	106,0	50,0	100,0	-	B	-	-	Bag Organisasi
4.01.4.01.03.51	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian program-program pendukung reformasi birokrasi	NA	%	-	-	-	50,0	106,0	50,0	100,0	-	-	-	-	Bag Organisasi
4.01.4.01.03.81	Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan	Persentase OPD yang mendapat nilai SAKIP B	10,0	%	-	-	-	60,0	128,0	100,0	300,0	600,0	100,0	600,0	600,0	Bag Organisasi
		Meningkatnya Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan		%	80,0	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Organisasi
1.20.1.20.03.83	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase SKPD/UPP yang sudah melaksanakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, skm, pengelolaan pengaduan dan sistem informasi pelayanan publik		%	-	-	-	80,0	215,0	80,0	400,0	1.270,0	80,0	1.270,0	1.270,0	Bag Organisasi
4.01.4.01.03.70	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Akuntabilitas Kinerja		%	70,0	420,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Organisasi
4.01.4.01.03.82	Program Penataan dan Pengembangan Jabatan	Persentase OPD yang organisasinya tepat fungsi dan ukuran		%	-	-	-	80,0	46,0	80,0	25,0	-	-	-	-	Bag Organisasi
		Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Jabatan		%	80,0	145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Organisasi

		Persentase jabatan sesuai dengan analisa dan evaluasi jabatan OPD		%	-	-	85,0	321,0	85,0	200,0	800,0	85,0	800,0	Bagian Adm. Organisasi
4.01.4.01.03.46	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	meningkatkan kinerja pembangunan bidang Kesra		%	80,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
		Persentase keberhasilan pembinaan Kesra		%	-	-	75,0	65,0	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dilindaki juti Perangkat Daerah		%					75,0		1.800,0	75,0	1.800,0	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang kemasyarakatan yang dilindaki juti Perangkat Daerah							75,0			75,0	-	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
4.01.4.01.03.46	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dilindaki juti Perangkat Daerah		%	-	-	-	-	80,0	1.600,0	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang kemasyarakatan yang dilindaki juti Perangkat Daerah		%	-	-	-	-	80,0		-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
4.01.4.01.03.80	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Keagamaan	Persentase keberhasilan pembinaan keagamaan		%	80,0	943,0	80,0	2.095,0	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

4.01.4.01.03.84	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kemasyarakatan	meningkatkan kinerja pembangunan bidang kemasyarakatan		%	80,0	105,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
4.01.4.01.03.45	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan	Persentase keberhasilan pembinaan kemasyarakatan		%	-	-	75,0	103,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
4.01.4.01.03.45	Peningkatan administrasi pembangunan daerah	Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Pembangunan		%	0,8	803,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
		Tingkat Produktifitas penyusunan peraturan daerah dan sejenisnya		%	-	-	20,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pembangunan yg dilindaklanjuti		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
		Perangkat daerah		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
		persentase realisasi perangkat daerah yang mencapai 80%		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
4.01.4.01.03.45	Peningkatan Kinerja Bidang Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pembangunan yg ditindaklanjuti		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
		Perangkat daerah		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
		persentase realisasi perangkat daerah yang mencapai 80%		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
4.01.4.01.03.45	Pembinaan tata kelola administrasi pembangunan daerah	Tingkat efektivitas koordinasi, sosialisasi dan pembinaan tata kelola pelaksanaan administrasi pembangunan daerah		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan

4.01.4.01.03.40	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah persentase penyaluran modal usaha bagi usaha mikro kecil		%	80,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
1.20.1.20.03.49	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan bidang Ekonomi	Meningkatnya Kinerja Pembangunan bidang Ekonomi		%	80,0	190,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
1.20.1.20.03.48	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam		%	80,0	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
4.01.4.01.03.19	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Prosentase SKPD yang menindak lanjuti hasil kegiatan bidang ekonomi dan SDA		%	-	-	85,0	443,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
4.01.4.01.03.23	Program Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan SDA yang ditindaklanjuti perangkat daerah		%	-	-	-	-	85,0	298,3	85,0	1.170,0	85,0	1.170,0	85,0	1.170,0	1.170,0	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
4.01.4.01.03.23	Program Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perumusan/Analisa Kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		Dok	-	-	4,0	174,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
4.01.4.01.03.41	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang disampaikan kepada masy dan atau pemangku kepentingan		pasal	-	-	4,0	300,0	4,0	490,0	4,0	375,0	4,0	375,0	4,0	375,0	375,0	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA

4.01.4.01.03.63	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	pengendalian peredaran barang kena cukai (tokok) ilegal		%	80,0	227,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
		Prosentase temuan barang kena cukai ilegal		%	-	-	20,0	50,0	20,0	50,0								Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
		Prosentase temuan hasil industri tembakau kena cukai ilegal										10,0	60,0	10,0	60,0			
1.20.1.20.03.62	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan SDA	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan SDA		%	80,0	107,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
1.20.1.20.03.10.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Tingkat efektivitas koordinasi, sosialisasi dan pembinaan tata kelola pelaksanaan administrasi pembangunan daerah		%	20,0	600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kerjasama
4.01.4.01.03.64	Program Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah	terwujudnya kerjasama daerah yang fungsional dan akuntabel		%	-	-	20,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm Pemerintahan
4.01.4.01.03.44	Program Pemeliharaan kantrimtibmas dan pencegahan tindakan kriminal	Terkendalnya kantrimtibmas dan tindak kriminal		%	100,0	621,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
		Meningkatnya Pemeliharaan kantrimtibmas dan pencegahan tindakan kriminal		%	-	-	100,0	198,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
1.20.1.20.03.52	Program Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Bidang Pengawasan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Bidang Pengawasan dan Otonomi Daerah	Peningkatan Kinerja pemerintah daerah	%	100,0	203,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum

4.01.4.01.03.17	Program Peningkatan dalam bidang pengawasan dan OTODA	Meningkatnya Peningkatan dalam bidang pengawasan dan OTODA		%	-	-	80,0	295,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.01.4.01.03.18	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan		%	-	-	80,0	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.01.4.01.03.87	Program Peningkatan Kinerja Bidang Pemerintahan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti perangkat daerah		%	-	-	-	-	80,0	705,0	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.01.4.01.03.87	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti		%	-	-	-	-	-	-	-	100,0	1.165,0	100,0	1.165,0	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.10.4.01.03.54	Program Fasilitas Penunjang Kedinasan KDH / WAKIL KDH	Meningkatnya Fasilitas Penunjang Kedinasan KDH / WAKIL KDH		%	80,0	268,0	80,0	353,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	80,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
1.20.1.20.03.53	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Bidang Trantib, Penganggulangan Bencana dan Linmas	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Bidang Trantib, Penganggulangan Bencana dan Linmas		%	100,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
2.04.4.01.03.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		%	100,0	245,0	100,0	755,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
1.20.1.20.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pimpinan eksekutif dan legislatif		%	100,0	108,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum

2.07.4.01.03.15	Program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		%	100,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
2.07.4.01.03.17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	terwujudnya partisipasi masy dalam pembangunan kelurahan		%	-	-	100,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.01.4.01.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Tercapainya kerjasama yang saling menguntungkan		%	-	-	100,0	309,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.04.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	-	%	100,0	751,8	100,0	652,9	100,0	564,7	100,0	572,5	100,0	572,5	100,0	572,5	572,5	BPKA
4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	-	%	100,0	561,2	100,0	477,0	100,0	596,7	100,0	599,9	100,0	599,9	100,0	599,9	599,9	BPKA
4.04.4.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	-	%	100,0	25,7	100,0	37,8	100,0	22,6	100,0	22,6	100,0	22,6	100,0	22,6	22,6	BPKA
4.04.4.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	-	%	100,0	82,5	100,0	75,0	100,0	43,8	100,0	63,7	100,0	63,7	100,0	63,7	63,7	BPKA
1.20.1.20.01.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Persentase aset tanah yang memiliki nilai	-	%	-	-	-	-	100,0	53,9	-	-	-	-	-	-	-	BPKA
1.20.1.20.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah	-	%	100,0	4.353,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKA

4.04.4.04.01.20	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	-	-	100,0	1.646,8	100,0	1.427,5	100,0	1.310,6	100,0	1.310,6	BPKA
4.04.4.04.01.21	Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	-	-	100,0	1.623,6	100,0	726,3	100,0	524,4	100,0	524,4	BPKA
4.04.4.04.01.22	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	-	-	100,0	1.576,4	100,0	1.246,8	100,0	987,7	100,0	987,7	BPKA
		Persentase aset tanah yang diajukan permohonan persertifikatan	-	-	-	-	4,6	-	9,2	-	9,2	-	
		Persentase aset tanah dan atau bangunan yang dimanfaatkan	-	-	-	-	88,1	-	92,7	-	92,7	-	
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	90,0	312,2	90,0	518,0	90,0	278,8	90,0	376,6	90,0	376,6	BKD
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	90,0	536,7	90,0	298,7	90,0	498,6	90,0	502,7	90,0	502,7	BKD
4.05.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	90,0	1.926,2	90,0	34,8	90,0	32,8	90,0	33,0	90,0	33,0	BKD

4.05.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	100,0	75,0	100,0	75,0	BKD
4.05.4.05.01.15	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	100,0	%	-	-	100,0	100,0	3.587,8	100,0	3.587,8	BKD
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat dengan predikat memuaskan		%			81,0	81,0	3.587,8	81,0	3.587,8	
		Persentase terupdatenya data aparatur		%			85,5	85,5	-		-	
		Persentase nilai SKP diatas 78		%			81,0	81,0	-		-	
4.05.4.05.01.16	Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	Survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian		%				81,0		81,0	-	BKD
4.05.4.05.01.17	Program Pelayanan Data Kepegawaian dan Pengadaan SDM Aparatur	Meningkatnya pelayanan data kepegawaian	100,0	%	-	-			783,8	-	-	BKD
4.05.4.05.01.18	Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat dengan predikat memuaskan	80,0	%	-	-			1.132,5	-	-	BKD
		Persentase terupdatenya data aparatur	-	%	-	-			-	-	-	
		Persentase nilai SKP diatas 78	-	%	-	-			-	-	-	
		Survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian	-	%	-	-			-	-	-	
		Persentase pejabat yang ditempatkan sesuai kompetensi		%			81,0	81,0	2.435,0	81,0	2.435,0	

4.03.4.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	90,0	%	90,0	14,7	90,0	32,2	90,0	18,1	90,0	17,0	90,0	17,0	Bappeda/ Bappelitbangd a
4.03.4.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	27,5	100,0	59,0	100,0	59,0	Bappeda/ Bappelitbangd a
1.06.1.06.01.16	Program Penataan Tata Ruang	Meningkatnya penataan tata ruang	85,0	%	85,0	465,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
1.06.1.06.01.18	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya kerjasama pembangunan	85,0	%	85,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
4.03.4.03.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	%	-	-	85,0	687,0	-	-	-	-	-	-	Bappelitbangd a
4.03.4.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	85,0	%	85,0	898,8	85,0	917,0	-	-	-	-	-	-	Bappeda/ Bappelitbangd a
4.03.4.03.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi	85,0	%	85,0	237,5	85,0	401,2	-	-	-	-	-	-	Bappeda/ Bappelitbangd a
		Persentase kegiatan PD bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	-	%	-	-	-	-	86,7	109,6	-	-	-	-	
		Persentase ketercapaian kinerja outcome PD bidang ekonomi	-	%	-	-	-	-	63,7	-	-	-	-	-	
		Persentase ketercapaian kinerja daerah bidang ekonomi	-	%	-	-	-	-	61,3	-	-	-	-	-	

4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	%	80,0	3.056,0	80,0	1.609,0	80,0	1.679,0	100,0	1.858,0	100,0	1.858,0	SETDA; Bagian Umum & SKPD
4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas kerohanian PNS		80,0	13,0	80,0	46,0	80,0				-	SETDA	
		Persentase disiplin pegawai Setda		-	-	-						-		
		Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	%						62,3	17.021,0	67,5	17.717,0	67,5	SETDA
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	%	90,0	50,0	80,0	49,0	80,0	20,0	100,0	22,0	100,0	22,0	SETDA; Bagian Umum
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan	SKM Layanan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan	%	-	-	-	-	80,0	913,0	85,0	951,0	85,0	951,0	SETDA
4.01.4.01.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	terumuskannya program pembentukan peraturan daerah	%	90,0	750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
		persentase rancangan kebijakan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan	%	-	-	85,0	705,0	85,0	364,0	85,0	85,0	500,0	85,0	500,0
4.01.4.01.03.50	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya bahan referensi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas	%	90,0	231,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
		persentase rancangan kebijakan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan	%	-	-	85,0	282,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum

		SKM pelayanan data produk hukum daerah		%	-	-	-	-	-	100,0	177,0	180,0	100,0	180,0	Bagian Hukum
4.01.4.01.03.55	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	persentase peningkatan pemahaman mengenai produk hukum		%	-	-	-	85,0	200,0	-	-	500,0	85,0	500,0	Bagian Hukum
4.01.4.01.03.55	Program Peningkatan Pemahaman Hukum, Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	Persentase peningkatan pemahaman mengenai produk hukum			-	-	-	-	-	85,0	605,0	-	-	-	Bagian Hukum
4.01.4.01.03.57	Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM	Persentase sengkata hukum yang ditindaklanjuti		%	-	-	-	85,0	237,0	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
4.01.4.01.03.60	Peningkatan tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah daerah	IKM pelayanan pengadaan barang dan jasa		%	-	-	-	90,0	365,0	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan/ BLP
		Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa		%	-	-	-	100,0		100,0	343,0	675,0	100,0	675,0	
		Persentase pejabat pengadaan barang dan jasa yang berkompeten		%	-	-	-	100,0		100,0		-	100,0	-	
		Tingkat efektifitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)			-	-	-					-	-	-	
1.20.1.20.03.08	Program Fasilitasi Penunjang Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	80,0	%	80,0	433,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum

1.20.1.20.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		%	85,0	953,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1.20.1.20.03.28	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa		%	85,0	874,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1.20.1.20.03.65	Program Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI	Meningkatnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI		%	85,0	93,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1.20.1.20.03.40	Program Kerjasama informasi dengan media masa	Meningkatnya Kerjasama informasi dengan media masa		%	85,0	926,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1.20.1.20.03.64	Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi		%	85,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Keprotokolan KDH/WKDH/Sekda	Meningkatnya pelayanan keprotokolan KDH / WKDH / Sekda		%	-	-	80,0	843,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Nilai survey kepuasan pelayanan kedinasan		angka												85,0	1.282,0	85,0	1.282,0
4.01.4.01.03.65	Program Peningkatan Dokumentasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Informasi dan dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah		%	-	-	80,0	345,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan	Nilai survey kepuasan pelayanan kedinasan		%	-	-	-	-	85,0	1.100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2.10.2.10.01.22	Program Peningkatan Kualitas Pemberitaan Daerah	Meningkatnya Informasi dan kerjasama dengan media massa		%	-	-	85,0	1.383,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1.20.1.20.03.06.58	Program Fasilitas Data dan Informasi	Meningkatnya Fasilitas Data dan Informasi		%	71,0	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
1.20.1.20.03.06.59	Program Pembangunan Fasilitas E-Government	Meningkatnya Pembangunan Fasilitas E-Government		%	71,0	1.297,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
2.10.2.10.01.25	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang E-Government	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Penunjang E-Government		%	-	-	80,0	2.323,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
2.10.2.10.01.26	Program Kebijakan pengembangan E-Government	Meningkatnya pengembangan E-Government		%	-	-	80,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
1.20.1.20.03.06.65	Program Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI		%	-	-	80,0	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
2.10.2.10.01.24	Program Pengembangan Data dan Aplikasi e-government	Meningkatnya Pengembangan Data dan Aplikasi e-government		data	-	-	390,0	161,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
4.04.4.04.07.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	75,0	250,0	100,0	655,0	100,0	83,0	1.187,0	83,0	1.187,0	83,0	1.187,0	83,0	1.187,0	1.187,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.04.4.04.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak			100,0	280,0	80,0	185,0	100,0	100,0	229,0	100,0	535,0	100,0	535,0	100,0	535,0	535,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.04.4.04.07.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM			100,0	10,0	75,0	35,0	100,0	100,0	26,0	100,0	33,0	100,0	33,0	100,0	33,0	33,0	Kecamatan Bugul Kidul

4.04.4.04.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan yang tersusun		%	100,0	75,0	80,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
		Persentase dokumen kepegawaian dan barang yang tersusun			-	-	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu			-	-	-	-	100,0	54,0	83,0	69,0	83,0	69,0	69,0	69,0	69,0	
4.01.4.01.07.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100,0	%	100,0	50,0	80,0	119,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.27	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	-	-	100,0	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
2.07.4.01.7.33	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100,0	%	-	-	-	-	70,0	69,0	85,0	707,0	85,0	707,0	707,0	707,0	707,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.29	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Bugul Kidul	Termotivasinya penyelenggaraan otonomi daerah secara maksimal	100,0	%	100,0	960,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
		Jumlah buku kecamatan dalam angka		buku	-	-	25,0	982,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah kelurahan yang beroperasi dan terkoordinir		Kelurahan	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase kelurahan berkembang di Kec.		%	-	-	-	-	70,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-	

1.05.4.01.7.42	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Bugul Kidul	Prosentase Kejadian Bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	100,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	53,0	100,0	53,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.35	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tindak lanjut atas laporan tranlibmas di Kecamatan	100,0	%	95,0	132,8	80,0	132,8	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.97	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Bugul Kidul	Jumlah pengaduan publik bidang keamanan dan ketertiban yang diterima yang dilayani	12,0	pengaduan	-	-	-	-	12,0	68,5	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
1.05.4.01.7.46	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Bugul Kidul	Persentase pengaduan tranlib yang ditangani secara tepat waktu	100,0	%	-	-	-	-	-	-	83,0	338,0	83,0	338,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.36	Program Model Kelembagaan Sosial Kecamatan Bugul Kidul	persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	100,0	411,0	100,0	420,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
4.04.4.04.08.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	80,0	%	75,0	275,0	100,0	684,0	588,0	1.300,0	-	1.300,0	-	1.300,0	Kecamatan Purworejo
4.04.4.04.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak	80,0	%	100,0	980,0	80,0	169,0	210,0	577,0	-	577,0	-	577,0	Kecamatan Purworejo
4.04.4.04.08.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	100,0	11,0	75,0	37,0	29,0	40,0	-	40,0	-	40,0	Kecamatan Purworejo
4.04.4.04.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan yang tersusun			100,0	75,0	80,0	75,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo

		Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	-	100,0	767,0	100,0	767,0	
		Persentase layananadm umum yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	
		Prosentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	
4.01.4.01.08.33	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan	80,0	%	100,0	65,0	100,0	87,0	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
4.01.4.01.08.74	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Purworejo	Meningkatnya partisipasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan	80,0	%	-	-	-	-	-	V	569,0	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
		persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum SKPD	80,0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0	Kecamatan Purworejo
4.01.4.01.08.34	Program Penosogahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	persentase kejadian bencana alam yang ditanggulangi	100,0	%	100,0	33,0	100,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
1.05.4.01.08.75	Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Purworejo	persentase kejadian bencana alam yang ditanggulangi	100,0	%	-	-	-	-	-	100,0	25,0	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
1.05.4.01.08.43	Program Penosogahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Purworejo	persentase kejadian bencana alam yang ditangani sesuai waktu tanggap	100,0	%	-	-	-	-	-	-	-	100,0	102.63	100,0	102.63	Kecamatan Purworejo
4.01.4.01.08.35	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	persentase tindak lanjut atas laporan tranlibmas di	100,0	%	100,0	65,0	100,0	116,0	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo

	Lingkungan	kecamatan																	
4.01.4.01.08.76	Program Peningkatan Keamanan dan Keterlibatan Lingkungan Kecamatan Purworejo	Jumlah pengaduan publik bidang keamanan dan keterlibatan yang dilayani		pengaduan	-	-	-	-	-	V	486,0	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
1.05.4.01.08.47	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Purworejo	Persentase pengaduan tranlib yang ditangani secara tepat waktu	100,0	%	-	-	-	-	-	-	-	100,0	370,0	100,0	370,0	-	370,0	Kecamatan Purworejo	
4.01.4.01.08.37	Program Model Kelembagaan Sosial Kecamatan Purworejo	persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	100,0	465,0	100,0	264,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo	
4.01.4.01.05.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	90,0	490,0	100,0	614,0	100,0	100,0	524,0	100,0	1,2	100,0	1,2	-	1,2	Kecamatan Gadingrejo	
4.01.4.01.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi layak	80,0	%	90,0	422,0	85,0	178,0	85,0	85,0	360,0	85,0	728,0	85,0	728,0	-	728,0	Kecamatan Gadingrejo	
4.01.4.01.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas sdm	80,0	%	90,0	19,0	75,0	41,0	75,0	75,0	31,0	75,0	34,0	75,0	34,0	-	34,0	Kecamatan Gadingrejo	
4.01.4.01.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, lap capaian kinerja dan keuangan yg tersusun	80,0	%	90,0	75,0	89,0	75,0	89,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
		Persentase dokumen kepegawaian dan barang yang tersusun		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	-	-	-	-	-	90,0	45,0	90,0	76,0	90,0	76,0	-	76,0		

4.01.4.01.05.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100,0	%	90,0	116,0	100,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo
4.01.4.01.05.27	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	-	-	85,0	63,0	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo
2.07.4.01.5.34	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100,0	%	-	-	-	-	100,0	574,0	75,0	900,0	75,0	900,0	900,0	Kecamatan Gadingrejo
4.01.4.01.05.31	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Gadingrejo	Termotivasi nya penyelenggaraan otonomi daerah secara maksimal	100,0	%	90,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo
		Jumlah buku kecamatan dalam angka	25,0	buku	-	-	25,0	1.358,0	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo
		Jumlah kelurahan yang beroperasi dan terkoordinir	8,0	kelurahan	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase kelurahan berkembang di kecamatan gadingrejo	-	%	-	-	-	-	100,0	1.307,0	-	-	-	-	-	
		Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	679,0	100,0	679,0	679,0	
		Persentase layananadm umum yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	-	

		Prosentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	-		
4.01.4.01.05.33	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam RKPD	70,0	%	90,0	98,0	70,0	101,0	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
4.01.4.01.05.72	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Gadingrejo	Jumlah usulan musrenbang kecamatan		usulan	-	-	-	-	125,0	561,0	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
		persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum SKPD		%	-	-	-	-	-	-	71,0	388,0	Kecamatan Gadingrejo	388,0
4.01.4.01.05.34	Program Penosogahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase kejadian bencana alam yang dianggulangi	100,0	%	90,0	119,0	100,0	191,0	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
4.01.4.01.05.71	Program Penanggulan Bencana Alam Kecamatan Gadingrejo	Persentase kejadian bencana alam yang dianggulangi	100,0	%	-	-	-	-	100,0	144,0	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
1.05.4.01.5.44	Program Penosogahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Gadingrejo	Persentase kejadian bencana alam yang diangani sesuai waktu tanggap	100,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	103,0	Kecamatan Gadingrejo	103,0
4.01.4.01.05.35	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	persentase tindak lanjut atas laporan tranribmas di kecamatan	100,0	%	90,0	148,0	100,0	128,0	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
4.01.4.01.05.89	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Gadingrejo	Jumlah pengaduan publik bidang pelayanan keamanan dan ketertiban yg dilayani		pengaduan	-	-	-	-	20,0	270,0	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
1.05.4.01.5.45	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan kecamatan Gadingrejo	persentase pangaduan tranlib yang ditangani secara tepat waktu	100,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	385,0	Kecamatan Gadingrejo	385,0

4.01.4.01.05.38	Program pengembangan Model Kelentagaan Sosial Kecamatan Gadingrejo	Persentase kelentagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	90,0	441,0	70,0	515,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo
4.01.4.01.06.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	80,0	%	100,0	227,0	100,0	735,0	100,0	628,0	100,0	2.098,0	100,0	2.098,0	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak	100,0		100,0	824,0	85,0	230,0	85,0	946,0	85,0	2.641,0	85,0	2.641,0	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas Sdm	80,0	%	100,0	13,0	75,0	42,0	75,0	42,0	85,0	45,0	85,0	45,0	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan yang tersusun	80,0	%	100,0	75,0	89,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
		persentase dokumen kepegawaian dan barang yang tersusun	80,0	%	-	-	89,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04.4.01.06.16	Program penataan, penguasaan, pemilikan, pembinaan dan pemanfaatan tanah	Persentase tersusunya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	80,0	%	-	-	-	-	89,0	37,0	89,0	145,0	89,0	145,0	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
		Persentase penataan, penguasaan, pemilikan, pembinaan dan pemanfaatan tanah		%	100,0	5.303,0	80,0	12,8	80,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100,0	%	100,0	172,0	100,0	145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo

4.01.4.01.06.27	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	-	-	70,0	73,0	-	-	-	-	-	Kecamatan Pangungrejo
2.07.4.01.06.35	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Pangungrejo	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100,0	%	-	-	-	-	100,0	842,0	90,0	1,5	90,0	Kecamatan Pangungrejo
4.01.4.01.06.32	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Pangungrejo	Terwujudnya peningkatan informasi/data Kecamatan dalam bentuk angka	80,0	%	2.105,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pangungrejo
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Pangungrejo	Jumlah buku kecamatan dalam angka	25,0	buku	-	-	25,0	2.126,0	-	-	-	-	-	Kecamatan Pangungrejo
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Pangungrejo	kelurahan yang beroperasi dan terkoordinir	13,0	kelurahan	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pangungrejo
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Pangungrejo	Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	100,0	2.176,0	100,0	2.900,0	100,0	Kecamatan Pangungrejo
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Pangungrejo	Persentase layanan administrasi umum yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	Kecamatan Pangungrejo
4.01.4.01.06.33	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase layanan administrasi perijinan yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	Kecamatan Pangungrejo
		Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam RKPD	66,0	%	140,0	66,0	70,0	155,0	-	-	-	-	-	Kecamatan Pangungrejo

4.01.4.01.06.73	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Panggungrejo	Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum SKPD	80,0	%							71,3	850,0	72,9	939,0	72,9	939,0	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.34	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100,0	%	100,0	30,0	100,0	25,0			-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.92	Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Panggungrejo	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100,0	%	-	-	-	-			100,0	25,0	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
1.05.4.01.06.48	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Panggungrejo	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	100,0	%	-	-	-	-			-	-	100,0	29,0	100,0	29,0	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.35	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tindak lanjut atas laporan tranlibmas di kecamatan	100,0	%	100,0	213,0	100,0	202,0			-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.93	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Panggungrejo	Jumlah pengaduan publik bidang keamanan dan ketertiban yg dilayani	10,0	jumlah	-	-	-	-			100,0	335,0	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
1.05.4.01.06.49	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan kecamatan panggungrejo	Persentase pengaduan tranlib yang ditangani secara tepat waktu	100,0	%	-	-	-	-			-	-	100,0	598,0	100,0	598,0	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.39	Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kecamatan Panggungrejo	Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	100,0	630,0	70,0	804,0			-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo

2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	-	%	-	-	-	85,0	199,5	85,0	291,8	85,0	285,0	85,0	285,0	Diskominfo
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	-	%	-	-	-	85,0	117,5	85,0	410,1	85,0	568,0	85,0	568,0	Diskominfo
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	-	%	-	-	-	85,0	23,8	85,0	18,8	85,0	115,0	85,0	115,0	Diskominfo
2.10.2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	-	%	-	-	-	100,0	75,0	100,0	38,4	100,0	71,0	100,0	71,0	Diskominfo
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	85,0	%	85,0	484,3	85,0	322,5	-	-	-	-	-	-	-	Dishubkominfo / Diskominfo
		Persentase website OPD yang berisi informasi	-	%	-	-	-	-	-	12,0	4.936,5	17,0	6.260,0	17,0	6.260,0	
		Persentase peningkatan jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	-	%	-	-	-	-	-	40,0	-	60,0	-	60,0	-	
		Persentase KIM yang memiliki blog	-	%	-	-	-	-	-	32,4	-	47,1	-	47,1	-	
2.10.2.10.01.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	85,0	%	85,0	160,0	85,0	172,5	-	-	-	-	-	-	-	Dishubkominfo / Diskominfo

2.10.2.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa	85,0	%	85,0	180,0	85,0	180,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishubkominfo / Diskominfotik
2.10.2.10.01.21	Program Peningkatan Dokumentasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya dokumentasi pemerintah daerah	75,0	%	-	-	75,0	2.259,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfotik
2.10.2.10.01.22	Program Peningkatan Kualitas Pemberitaan Daerah	Meningkatnya kualitas pemberitaan daerah	75,0	%	-	-	75,0	1.383,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfotik
2.10.2.10.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi TI	75,0	%	-	-	75,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfotik
2.10.2.10.01.24	Program Pengembangan Data dan Aplikasi E-Government	Meningkatnya pengembangan data dan aplikasi e gov	75,0	%	-	-	75,0	160,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfotik
		Presentase aplikasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo	-	%	-	-	-	-	25,0	7.083,4	37,5	9.804,8	37,5	9.804,8	37,5	9.804,8	9.804,8	
		Presentase pengaduan masyarakat online yang ditindaklanjuti	-	%	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	
		Presentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	-	%	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	
		Indeks tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	Point	-	-	-	-	1,7	-	-	1,8	-	-	1,8	-	-	
2.10.2.10.01.25	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang E Government	Indeks layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	Point	-	-	-	-	2,9	-	-	3,2	-	-	3,2	-	-	
		Meningkatnya prasarana dan sarana penunjang e gov	75,0	%	-	-	75,0	2.322,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfotik
2.10.2.10.01.26	Program Kebijakan Pengembangan E Government	Meningkatnya kebijakan pengembangan e gov	75,0	%	-	-	75,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfotik

2.10.2.10.01.27	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI	Meningkatnya fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	75,0	75,0	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo
2.14.2.10.01.17	Program Pengembangan Data dan Statistik	Meningkatnya pengembangan data dan statistik Persentase ketersediaan data urusan sektoral Persentase data statistik yang diunggah di web site Pertumbuhan jumlah pengunjung website	80,0	700,3	80,0	-	-	-	-	758,6	75,0	789,7	75,0	789,7	-	-	-	-	Bappeda
																			Diskominfo
2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	365,8	90,0	349,7	90,0	349,7	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	-	-	-	-	-	-	-	2.083,0	90,0	1.156,3	90,0	1.156,3	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	-	-	-	-	-	-	-	13,4	90,0	17,0	90,0	17,0	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	14,4	100,0	50,9	100,0	50,9	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.17.2.17.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	%	80,0	5.766,5	100,0	1.209,3	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi / DPK
		Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	-	%	-	-	80,0	-	80,0	721,3	80,0	750,8	80,0	750,8	80,0	750,8	
		Persentase pertumbuhan koleksi bahan perpustakaan daerah	-	%	-	-	50,0	-	50,0	-	10,0	-	10,0	-	-	-	
		Jumlah pengunjung perpustakaan	-	Orang	-	-	4.000,0	-	4.000,0	-	4.500,0	-	4.500,0	-	4.500,0	-	
1.24.1.24.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	-	%	80,0	266,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.24.1.24.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	-	%	80,0	229,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.24.1.24.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	-	%	80,0	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.24.1.24.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, barang kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	-	%	100,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

2.18.2.17.01.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tetaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan jaringan info perpustakaan	-	%	100,0	50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi / DPK
		Jumlah unit kerja yang terbit arsip	-	Unit											19,0	406,6	406,6	19,0	
2.18.2.17.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	-	%	100,0	65,8	121,3	100,0	100,0						-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi / DPK
2.18.2.17.01.17	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	-	%	100,0	22,5	26,0	100,0	100,0						-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi / DPK
2.18.2.17.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Tetaksananya pengelolaan pelayanan sistem informasi	-	%	100,0	15,0	18,0	100,0	100,0						-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi / DPK
2.18.2.17.01.19	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip	Jumlah unit kerja yang terbit arsip	-	Unit	-	-		-	-	11,0	400,4								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	90,0	2.416,0	3.379,0	90,0	90,0	90,0	3.500,0	90,0	90,0	90,0	3.750,0	3.750,0	90,0	90,0	Set. DPRD
4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang	80,0	%	90,0	2.289,0	1.243,0	90,0	90,0	90,0	2.250,0	90,0	90,0	90,0	30.000,0	30.000,0	90,0	90,0	Set. DPRD

2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	90,0	%	90,0	235,6	90,0	90,0	351,5	90,0	668,7	90,0	696,0	90,0	696,0	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	-	%	-	-	-	-	-	-	-	90,0	11,4	90,0	11,4	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	75,0	%	90,0	9,7	90,0	90,0	106,2	90,0	17,2	90,0	17,9	90,0	17,9	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	100,0	122,5	100,0	105,3	100,0	99,2	100,0	99,2	Dispendukcapil
1.10.1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan	83,6	%	89,0	1.057,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.16	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan KK	-	%	-	-	-	100,0	1.609,3	100,0	1.897,7	100,0	1.785,0	100,0	1.785,0	Dispendukcapil
		Persentase penerbitan KTP Elektronik	-	%	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	
		Persentase penerbitan KIA	-	%	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	
1.10.1.10.01.17	Program Peningkatan Kemanfaatan Database Kependudukan	Persentase jenis data yang dimanfaatkan	-	%	-	-	-	100,0	106,2	100,0	100,9	-	-	-	-	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.19	Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi	Persentase penduduk yang memiliki data tunggal	90,0	%	100,0	506,8	100,0	100,0	456,2	100,0	309,8	100,0	394,5	100,0	394,5	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.20	Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran anak (usia 0 s.d 18 tahun)	90,6	%	-	417,5	-	100,0	987,8	100,0	740,7	100,0	871,0	100,0	871,0	Dispendukcapil
		Persentase penerbitan akta kematian	57,9	%	-	-	-	-	-	90,0	-	94,0	-	94,0	-	
		Persentase penerbitan akta	79,9	%	-	-	-	-	-	94,0	-	95,0	-	95,0	-	

	Program Kesiagaan dan Pencegahan Dini Bencana	Tenwujudnya Kesiagaan dan Cegah Dini dari Ancaman Bencana	100,0	%	-	-	-	-	-	100,0	651,7	100,0	716,8	100,0	716,8	BPBD
1.19.1.19.03.01.25	Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana	Tenwujudnya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana	100,0	%	56,8	100,0	100,0	22,0	100,0	100,0	22,2	75,0	224,6	75,0	224,6	BPBD
1.19.1.19.03.01.26	Program Pengurangan Resiko Akibat Bencana	Tenwujudnya Pengurangan Resiko Akibat Bencana	100,0	%	127,1	100,0	100,0	69,0				100,0	75,9	100,0	75,9	BPBD
	Program Kedaruratan Bencana	Tenwujudnya Pengurangan Resiko Akibat Bencana	100,0	%						100,0	1.179,9	100,0	1.319,8	100,0	1.319,8	BPBD
1.19.1.19.03.01.27	Program Penyediaan Logistik Penanganan Bencana	Tenwujudnya Penyediaan Logistik Bagi Korban Bencana	100,0	%	227,3	100,0	100,0	35,4			126,0	100,0	138,6	100,0	138,6	BPBD
1.19.1.19.03.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan	Tenwujudnya Pelayanan Penanggulangan Darurat Bencana	100,0	%	1.659,4	100,0	100,0	307,5			17,7	75,0	5.489,3	75,0	5.489,3	BPBD
	Misi 7 : Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kebudayaan yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial															
	Tujuan : Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks pembangunan manusia	75,1	Indeks	75,3	75,5	75,7					75,9		75,9		

1.05.1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	90,0	%	90,0	250,5	90,0	100,0	218,9	90,0	32,8	90,0	79,8	90,0	79,8	Satpol PP
1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	100,0	75,0	100,0	32,4	100,0	53,7	100,0	53,7	Satpol PP
1.05.1.05.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100,0	%	100,0	1.268,8	100,0	100,0	277,5	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
1.05.1.05.02.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan keamanan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100,0	%	100,0	171,0	100,0	100,0	50,0	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
1.05.1.05.02.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	100,0	%	100,0	453,6	100,0	100,0	157,0	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
1.05.1.05.02.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100,0	%	100,0	44,0	100,0	100,0	108,5	-	-	-	-	-	-	
1.05.1.05.02.32	Program Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah	Meningkatnya pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah	100,0	%	100,0	352,5	100,0	100,0	442,3	-	-	-	902,3	-	902,3	Satpol PP
1.05.1.05.02.37	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Jumlah RT yang memiliki siskamling aktif		RT	-	-	-	-	144,7	217,0	1.073,2	227,0	1.117,1	227,0	1.117,1	Satpol PP
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	100,0	%	-	-	-	-	-	61,5	-	77,4	-	77,4	-	
		Persentase tenaga satlinmas dalam siaga bencana	100,0	%	-	-	-	-	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	

1.05.1.05.02.40	Program Peningkatan Keteniban Umum dan Keleniraman Masyarakat	Persentase pelanggaran Perda yang diindaklanjuti	100,0	%	-	-	-	-	80,0	733,1	80,0	763,1	80,0	763,1	Satpol PP
		Persentase pengaduan yang diindaklanjuti	100,0	%	-	-	-	-	70,0	-	70,0	-	70,0	-	
		Persentase SDM aparatur yang terlatih	90,0	%	-	-	-	-	45,0	-	50,0	-	50,0	-	
	Sasaran 3 : Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang didukung dengan ketanggapan penanggulangan bencana	Time response pemadaman kebakaran	15,0	Menit	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		15,0		15,0		
	Program ...	Time response penanggulangan bencana	15,0	Menit	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		15,0		15,0		
															BPBD
	Program ...														
	Sasaran 4 : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM dalam kerangka wawasan kebangsaan	Jumlah kasus pelanggaran HAM	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20.03..55	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan/hukum		%	90,0	280,0									Bagian Hukum
1.20.1.20.03.57	Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM	terwujudnya kebijakan daerah yang memenuhi standard dan norma HAM		%	90,0	95,0									Bagian Hukum

1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	90,0	%	90,0	307,0	90,0	354,7	90,0	90,0	334,1	90,0	313,5	90,0	313,5	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	90,0	%	90,0	383,0	90,0	301,5	90,0	90,0	462,9	90,0	394,0	90,0	394,0	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	90,0	%	90,0	17,1	90,0	26,8	90,0	90,0	14,8	90,0	15,3	90,0	15,3	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	76,0	100,0	100,0	24,5	100,0	48,7	100,0	48,7	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	90,0	%	90,0	191,2	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase peserta pembinaan yang paham tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	90,0	%	90,0	-	90,0	101,0	90,0	-	-	-	-	-	-	
		Persentase peningkatan penanganan potensi konflik	-	%	-	-	-	-	-	5,0	1.278,2	5,0	1.231,3	5,0	1.231,3	
1.05.1.05.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	90,0	%	90,0	82,9	90,0	76,1	90,0	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase suara sah dalam pemilu	90,0	%	90,0	-	90,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-	
1.05.1.05.01.24	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Terwujudnya pengembangan stabilitas dan kewaspadaan	90,0	%	90,0	821,8	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol

1.05.1.05.01.34	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Meningkatnya pemberdayaan organisasi masyarakat dan lembaga masyarakat	90,0	%		90,0	128,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol
		Jumlah ormas/LSM sampai dengan sekarang	208,0	lembaga	208,0														
		Persentase Ormas/LSM yang ber SKT	-	%				17,5	165,0										
1.05.1.05.01.39	Program Peningkatan dan Penguatan Ketahanan Bangsa	Persentase peserta pembinaan yang paham tentang ketahanan bangsa	90,0	%	90,0	420,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase penurunan pengguna dan penyalahgunaan narkoba	-	%				90,0	174,8										
		Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	-	%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat yang ber SKT	-	%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.1.05.01.39	Program Penguatan Ketahanan Bangsa	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	-	%				-	85,0	983,6									
		Persentase organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat yang ber SKT	-	%				-	5,0										
	Sasaran 5 : Meningkatnya upaya pelestarian artefak dan nilai-nilai budaya serta	Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang	17,0	Unit	17,0			18,0	18,0								19,0		

2.16.1.01.01.19	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina	-	%									48,0	2.231,9	-	2.231,9	Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan / Dinas Pendidikan dan kebudayaan
2.16.1.01.01.19	Program Kemitraan Pengembangan Budaya	Meningkatnya pembinaan terhadap komunitas budaya sebagai media pelestarian nilai kearifan lokal	100,0	%	96,0	100,0	575,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan / Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		Persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina	-	%	-	-	-	47,0	967,8	48,0	2.231,9	48,0	2.231,9			2.231,9	
	TOTAL BELANJA				607.018		617.018		627.144		673.391		673.391			673.391	

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020 disusun dengan mempertimbangkan progress pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, serta poin-poin utama dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan tahun 2018 dan tahun berjalan 2019, telah memberikan sumbangsih bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Dalam proses pencapaian progress sasaran ini, terdapat isu-isu pembangunan yang relevan untuk diperhatikan dalam penetapan prioritas pembangunan tahun 2020, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Pemetaan Isu Pembangunan Menurut Sasaran Pembangunan Strategis

No	Sasaran	Isu Pembangunan
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	- Keberlangsungan pendidikan gratis untuk SMA/SMK pasca pengalihan kewenangan ke Provinsi - Pemenuhan kesejahteraan PTT dan GTT - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan - Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan prasarana sarana - Peningkatan pendidikan vokasional berbasis komunitas
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	- Peningkatan pelayanan puskesmas - Penurunan angka kematian ibu, perbaikan gizi balita dan penanggulangan stunting - Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular - Penyediaan sanitasi dan air bersih
3.	Meningkatnya kesempatan kerja	- Peningkatan angkatan kerja mencari kerja dari generasi milenial - Penyediaan pelatihan kerja yang mendukung era industri 4.0
4.	Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	- Peningkatan jejaring kerja dengan pengrajin mebel generasi milenial untuk membawa semangat perubahan paradigma pengrajin mebel. - Revitalisasi UPT logam sebagai katalisator kebangkitan industri logam pasuruan. - Peningkatan UMKM go digital dan perluasan akses pasar - Peningkatan pasar tradisional ber-SNI - Peningkatan peran ekonomi kreatif - Alih fungsi lahan pertanian

No	Sasaran	Isu Pembangunan
		- Peraturan penggunaan jaring ikan dan gejala over fishing - Pengembangan perikanan tawar - Penataan PKL - Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, stabilisasi harga pangan dan penganeekaragaman pangan
5.	Menurunnya kemiskinan	- Pemantapan data tunggal kemiskinan - Peningkatan efektivitas sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan
6.	Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur serta prasarana dan sarana wilayah	- Peningkatan kelayakan jalan - Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, air bersih dan permakaman - Peningkatan jalan, saluran air dan penerangan kawasan permukiman - Penuntasan jalan lingkar utara dan pengembangan kawasan pelabuhan
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Penyediaan ruang terbuka hijau - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan - Pengembangan TPS 3R - Peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan penanggulangan banjir
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	- Revitalisasi SDM kelurahan, khususnya terkait pengelolaan dana kelurahan - Pelembagaan APIP sebagai upaya pencegahan dini - Aktuasi akuntabilitas kinerja sebagai implementasi SAKIP-TPP - Integrasi aplikasi perencanaan dengan penganggaran - Peningkatan pelayanan publik, khususnya terkait kepastian waktu dan biaya.
9.	Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
10.	Meningkatnya kerukunan masyarakat	- Menguatnya sekat-sekat masyarakat yang terbangun dari SARA - Melemahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya terkait keamanan dan ketertiban - Penyalahgunaan narkoba - Maraknya ujaran kebencian yang berpotensi melemahkan simpul-simpul kebangsaan
11.	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	- Perlunya mempererat simpul-simpul jejaring kerja dengan pelaku seni dan budaya - Masih kurangnya event-event apresiasi seni dan budaya, khususnya di ruang-ruang publik.

No	Sasaran	Isu Pembangunan
		- Perintisan kampung budaya

Sementara itu, dari perspektif perencanaan politis, penentuan prioritas pembangunan tahun 2020 juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang terekam dari hasil reses anggota DPRD. Selanjutnya, reses anggota DPRD ini dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, sebagai berikut:

1. Percepatan penanggulangan banjir.
2. Percepatan penyediaan infrastruktur wilayah dan PSU permukiman yang layak.
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui kemudahan aksesibilitas, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan peningkatan prasarana sarana.
4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di rumah sakit.
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial, melalui kemudahan warga miskin dalam mengakses program penanggulangan kemiskinan.
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
7. Penguatan identitas masyarakat sebagai kota santri.
8. Pengembangan ekonomi melalui peningkatan peran sektor ekonomi potensial, penataan pasar dan toko modern.

Penyajian pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil reses DPRD, dijabarkan dalam lampiran dokumen RKPD.

Memperhatikan isu pembangunan menurut sasaran pembangunan strategis, serta pokok-pokok pikiran DPRD, maka melalui serangkaian analisis elaboratif, diperoleh prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020, sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan.
3. Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.
4. Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
5. Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial.

Kelima prioritas pembangunan di atas telah sesuai yang termaktub dalam RPJMD Kota Pasuruan 2016-2021, yang dapat digambarkan kesesuaiannya sebagaimana tabel berikut :

Keselarasan Prioritas Pembangunan antara RKPD Tahun 2020 dengan
RJMD Perubahan Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

RKPD	RPJMD
Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan	- Meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan - Menurunnya kemiskinan
Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan	- Meningkatkan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur serta prasarana dan sarana wilayah
Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.	- Meningkatkan kesempatan kerja - Meningkatkan daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa
Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial	- Meningkatkan kerukunan masyarakat - Meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

Penentuan prioritas pembangunan tahun 2020 ini, juga memperhatikan keselarasannya dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terpetakan pada tabel berikut:

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur
dan Kota Pasuruan Tahun 2020

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA PASURUAN
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan
Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta manajemen kebencanaan	Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan.
Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan	Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.

	kerja	
Ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan
Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kota Pasuruan tahun 2020

Prioritas-prioritas pembangunan Kota Pasuruan di atas, terangkai membentuk tema pembangunan tahun 2020, sebagai berikut:

“Peningkatan sumberdaya manusia untuk memacu daya saing dan kualitas pembangunan”.

Esensi dari tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2020 adalah peningkatan sumber daya manusia untuk mempercepat tercapainya daya saing daerah dan kualitas pembangunan, yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Modal dasar pembangunan adalah sumber daya manusia, dengan sumberdaya manusia yang handal dalam suatu daerah akan lebih mudah mencapai kesejahteraan yang optimal. Memperhatikan perkembangan struktur usia penduduk, pelaksanaan pembangunan di Kota pasuruan mulai diisi oleh mereka yang lahir di atas tahun 1990. Mereka adalah generasi yang lahir dan tumbuh dewasa di tengah kelindan teknologi informasi.

Oleh karena itu, fokus peningkatan sumberdaya manusia adalah menyasar generasi milenial yang disesuaikan dengan bidang aktivitas mereka. Pelatihan ketrampilan kerja yang diberikan pada pencaker milenial harus menyasar peluang kerja pada era industri 4.0. Sementara pelatihan usaha harus mengarah pada kesiapan pengusaha milenial dalam menyongsong era ekonomi digital. Sumberdaya manusia dalam hal ini diutamakan para generasi milenial.

2. Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan sebuah perekonomian untuk menarik dan menjaga prospek usaha dengan pasar yang stabil dan

meningkat, yang dalam waktu bersamaan mampu menjaga standar kehidupan masyarakat.

Pembangunan daya saing yang berpusat pada sumberdaya manusia, dilaksanakan melalui model kolaborasi yang melibatkan elemen pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dan riset serta masyarakat. Model kolaborasi ini dikembangkan dengan proses bottom-up agar masing-masing elemen tersebut mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan nilai tambah kolektif untuk spesialisasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing elemen.

3. Kualitas Pembangunan

Pembangunan yang berkualitas, diukur dari aspek ekonomi-sosial, aspek berkelanjutan dan aspek budaya. Dari aspek ekonomi, pembangunan harus inklusif, yang dicirikan dengan adanya pemerataan pembangunan baik dalam perspektif antar wilayah maupun antar kelompok pendapatan. Aspek berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan harus ramah lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Pembangunan yang berkualitas dari aspek budaya memiliki makna bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan tetap mampu merawat nilai-nilai tradisi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus semakin memupuk modal sosial, sebagai prasyarat utama terbangunnya kerukunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya, penjabaran tema pembangunan dan prioritas pembangunan ke dalam program prioritas, disajikan pada tabel Perlu dimaklumi bersama, bahwa program prioritas bukanlah nomenklatur program yang tercantum pada APBD. Program prioritas adalah penekanan (streeching) yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pembangunan yang relevan.

**Pemetaan Tema, Prioritas dan Program Priotas Pembangunan
Kota Pasuruan Tahun 2020**

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
1.	Peningkatan sumberdaya manusia untuk memacu daya saing dan kualitas pembangunan	Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan.	- Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas. - Peningkatan perlindungan sosial, khususnya bagi anak terlantar. - Peningkatan tata kelola pelayanan kependudukan, khususnya pelayanan jemput bola. - Peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, khususnya bagi kelompok produktif.
		Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan.	- Peningkatan infrastruktur perkotaan dan permukiman. - Penataan penanganan sarpras perkampungan pasca alokasi dana kelurahan. - Peningkatan infrastruktur kawasan rawan bencana. - Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan.
		Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.	- Pengembangan sumberdaya kreatif, khususnya terkait desain produk dan daya jangkau pasar, pada industri mebel dan logam. - Inkubasi usaha bagi pelaku industri kreatif pada sektor-sektor ekonomi kreatif potensial, termasuk usaha start up. - Peningkatan kemampuan desain kemasan hingga labelisasi bagi IKM mamin. - Peningkatan ketrampilan kerja bagi pencaker milenial dan penciptaan lapangan kerja pada industri 4.0.
		Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.	- Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup. - Peningkatan kualitas dan aksesibilitas air.

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			- Penguatan ketahanan bencana.
		Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial.	- Peningkatan penyelenggaraan dan pembinaan kebudayaan. - Penguatan kembali nilai-nilai gotong royong dan kerukunan untuk menciptakan kerekatan sosial. - Penanggulangan narkoba dan peningkatan kamtibmas

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kota Pasuruan tahun 2020



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KOTA PASURUAN
TAHUN 2020**

BAB II

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,25	75,26	0,01 %
2	Angka Kemiskinan	6,46	6,66	3,10 %
3	Angka Pengangguran	5,06	6,33	25,10 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,56	-4,33	
5	Pendapatan Per kapita	434.435	441.531	1,63 %
6	Ketimpangan Pendapatan			

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan Tahun 2020 mencapai 75,26 dan menempatkan pencapaian status pembangunan Kota Pasuruan pada kelompok "Tinggi".

IPM Kota Pasuruan tahun 2020 sebesar 75,26 atau tumbuh 0,01 persen dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 72,25, mengalami perlambatan pertumbuhan IPM dibandingkan tahun sebelumnya karena pengaruh pandemi Covid-19 di Kota Pasuruan.

2. Angka Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 6,66 persen.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 6,66 persen naik 0,20 poin terhadap Maret 2019.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 13.400 orang, naik 480 orang terhadap Maret 2019.

3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan dari Agustus 2019 sebesar 5,06 persen menjadi 6,33 persen Agustus 2020, dengan asumsi bahwa terdapat 6 orang penganggur dari 100 orang Angkatan kerja di Kota Pasuruan.

Jumlah Angkatan Kerja mencapai 108.511 orang, sejalan dengan naiknya angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan, TPAK Agustus 2020 sebesar 70,05 persen, meningkat 2,24 persen dibandingkan tahun 2019.

Peningkatan TPAK memberikan indeks potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang meningkat.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 4,85 persen menjadi sebesar -4,88 persen pada tahun 2020.

TABEL 7. PDRB, PDRB PERKAPITA (JUTA RUPIAH) DAN PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA (PERSEN)

Kota : Pasuruan

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta rupiah)	6.559.009,28	7.105.188,52	7.707.010,78	8.287.819,46	8.047.228,39
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta rupiah)	5.076.353,71	5.354.088,55	5.650.488,22	5.964.658,29	5.706.596,68
3	Jumlah Penduduk (orang)	196.202	197.696	199.078	200.422	201.585
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	33,43	35,94	38,71	41,35	39,92
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan	25,87	27,08	28,38	29,76	28,31
	PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 (PERSEN)	4,72	4,67	4,80	4,85	-4,88

5. Pendapatan Per kapita

Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan hasil Susenas

(Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS. Pada periode Maret 2020, Garis Kemiskinan meningkat sebesar 1,63 persen atau naik Rp. 7.096,- per kapita per bulan, yaitu Rp. 434.435,- per kapita per bulan pada Maret 2019, menjadi Rp. 441.531,- per kapita per bulan pada Maret 2020.

6. Ketimpangan Pendapatan

Persoalan kemiskinan bukan sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat dalam dan keparahan kemiskinan.

Indeks dalam kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks dalam kemiskinan pada Maret 2020 sebesar 0,78 turun 0,13 dibandingkan Maret 2019 sebesar 0,91, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekat garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2020 sebesar 0,14 turun 0,03 dibandingkan Maret 2019 sebesar 0,17, mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan penduduk semakin berkurang.

StatistikKunci, 2018–2020
Key Statistics, 2018–2020

Rincian/Description	Satuan/Unit	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk1/Population1	ribu/thousand	199.078	200.422	208.006
LajuPertumbuhan Penduduk1/Population Growth1	%	0,70	0,68	1,07
AngkaHarapan Hidup1-e0/Life Expectancy Rate1	tahun/years	71,18	71,40	71,52
AngkaMelekHurufUsia 15+/Literacy Rate Aged 15+	%	96,36	96,60	96,04
Tingkat PartisipasiAngkatanKerja - TPAK2 Labour Force Participation Rate-LFPR2	%	66,33	67,91	70.08
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT2 Unemployment Rate-UR2	%	4,47	5,06	6,33
Penduduk Miskin5/Poor People4	ribu/thousand	13,45	12,92	13,40
PersentasePenduduk Miskin4 Percentage of Poor People4	%	6,77	6,46	6,66
Indeks Pembangunan Manusia-IPM5 Human Development Index5	-	74,78	75,25	75,26
EKONOMI/ECONOMIC				
ProdukDomestik Regional (PDRB) Harga Berlaku6 Gross Domestic Regional Bruto (GDRB) at Current Price6	miliar rupiah billion rupiahs	7.707.887,4	8.288.680,9	8.047.228,4
LajuPertumbuhan Ekonomi8/Economic Growth 7	%	5,54	5,56	-4,33
ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) HargaKonstan 6,8 Gross Domestic Regional Bruto (GDRB) at constant price 6,8	miliar rupiah billion rupiahs	5.650.854,8	5.965.297,0	5.706.596,7

Sumber : Kota PasuruanDalamAngka 2021, BPS Kota Pasuruan

Catatan/Notes:

- Hasilproyeksipenduduk Indonesia 2010–2035 (pertengahantahun/Juni)danHasilSensusPenduduk 2020/*The result of Indonesia population prjection 2010–2035 (mid year/June) and The resultf of Population Census 2020*
- KondisiAgustus/Condition at August
- Menggunakanpenimbanghasilproyeksipenduduktahun 2010–2035/Weighted by the 2010–2035 population projection
- KondisiMaret/Condition at March
- Sejaktahun 2010, IPM dihitungdenganmetodebaru. Komponen IPM metodebaruadalahangkaharapanhidupsaatlahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, danpengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita
- Mulaitahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008)
- Menggunakantahundasar 2010 (2010=100)/*Using 2010 base year (2010=100)*
- Mulai 2010 proyeksipendudukberdasarkanhasil SP2010/Since 2010 populationprojection based on SP2010

TABEL 1. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
(JUTA RUPIAH)
Kota : Pasuruan

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	165.592,4	168.071,4	175.202,8	177.519,9	198.392,4
B	PertambangandanPenggalian	2.055,6	2.042,1	2.133,7	2.017,8	1.968,9
C	IndustriPengolahan	1.352.088,9	1.450.877,2	1.555.879,1	1.660.698,5	1.566.836,6
D	PengadaanListrikdan Gas	3.959,1	4.758,0	5.225,7	5.636,6	5.675,9
E	Pengadaan Air, PengelolaanSampah, LimbahdanDaurUlang	15.800,3	16.853,3	17.586,4	17.973,7	18.962,7
F	Konstruksi	412.859,9	459.901,8	494.190,1	512.140,8	493.055,3
G	PerdaganganBesardanEceran; Reparasi Mobil danSepeda Motor	1.858.021,5	2.025.022,9	2.240.658,0	2.440.837,4	2.297.261,2
H	TransportasidanPergudangan	379.069,1	424.556,0	461.908,2	507.293,5	481.412,3
I	PenyediaanAkomodasidanMakanMinum	349.675,7	391.144,6	424.529,2	464.177,6	425.935,2
J	InformasidanKomunikasi	501.536,9	547.380,5	582.293,8	630.362,5	682.066,9
K	JasaKeuangandanAsuransi	509.239,8	542.961,3	579.556,4	599.962,4	602.085,9
L	Real Estate	167.807,2	176.363,7	194.929,9	209.242,4	214.296,4
M,N	Jasa Perusahaan	39.056,5	42.957,5	48.130,0	52.572,2	51.196,9
O	AdministrasiPemerintahan, PertahanandanJaminanSosialWajib	284.752,3	302.116,2	333.966,2	369.204,6	373.064,5
P	JasaPendidikan	272.348,4	289.747,1	310.116,2	336.509,0	357.377,4
Q	JasaKesehatandanKegiatanSosial	55.626,6	60.151,6	64.303,5	69.844,1	76.929,7
R,S,T,U	Jasalainnya	189.519,0	200.283,2	216.401,5	231.826,4	200.710,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6.559.009,3	7.105.188,5	7.707.010,8	8.287.819,5	8.047.228,4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6.559.009,3	7.105.188,5	7.707.010,8	8.287.819,5	8.047.228,4

Sumber : Kota PasuruanDalamAngka 2021, BPS Kota Pasuruan

TABEL 2. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA
(JUTA RUPIAH)
Kota : Pasuruan

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	118.417,0	116.959,0	116.935,1	115.789,9	128.580,2
B	PertambangandanPenggalian	1.609,0	1.564,6	1.532,9	1.417,0	1.326,6
C	IndustriPengolahan	1.019.586,0	1.064.266,8	1.111.469,5	1.163.774,1	1.074.380,9
D	PengadaanListrikdan Gas	4.119,1	4.286,7	4.503,6	4.782,3	4.782,7
E	Pengadaan Air, PengelolaanSampah, LimbahdanDaurUlang	13.409,8	13.969,9	14.435,0	14.934,1	15.647,8
F	Konstruksi	312.189,2	340.182,7	362.395,1	383.382,5	356.020,4
G	PerdaganganBesardanEceran; Reparasi Mobil danSepeda Motor	1.415.701,7	1.506.412,3	1.603.089,9	1.702.058,8	1.577.692,5
H	TransportasidanPergudangan	286.324,0	307.444,2	328.063,0	351.729,2	329.330,6
I	PenyediaanAkomodasidanMakanMinum	247.280,3	269.833,7	289.675,6	310.756,5	278.677,1
J	InformasidanKomunikasi	470.044,1	502.336,6	533.530,1	570.651,6	614.875,8
K	JasaKeuangandanAsuransi	388.739,7	399.894,4	416.284,4	428.323,8	427.437,8
L	Real Estate	131.065,9	134.794,7	142.631,7	149.959,6	152.529,2
M,N	Jasa Perusahaan	31.432,1	33.444,4	35.907,2	38.336,2	36.010,9
O	AdministrasiPemerintahan, PertahanandanJaminanSosialWajib	227.269,4	233.137,6	242.775,0	251.596,5	244.444,3
P	JasaPendidikan	214.451,9	222.899,4	234.480,8	251.168,5	259.340,4
Q	JasaKesehatandanKegiatanSosial	46.715,9	48.610,9	51.926,5	55.402,3	60.214,6
R,S,T,U	Jasalainnya	147.998,7	154.050,7	160.852,7	170.595,4	145.304,9
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.076.353,7	5.354.088,5	5.650.488,2	5.964.658,3	5.706.596,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		5.076.353,7	5.354.088,5	5.650.488,2	5.964.658,3	5.706.596,7

Sumber : Kota PasuruanDalamAngka 2021, BPS Kota Pasuruan

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi(Negeri dan Swasta) 2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) 5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) 6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7 Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	57 9.629 9.629 - 997 - -	Data Pokok Pendidikan Data Pokok Pendidikan Data Pokok Pendidikan - Data Pokok Pendidikan - -	Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			
		8 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	57	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		9 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkap dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	22.556	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		10 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkap dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	10.775	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		11 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	22.556	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		12 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	10.775	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		13 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	139	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		14 Jumlah kebutuhan minimal pendidik	41	Data Pokok Pendidikan	Diknas

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)			
		15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.448	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	851	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		17 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			Diknas
		18 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)			Diknas
		19 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			Diknas
		20 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)			Diknas
		21 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	S1 Sertifikat pendidik	Data Pokok Pendidikan 1.036 492	Diknas
		22 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-	S1 Sertifikat pendidik	Data Pokok Pendidikan 631 383	Diknas

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 23 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 24 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 25 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 26 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 27 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 28 Jumlah peserta didik pendidikan	51 19	Data Pokok Pendidikan Data Pokok Pendidikan	Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		29 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	Diknas
		30 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	-	-	Diknas
		31 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	79	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		32 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	44	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		33 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			Diknas
		34 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	3	Data Pokok Pendidikan	Diknas
2	Kesehatan	1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota			RSUD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar			
		2 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	Buku Profil 2020	Dinkes
		3 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.329.723.867	Buku Profil 2020	Dinkes
		4 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	325	Buku Profil 2020	Dinkes
		5 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.329.723.867	Buku Profil 2020	Dinkes
		6 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	325	Buku Profil 2020	Dinkes
		7 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.329.723.867	Buku Profil 2020	Dinkes
		8 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	798	Buku Profil 2020	Dinkes
		9 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.329.723.867	Buku Profil 2020	Dinkes
		10 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	798	Buku Profil 2020	Dinkes
		11 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.329.723.867	Buku Profil 2020	Dinkes
		12 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	570	Buku Profil 2020	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		13 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.329.723.867	Buku Profil 2020	Dinkes
		14 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	734	Buku Profil 2020	Dinkes
		15 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	139.269.325	Buku Profil 2020	Dinkes
		16 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	734	Buku Profil 2020	Dinkes
		17 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	139.269.325	Buku Profil 2020	Dinkes
		18 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	734	Buku Profil 2020	Dinkes
		19 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	139.269.325	Buku Profil 2020	Dinkes
		20 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	734	Buku Profil 2020	Dinkes
		21 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	139.269.325	Buku Profil 2020	Dinkes
		22 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	734	Buku Profil 2020	Dinkes
		23 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	345.262.750	Buku Profil 2020	Dinkes
		24 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	734	Buku Profil 2020	Dinkes
		25 Jumlah dukungan logistik kesehatan	345.262.750	Buku Profil 2020	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang tersedia 26 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	734	Buku Profil 2020	Dinkes
3	Pekerjaan Umum	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota			Perkim Perkim Perkim Perkim Perkim Perkim Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	57,70%	DPUPR (SDAD)	PUPR/Perkim
		9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	77,59%	DPUPR (SDAD)	PUPR/Perkim
		10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	77,16%	DPUPR (SDAD)	PUPR/Perkim
		11. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 Dokumen		Perkim
		12. Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak ada		Perkim
		13. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD (PDAM)		Perkim
		14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 Izin		Perkim
		15. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak ada		Perkim
		16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	39.368 unit		Perkim
		17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	16.872 unit		Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	56.240 unit		Perkim
		19. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak ada		Perkim
		20. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak ada		Perkim
		21. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Tidak ada		Perkim
		22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100%		Perkim
		23. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	87.56%		Perkim
		24. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	70.61%		Perkim
		25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Tidak ada		Perkim
		26. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Tidak ada		Perkim
		27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Tidak ada		Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		28.Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Tidak ada		Perkim
		29.Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak ada		Perkim
		30.Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi			DPM&PTSP
		31.Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting			DPM&PTSP
		32.Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung			DPM&PTSP
		33.Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung			DPM&PTSP
		34.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan			DPM&PTSP
		35.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			DPM&PTSP
		36.Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota			DPM&PTSP
		37.Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat			DPM&PTSP
					PUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 51. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 52. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 53. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 54. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 55. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 56. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota	1396 paket	DPUPR Binakonstruksi	PUPR PUPR PUPR PUPR PUPR PUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. 57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis 58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota 59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk	34 orang	DPUPR Binakonstruksi	PUPR PUPR PUPR PUPR PUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			PUPR
		62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			PUPR
		63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	47 Badan usaha	DPUPR Binakonstruksi	PUPR
		65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota			PUPR
		66. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	116 Badan Usaha	DPUPR Binakonstruksi	PUPR
		67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	80 Badan Usaha	DPUPR Binakonstruksi	PUPR
		68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	47 Badan Usaha	DPUPR Binakonstruksi	PUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			PUPR
		70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			PUPR
		71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			PUPR
4	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang	2368 Rumah 85 RT, 2368 KK, 8786 Jiwa 13 Rumah 0	Jumlah laporan rumah yang terdampak bencana Laporan bencana yang sah/legal Laporan kelurahan atas rumah yang perlu direhab	BPBD/Perkim BPBD/Perkim BPBD/Perkim BPBD/Perkim BPBD/Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		BPBD/Perkim
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		BPBD/Perkim
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		BPBD/Perkim
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		BPBD/Perkim
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada		Perkim
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada		Perkim
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			Perkim
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan	0.33%		Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0.07%		Perkim
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak ada		Perkim
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	39.44 Ha		Perkim
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	212 Rumah		Perkim
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	53.18 Ha		Perkim
		19. Jumlah rumah di kab/kota	64.154		Perkim
		20. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	212 Rumah		Perkim
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	4117 Rumah		Perkim
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni			Perkim
		23. Rasio rumah dan KK	64154/64145		Perkim
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	0		Perkim
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	16 Perumahan		Perkim
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	22010		Perkim
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	52017		Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) 29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 32. Jumlah pengembang yang teregistrasi 33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	45/52.017 = 88,04%		Perkim Perkim Perkim Perkim Perkim Perkim
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal 7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Pengaduan (6) 231 anggota 5 anggota 1 SOP 0	E Lapor dan di luar e Lapor Bidang Linmas Kepegawaian (Jumlah dok RPB/Jumlah kegiatan RPB yg	Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	10%	dilaksanakan)x 100% (Jumlah penduduk pada daerah rawan bencana yang menerima informasi/jumlah penduduk pada rawan bencana) x 100%	BPBD
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	(Jumlah dokumen RPB/ Jumlah Kegiatan RPB yang dilaksanakan) x 100%	BPBD
		10. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	(Jumlah dokumen rekon/ jumlah kegiatan rekon yang dilaksanakan) x 100%	BPBD
		11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0.40%		BPBD
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0.44%	(Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan/ warga negara di daerah rawan bencana) x 100%	BPBD
		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	(jumlah warga negara yang mendapat layanan PUSDALOPS/ jumlah warga negara yang daerahnya terdampak	BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0%	bencana) x 100% (jumlah warga negara yang mendapat perlindungan pada daerah terdampak bencana/ jumlah warga negara yang terdampak bencana) x 100%	BPBD
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	(jumlah kejadian KLB bencana yang tertangani/ jumlah kejadian KLB bencana) x 100%	BPBD
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0%	(jumlah status darurat bencana yang tertangani/ jumlah status darurat bencana) x 100%	BPBD
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	25%	(jumlah petugas shift yang aktif/ jumlah petugas) x 100%	BPBD
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	-	(jumlah korban bencana yang tertangani/ jumlah korban bencana) x 100%	BPBD
		19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam	55	jumlah laporan bencana yang sah / legal	BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 21. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa 23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 25. Jumlah relawan kebakaran di bawah	- - - 10 jenis -	- - - jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dimiliki jumlah petugas pemadam kebakaran yang mengikuti diklat jumlah peserta pelatihan	BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 0		relawan yang dilaksanakan jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran BPBD	
6	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket pernakanan sesuai standar gizi	- - - 66 orang 2 unit -	Bidang Rehsos Bidang Rehsos Bidang Rehsos Bidang Rehsos Sekretariat Bidang Rehsos	Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	5 paket	Bidang Rehsos	Dinsos
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	2 paket	Bidang Rehsos	Dinsos
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1 orang	Bidang Rehsos	Dinsos
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan	-	Bidang Rehsos	Dinsos

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	6 jenis	Bidang Rehsos	Dinsos
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	6 orang	Bidang Rehsos	Dinsos
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	6 orang	Bidang Rehsos	Dinsos
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	2 orang	Bidang Rehsos	Dinsos

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		gepeng yang dirujuk 22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan 23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 27. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	4025 jiwa - - - - Tagana 43 orang; TKSK 4 orang; Peksos 1 orang	Bidang linjamsos Bidang linjamsos Bidang linjamsos Bidang linjamsos Bidang linjamsos Bidang Rehsos, Fakmis, Linjamsos	Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos
7	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota 4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta			Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelatihan 7. Persentase LPK yang terakreditasi 8. Persentase LPK yang memiliki perizinan 9. Jumlah penganggur yang dilatih 10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 11. Persentase penyerapan lulusan 12. Lulusan bersertifikat kompetensi 13. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 16. Data tingkat produktivitas total 17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 18. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang	- 12 LPK 100 100 60 - - -		Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan 20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah 21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 23. Jumlah mogok kerja 24. Jumlah penutupan perusahaan 25. Jumlah perselisihan kepentingan 26. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan 27. Jumlah perselisihan PHK 28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan 31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	541		Disnaker
		33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1271		Disnaker
		34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	12		Disnaker
		35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota			Disnaker
		36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	-		Disnaker
		37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	-		Disnaker
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota			Disnaker
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	460		Disnaker
		40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	-		Disnaker
		41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	1		Disnaker

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	3		Disnaker
		43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	-		Disnaker
		44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-		Disnaker
		45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-		Disnaker
		1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	41 OPD	Bidang Pemberdayaan Perempuan	DPPPA&KB
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	117 Program	Bidang Pemberdayaan Perempuan	DPPPA&KB
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	-	-	DPPPA&KB
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga (P2TP2A)	Bidang Perlindungan Anak / P2TP2A	DPPPA&KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100% (11 kasus)	Bidang Perlindungan Anak / P2TP2A	DPPPA&KB
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	3 Lembaga (P2TP2A, WCC, LPA)	Bidang Perlindungan Anak / P2TP2A	DPPPA&KB
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 Lembaga (P2TP2A)	Bidang Perlindungan Anak / P2TP2A	DPPPA&KB
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	40 organisasi	Bidang Pemberdayaan Perempuan	DPPPA&KB
		9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	-	-	DPPPA&KB
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	40 organisasi	Bidang Pemberdayaan Perempuan	DPPPA&KB
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	-	DPPPA&KB
		12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	-	DPPPA&KB
		13. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah	1 lembaga (P2TP2A yang memiliki sertifikat)	Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan	DPPPA&KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terstandarisasi 14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100% (3 kasus)	Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan	DPPPA&KB
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada	Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan	Pertanian&KP Pertanian&KP Pertanian&KP 1. DPA TA.2020 keg. Kegiatan Promosi gerakan penganekaraga man pangan 2. DPA TA.2020 keg. Pembinaan kelembagaan ketahanan pangan 3. DPA TA.2020 keg. Pemanfaatan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					lahan pekarangan sempit untuk tanaman ketahanan pangan 4. DPA TA.2020 keg. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman unggul
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6. Tertanganinya kerawanan pangan 7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada	Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan	Pertanian&KP Pertanian&KP Pertanian&KP Pertanian&KP
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang			PUPR PUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota			PUPR PUPR PUPR
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH) 2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota 3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	80 76,32 45,055 67,09% Rekom UKL-UPL = 12 Rekom IPLC = 3 Rekom TPS LB3 = 3 -	Bidang analisis & pengendalian dampak lingkungan Bidang konservasi SDA Bidang kebersihan lingkungan Bidang analisis & pengendalian dampak lingkungan -	DLH&KP DLH&KP DLH&KP DLH&KP DLH&KP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota 6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH 7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat 8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	- - - 100%	- - - Bidang analisis & pengendalian dampak lingkungan	DLH&KP DLH&KP DLH&KP DLH&KP
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	96,97% 85,24% 95,48% 100%	Dispenduk Capil Dispenduk Capil Dispenduk Capil Dispenduk Capil	Dipenduk Capil Dipenduk Capil Dipenduk Capil Dipenduk Capil
13	Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan			

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK 6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes)	- 24,69 8,16 5,98 10 mitra KB (PIK-R, kelompok KB, pokja kampung KB, PPKBK, sub PPKBK, faskes KB, kelompok tribina, UPPKS) 73,24	BAPPELITBANGDA Hasil olahan data laporan pernikahan KUA Buku saku parameter kependudukan jatim 2020 Hasil olahan laporan SIDUGA / REK-KAB.F1 / DAL / 13 SIGA (sistem informasi keluarga) Hasil olahan laporan	DPPPA&KB DPPPA&KB DPPPA&KB DPPPA&KB DPPPA&KB DPPPA&KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang siap melayani KB MKJP		bulanan F2/KB/13	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23,98	Hasil olahan laporan SIDUGA / REK-KAB.F1/DAL/ 13	DPPPA&KB
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	10 pokja (PIK-R, KELOMPOK kb, POKJA KAMPUNG kb, ppkbk, SUB FASKES kb, KELOMPOK TRIBINA, uppks)	SIDUGA / REK-KAB.F1/DAL/ 13	DPPPA&KB
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	7,85	Hasil olahan laporan bulanan F2/KB/13	DPPPA&KB
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0,50	Hasil olahan laporan SIDUGA / REK-KAB.F1/DAL/ 13	DPPPA&KB
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	32,27	Hasil olahan laporan SIDUGA / REK-KAB.F1/DAL/ 13	DPPPA&KB
15	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan	100% 100% 100%	Bidang Angkutan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Bidang Angkutan	Dishub Dishub Dishub

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi			
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	Bidang Lalu lintas	Dishub
		5. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	100%	Bidang Lalu lintas	Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%		Kominfo
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%		Kominfo
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Tidak		Kominfo
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan	100%		Kominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015			
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%		Kominfo
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%		Kominfo
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%		Kominfo
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%		Kominfo
		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			Kominfo
		10. Persentase layanan publik dan layanan			Kominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah			
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%		Kominfo
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%		Kominfo
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%		Kominfo
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%		Kominfo
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%		Kominfo
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%		Kominfo
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			Kominfo
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah	100%		Kominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		provinsi 19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100% 100%		Kominfo Kominfo
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 4. Persentase usaha simpan pinjam oleh	0% 0% 0% 56%	Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi Bidang Koperasi	Koperasi&UM Koperasi&UM Koperasi&UM Koperasi&UM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	23%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk	0%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	8%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0%	Bidang Usaha Mikro	Koperasi&UM
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0%	Bidang Usaha Mikro	Koperasi&UM
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0%	Bidang Usaha Mikro	Koperasi&UM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 20. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0% 0% 0%	Bidang Usaha Mikro Bidang Usaha Mikro Bidang Usaha Mikro	Koperasi&UM Koperasi&UM Koperasi&UM
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal 3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal 4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 5. Kegiatan pameran penanaman modal 6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal			DPM&PTSP DPM&PTSP DPM&PTSP DPM&PTSP DPM&PTSP DPM&PTSP DPM&PTSP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9. Laporan realisasi penanaman modal 10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota 11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota			DPM&PTSP DPM&PTSP DPM&PTSP DPM&PTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda 4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan 5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	- - 135 orang 1 organisasi - -	Bidang Pemuda dan olah raga Bidang Pemuda dan olah raga Bidang Pemuda dan olah raga Bidang Pemuda dan olah raga Bidang Pemuda dan olah raga Bidang Pemuda dan olah raga	Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang	- 73%	- OPD	Kominfo Kominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS 5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral 7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	66% - - - -	OPD - - - -	Kominfo Kominfo Kominfo Kominfo Kominfo
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan 2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah			Kominfo Kominfo Kominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan			Kominfo
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) 3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi,			Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemeliharaan dan pemugaran) 7. Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data 8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) 9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum. 12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya 14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi			Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya 16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman 18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat			Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdFTAR yang ada di wilayahnya 7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa			Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			Arsip&Perpus
24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi 8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK 9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan			Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus Arsip&Perpus

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK			Arsip&Perpus
25	Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) 2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan 4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) 5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi			Perikanan Perikanan Perikanan Perikanan
26	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar,	- 12	Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata	Dispora Dispora

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	60 TDUP 3369 orang 2 event - - - 65,21% 9 lokasi	Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata	Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora
27	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan 2. Prasaran pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha	0 0 0 0 0	Bidang TPH&P Bidang TPH&P Bidang TPH&P Bidang TPH&P Bidang TPH&P	Pertanian&KP Pertanian&KP Pertanian&KP Pertanian&KP Pertanian&KP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pertanian kab/kota 6. Persentase fasilitas penanggulangan bencana	100%	Bidang TPH&P	Pertanian&KP
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota			
30	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG 4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. enerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari	- - 100% - - -	- - Data gudang perusahaan - - - -	Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri 5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota 6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu 7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu 9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan 10. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	- - - - - 0,20% 100,26% -	- Data penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 Data UTTP tahun 2018-2020 UPT kementerian pertanian disperindag 2020 -	Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag DPM&PPT / Disperindag
31	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang	-	-	/

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lokasinya di daerah kabupaten/kota 2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA 3. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan 5. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	50% 100% - 0,46%	 DPM & PTSP SIINas dan disperindag	Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag
32	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina			

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3.192 20.709 9.358 237	Data Pokok Pendidikan Data Pokok Pendidikan Data Pokok Pendidikan Data Pokok Pendidikan	Diknas Diknas Diknas Diknas

2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	183 tempat tidur non covid dan 55 tempat tidur covid	SK Direktur RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan No 188/ 151/ SK.DIR/ 423.600.03/ 2020 SK Direktur No 188/ 159/ SK.DIR/423.600.03/2020	RSUD
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			Dinkes
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			Dinkes
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			Dinkes
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Dinkes
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			Dinkes
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Dinkes
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			Dinkes
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			Dinkes
		10. Persentase penderita hipertensi yang			Dinkes

	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Dinkes
	11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Dinkes
	12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				Dinkes
	13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				Dinkes
	14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
3	Pekerjaan Umum			91,19	Perkim
	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota				Perkim
	2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota				PUPR/Perkim
	3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				Perkim
	4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum			100%	

	melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				Perkim
	5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,66%			DPM&PTSP PUPR
	6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	82,97%		Bina Marga	PUPR
	7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	75 orang		Data Tahun 2019	PUPR
	8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
	9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				
4	Perumahan Rakyat			Jumlah laporan rehabilitasi yang sah	BPBD/Perkim
	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	13 rumah			Perkim
	2. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	11 rumah			Perkim
	3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	70,74%			Perkim
	4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,47%			Perkim
	5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan	26,95%			Perkim

		Utilitas Umum)				
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				Satpol PP
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				Satpol PP
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	8786 jiwa		Laporan kejadian bencana yang sah	BPBD
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	115 jiwa		jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8786 jiwa		laporan kejadian bencana yang sah	BPBD
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%		laporan kejadian bencana kebakaran yang sah IKU BPBD	BPBD
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11 menit			BPBD
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	11,02%			Dinsos
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	34,90%			Dinsos

7	Tenaga Kerja	darurat bencana daerah kabupaten/kota	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota			Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD 2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota 3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100% (41 OPD) 100% (11 anak) -	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perlindungan Anak / P2TP2A -	DPPPA & KB DPPPA & KB DPPPA & KB	
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,398%	BPS Kota Pasuruan dan kementerian pertanian	Pertanian&KP	
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan			PUPR	

		luas izin lokasi yang diterbitkan							
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum							PUPR
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal							PUPR
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee							PUPR
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat							PUPR
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi							Pertanian&KP
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota							DLH & KP
		2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	94,32%						DLH & KP
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%						DLH & KP
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Perekaman KTP Elektronik	97,82%						Dispenduk Capil
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	92,09%						Dispenduk Capil
		3. Kepemilikan akta kelahiran	99,79%						Dispenduk Capil
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100%						Dispenduk Capil

13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total) 2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	2,09 80,15 7,59	Buku saku parameter kependudukan 2020 Hasil olahan laporan SIDUGA/ REK-KAB.F1/DAL/ 13 Hasil olahan laporan SIDUGA/ REK-KAB.F1/DAL/ 13	DPPS & KB DPPS & KB DPPS & KB
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Kabupaten/Kota 2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	59 0.606	Bidang Angkutan Bidang Lalu lintas	Dishub Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kominfo Kominfo Kominfo
17	Koperasi, Usaha Kecil dan	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	19%	Bidang Koperasi	Koperasi & UM Koperasi & UM

	Menengah	2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	3,91%	Bidang Usaha Mikro	
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota			DPM & PTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 3. Peningkatan Prestasi Olahraga	- - -	Bidang Pemuda dan Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga	Dispora Dispora Dispora
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			Kominfo Kominfo
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah			Kominfo
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya			Diknas
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			Arsip&Perpus Arsip&Perpus
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor			Arsip&Perpus

		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			Arsip&Perpus
25	Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)			Perikanan
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota 3. Tingkat Hunian Akomodasi 4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-37% -75% -32% - -	Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata Bidang Pariwisata	Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun 2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	6,5 Ton/Ha 0%	Bidang TPH&P Bidang peternakan	Pertanian & KP Pertanian & KP
28	Kehutanan				
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota			

30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 2. Persentase kinerja realisasi pupuk 3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	- 100% 0,01%	- laporan posisi peredaran pupuk bersubsidi di Kota Pasuruan data UTTP tahun 2018-2020 UPT kemetrologian disperindag 2020	Disperindag Disperindag Disperindag
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota 2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK 3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait 4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-17,44% 5,56% 100% -	Disperindag PDRB Kota Pasuruan DPM&PTSP dan SIINas -	DPM&PTSP Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-	SIINas	Disperindag
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	44%		Disperindag
32	Transmigrasi		-	-	NIHIL

c. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No. (1)	Fungsi Penunjang (2)	Indikator Kinerja Kunci (3)	Capaian Kinerja (4)	Sumber Dana (5)	Keterangan (6)
1	Perencanaan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan 2. Rasio PAD 3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,02% 100% Level 2	BPKA BAPENDA Laporan pelaksanaan Quality Assurance (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Pasuruan	BPKA BPKA/BAPENDA Inspektorat Inspektorat BPKA
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Laporan Hasil penjaminan kualitas (QA atas penilaian mandiri kapabilitas APIP level 2 pada Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2018	Inspektorat

	5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi expenditures) 6. Opini Laporan Keuangan	0,13% WDP	BPKA Laporan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2019	
2	Pengadaan 1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama 2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif 3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan			BLP BLP BLP
3	Kepegawaian 1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	135,01% 72,45% 15,67%	SIMASKOT SIMASKOT SIMASKOT	BKD BKD BKD

4	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 3. Assets Management : a. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) b. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) c. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) d. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) 4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	-0,24% -0,22% YA YA TIDAK YA -0,75%	BPKA BPKA BPKA BPKA	BPKA BPKA BPKA BPKA
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			BPKA/Kominfo BPKA/Kominfo

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan janji kinerja Kepala Daerah atas penggunaan anggaran yang telah di sahkan oleh DPRD serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Adapun perjanjian kinerja perubahan Kota Pasuruan Tahun 2020 sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel Perjanjian Kinerja Kota Pasuruan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	KET
1	2	3		4
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,68	IKU
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	90,0	83,97	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	100	100	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	100	92,5	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,0	9,11	
	Harapan Lama Sekolah	13,50	13,65	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,64	0,79	IKU
	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,30	71,60	
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,06	6,04	IKU
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,50	65,07	
Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	Pertumbuhan Ekonomi	5,56	3,30	IKU
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri	21,17	9,7	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan	28,25	6,16	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa	13,17%	15,63	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan	9,12%	-0,045	
Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,46	7,39	IKU
	Indeks Gini	0,34	0,45	IKU
	Indeks kedalaman kemiskinan	1,07	0,92	
	Indeks keparahan kemiskinan	0,19	0,23	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	KET
1	2	3		4
Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial	Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap	80,46	67,29	
	Cakupan layanan air bersih	85,51	88,58	
	Persentase Kawasan Kumuh	3,01%	1,06	
	Cakupan layanan sanitasi	86,23	90,38	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,34	67,00	IKU
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23,47%	24,63	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	60	73,84	IKU
	Predikat SAKIP Kota	BB	B	
	Maturitas SPIP	2,3	2,3	
	Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	
Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	84,22	16,7	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,85	
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Indeks Modal Sosial	51,26	51,26	IKU
	Persentase potensi konflik ipoleksosbud yang ditangani	0%	5.00	
Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	70%	65,19	
	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	37%	13,04	

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Bagan berikut adalah uraian pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2020 :

Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kota Pasuruan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2			4
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,69	
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	83,97	0,79	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	100	114,18	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	92,5	133,88	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,11	9,12	
	Harapan Lama Sekolah	13,65	13,62	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,79	0,79	
	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,60	71,52	
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04	3,69	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,07	70,05	
Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	Pertumbuhan Ekonomi	3,30	-2,60	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri	9,7	-5,65	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan	6,16	-5,88	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa	15,63	-13,42	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan	-0,045		
Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,39	6,66	
	Indeks Gini	0,45	0,318	
	Indeks kedalaman kemiskinan	0,92	0,78	
	Indeks keparahan kemiskinan	0,23	0,14	
Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana	Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap	67,29	69,8	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2			4
perekonomian dan sosial				
	Cakupan layanan air bersih	88,58	87,43	
	Persentase Kawasan Kumuh	1,06	2,55	
	Cakupan layanan sanitasi	90,38	88,04	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,00	64,918	
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	24,63	24,63	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	73,84		
	Predikat SAKIP Kota	B	B	
	Maturitas SPIP	2,3		
	Opini BPK atas LKD	WTP	WDP	
Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	16,7	79,71	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,85	79,17	
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Indeks Modal Sosial	51,26	72,36	
	Persentase potensi konflik ipoleksosbud yang ditangani	5,00	5,05	
Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	65,19	79	
	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	13,04	8	

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Bagan berikut adalah uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2019 dan tahun 2020 :

Tabel Capaian IKU Kota Pasuruan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		%
	RPJMD	2020	2019	2020	
Indeks Pendidikan	0,72	0,68	0,68	0,69	
Indeks Kesehatan	81,79	0,79	0,64	0,79	
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,71	6,04	5,06	3,69	
Pertumbuhan Ekonomi	6,07	3,30	5,56	-2,60	
Tingkat Kemiskinan	7,37	7,39	6,46	6,66	
Indeks Gini	0,47	0,45	0,34	0,318	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,12	67,00	66,34	64,91	
Indeks Reformasi Birokrasi	77	73,84	61,62		
Indeks Modal Sosial	67,12	51,26	62,45	72,36	
RATA-RATA CAPAIAN IKU					

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Bagan berikut adalah uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2020 :

Tabel Capaian IKU Kota Pasuruan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI				%
	RPJMD	2020	2017	2018	2019	2020	
Indeks Pendidikan	0,72	0,68	0,68	0,67	0,68	0,69	
Indeks Kesehatan	81,79	0,79	0,78	0,64	0,64	0,79	
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,71	6,04	5,60	4,55	5,06	3,69	
Pertumbuhan Ekonomi	6,07	3,30	5,46	5,47	5,56	-2,60	
Tingkat Kemiskinan	7,37	7,39	7,53	7,49	6,46	6,66	
Indeks Gini	0,47	0,45	0,32	0,39	0,34	0,318	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,12	67,00	65,67	67,28	66,34	64,91	
Indeks Reformasi Birokrasi	77	73,84	50	64	61,62		
Indeks Modal Sosial	67,12	51,26	-	-	62,45	72,36	
RATA-RATA CAPAIAN IKU							

Penjelasan ringkas :

a. Indeks Pendidikan 0,69

Indekspendidikanmerupakanpencerminanhasilpembangunanbidangpe
ndidikan.IndikatorpembentukindeksPendidikanadalahAngkaMelekHuru
fdan Rata-rata lama Sekolah.IndekspendidikankotaPasuruantahun
2020 sebesar 0,69. Mengalamikenaikansebesar
0,01jikadibandingkantahun 2019.

b. Indeks Kesehatan 0,79

Peningkatanindekskesehatansangatpentingdilakukansecaraterusmener
usdanberkesinambungan.Salah
satunyaadapatditingkatkandenganmelihatderajatKesehatan.Indekskese
hatankotaPasuruantahun 2020 sebesar 0,79. Jikadibandingkantahun
2019, makapadatahun 2020 mengalamikenaikansebesar 0,15.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,69

Dalamsetahunterakhir, pengangguranberkurang 10,26ribu orang,
sedangkan TPT turunmenjadi 3,69 persenpada Februari 2020. Tingkat
pengangguranterbukamenurunjikadibandingkandenganbesaranpada
hun 2019.

d. Pertumbuhan Ekonomi -2,60

Pertumbuhanekonomisangatsementaratercatattumbuhsebesar -2,60
persen, angkatersebutlebihrendahjikadibandingkantahun 2019
yaknisebesar 5,56 persendengatingkatinflasiakuranglebih 1,68
persensepanjangtahun 2020.

e. Tingkat Kemiskinan 6,66

Tingkat Kemiskinan Kota Pasuruantahun 2020
mengalamikenaikandaritahun 2019 sebesar 0,20 yang
berartibertambahnyaketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan.

f. Indeks Gini 0,318

IndeksGini Kota Pasuruantahun 2020 mengalamipenurunandaritahun
2019 yaknisebesar 0,34.
Yangberartitingkatpemerataanpendapatanmasihpadatingkatketimpang
anrendah.

g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 64,91

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan tahun 2020 menunjukkan kategori cukup baik dengan angka 64,91. Akan tetapi angka tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2019.

h. Indeks Reformasi Birokrasi

i. Indeks Modal Sosial 72,36

Modal sosial diukur berdasarkan indeks dimensi modal sosial (saling percaya, norma, gotong royong, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan jejaring sosial), sedangkan kemiskinan diukur dengan pengeluaran per kapita rumah tangga. Indeks modal sosial pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019.

j. Rasio kemandirian keuangan daerah 79,71

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak. Presentase kemandirian keuangan pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (*literacy rate*) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama

sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.

Dibanding dua komponen pembentuk IPM yang lain yaitu indeks Kesehatan dan indeks Daya Beli, pencapaian indeks Pendidikan di Kota Pasuruan selama ini relatif paling besar. Kondisi ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak pembangunan dibidang lainnya.

2. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan alat ukur tingkat kesehatan masyarakat pada sebuah daerah. Untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat dibutuhkan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Dalam pengukuran indeks kesehatan, dibutuhkan epidemiologi penghitungan, antara lain:

- a. Indeks Fertilitas
- b. Indeks Morbiditas
- c. Indeks Mortabilitas.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen, yaitu :

- a. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan tersebut tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan dapat kita lihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi di bidang sosial.

Pertumbuhan Ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional.

5. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

- a. Indeks Kualitas / Pencemaran Air.
- b. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara.
- c. Indeks Tutupan Hutan / Lahan.

8. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu : kebebasan sipil, hak-hak politik dan Lembaga demokrasi. Klasifikasi indeks demokrasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Baik (indeks > 80)
2. Sedang (60-80)
3. Buruk (indeks < 60)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu cara untuk mengukur tingkat keefektifan dan keefisienan yaitu dengan menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi.

9. Indeks Modal Sosial

Modal sosial melekat dalam hubungan sosial sehingga salah satu strategi pembangunan yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Indeks Modal Sosial dapat diartikan sebagai pengukuran serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama. Modal sosial terbentuk dari hubungan sosial

antar manusia sehingga besaran modal sosial tergantung pada kapabilitas sosial individu. diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

1. Indeks Pendidikan

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian indeks pendidikan yang pada tahun 2019 mencapai 0,68 dan pada tahun 2020 sebesar 0,69 atau naik sebesar 0,01. Pencapaian Indeks Pendidikan ditunjang oleh keberhasilan dengan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Program Pendidikan Masyarakat.
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
4. Program Pendidikan Menengah.
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Tingginya minat serta daya tarik masyarakat untuk bersekolah di Kota Pasuruan.
- Meningkatnya tingkat partisipasi dan angka kelulusan tingkat pendidikan dasar.
- Mudahnnya para peserta didik untuk mengakses sarana Pendidikan.
- Meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
- Untuk memenuhi persyaratan memasuki dunia kerja dimasa mendatang

Hambatan/Masalah :

- Peningkatan kesejahteraan pendidik belum diikuti dengan kualitas pendidik.
- Kesenjangan pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum.
- Penyebaran sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang belum merata

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Perlu adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan teknik mengajar pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidik yang terampil.
- Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dan Kemenag terkait fasilitasi dan pembinaan pendidikan diniyah salafiya.
- Pemantauan kualitas pendidikan di daerah terpencil.
- Pemerintah membangun sekolah-sekolah besertanenagapendidiknyadi beberapa daerah terpencil yang mudah di akses

2. Indeks Kesehatan

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian indeks kesehatan yang pada tahun 2019 mencapai 0,64 tetap pada tahun 2020 sebesar 0,79 atau meningkat sebesar 0,15. Pencapaian ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain:

1. Program Kesehatan masyarakat.
2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
3. Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini:

- Meningkatnya masyarakat yang *care* terhadap kesehatannya.
- Meningkatnya kualitas pada beberapa sarana kesehatan milik pemerintah.
- Banyaknya program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
- Terciptanya lingkungan hidup sehat.
- Perlindungan terhadap Orang Gengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan mendukung Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur "Nol Kasus Pemasungan".

Hambatan/Masalah :

- Tingginya stigma negatif terhadap pemeriksaan penyakit rawan (HIV), sehingga masih banyak sasaran yang tidak mau mengikuti pemeriksaaan KT HIV.
- Masih sedikitnya kelurahan yang ODF (*open defecation free*) di Kota Pasuruan.
- Masih kurang sadarnya masyarakat mengenai rumah tangga dengan jamban sehat.

- Belum terpenuhinya SDM Kesehatan yaitu sanitarian di Puskesmas.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Melakukan pencegahan terhadap penyakit (preventive)
- Membuat program jemput bola untuk pemeriksaan penderita penyakit beresiko.
- Memperbanyak kelurahan yang ODF.
- Memperbanyak sosialisasi mengenai rumah tangga dengan jamban sehat.
- Menambah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2019 mencapai 5,06meningkat pada tahun 2020 sebesar 3,69 atau meningkat sebesar 1,37. Pencapaian ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

- a. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- c. Program Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi.
- d. Program Pemberdayaan Usaha Mikro.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini:

- Semakin banyaknya angkatan kerja yang mengikuti event job fair yang telah diadakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan
- Semakin banyak perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti acara job fair di Kota Pasuruan.
- Banyaknya UM baru yang tumbuh diperiode tahun 2020.

Hambatan/Masalah :

- Banyaknya angkatan kerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan.
- Masih banyak angkatan kerja yang pilih-pilih lowongan pekerjaan.
- Jumlah lowongan pekerjaan yang lebih sedikit/terbatas daripada jumlah angkatan kerja baru.
- Tingginya persyaratan pekerja yang dipersyaratkan oleh perusahaan penyedia lapangan pekerjaan.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Memperbanyak event-event job fair guna menyerap tenaga kerja yang masih mencari lowongan pekerjaan.
- Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak.
- Mengadakan pelatihan-pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- Memberi kesempatan pada IKM untuk mempromosikan produk-produknya.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Yakni sebesar 5,56 pada 2019 dan minus (-) 2,60 pada 2020. Beberapa integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain:

- a. Program Pemberdayaan UMKM.
- b. Program Peningkatan kualitas perdagangan.
- c. Program Penataan PKL.
- d. Program Peningkatan kualitas pelayanan pasar.
- e. Program Peningkatan IKM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Adanya perbaikan sarana-sarana pendukung UMKM.
- Meningkatnya pengawasan terhadap barang-barang yang beredar.
- Tertibnya PKL karena pembinaan yang terus menerus dilakukan.
- Meningkatnya nilai produksi IKM karena metode promosi yang dilakukan tepat sasaran.
- Meningkatnya kerjasama kemitraan IKM.
- Semakin baiknya sarana prasarana pada setiap Pasar yang ada.

Hambatan/Masalah :

- Masih terbatasnya kemampuan daerah dalam peningkatan PAD;
- Diperlukan revitalisasi sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa;
- Rendahnya nilai investasi untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif;
- Belum optimalnya pemanfaatan sektor perikanan dan kelautan di beberapa wilayah potensial yang menjadi sektor unggulan;
- Kurangnya kreatifitas, inovasi dan etos kerja bidang perekonomian

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Menambah sumber-sumber pendapatan baru untuk menambah PAD.
- Menambah jumlah dan kualitas sarana perdagangan, industri dan jasa.
- Menciptakan inovasi-inovasi baru guna menarik investor untuk menanamkan modalnya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sektor perikanan dan kelautan.
- Menambah pelatihan dan peningkatan SDM bidang perekonomian.

5. Tingkat Kemiskinan

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian tingkat kemiskinan yang pada tahun 2019 mencapai 6,46menurun pada tahun 2020 sebesar 6,66 atau meningkat sebesar 0,20. Beberapa integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

- a. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- c. Program Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Adanya program jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin.
- Adanya program sekolah gratis bagi anak keluarga miskin.
- Banyak kegiatan yang bersifat pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu untuk bisa hidup mandiri.
- Banyak kegiatan pemberian santunan maupun bantuan guna memperkecil pengeluaran bagi masyarakat miskin.
- Kesempatan kerja masyarakat pekerja.
- Tingkat investasi.

Hambatan/Masalah :

- Kurangnya koodinasi antar dinas terkait usaha penurunan kemiskinan sehingga bantuan kurang tepat sasaran.
- Kesempatan kerja yang semakin sempit

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Memanfaatkan data kemiskinan yang telah terintegrasi dengan data kependudukan, sehingga bantuan sosial yang akan disalurkan lebih tepat sasaran.
- Memperbanyak kegiatan yang bersifat pemberdayaan sehingga warga miskin bisa mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri

6. Indeks Gini

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian Indeks Gini yang pada tahun 2019 mencapai 0,34 meningkat pada tahun 2020 sebesar 0,318 atau meningkat sebesar 0,022. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Mikro.
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini:

- Berkembangnya sektor-sektor niaga yang bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menambah pendapatan masyarakat
- Relatif kondusifnya kondisi ekonomi sehingga konflik sosial bisa ditekan
- Menurunnya luasan kawasan kumuh
- Perbaikan sarana prasarana umum yang membuat kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat
- Perbaikan rumah-rumah tidak layak huni sehingga layak untuk ditempati

Hambatan/Masalah :

- Pembangunan yang belum merata, khususnya daerah pesisir.
- Kultur masyarakat yang memandang pendidikan itu tidak penting, sehingga banyak anak usia sekolah yang membantu mencari nafkah orang tuanya.
- Kecenderungan masyarakat yang lebih suka mendapatkan bantuan dari Pemerintah daripada harus susah-susah bekerja untuk mendapatkan penghasilan

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Pembangunan yang merata diseluruh wilayah Kota, pembangunan jalan lingkar utara (daerah pesisir)
- Mengaktifkan forum komunikasi masyarakat dengan pemerintah
- Meningkatkan kesetaraan gender
- Mengalihkan bantuan sosial dari awalnya berupa uang tunai menjadi barang/alat sebagai modal usaha
- Melindungi kelompok rawan ekonomi dengan menjamin kehidupan mereka

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian IKLH yang pada tahun 2019 mencapai 66,34 meningkat pada tahun 2020 sebesar 64,91 atau menurun sebesar 1,43. Pencapaian ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

- a. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan
- b. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
- c. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan
- d. Program Pembinaan lingkungan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini:

- Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun, sebagian besar adalah taman-taman yang bisa juga sebagai tempat rekreasi gratis bagi masyarakat Kota.
- Penerapan sekolah adi wiyata pada semua sekolah di wilayah Kota
- Dibentuknya Satgas Kebersihan yang bertugas menjaga dan meningkatkan kebersihan pada titik-titik Kota yang kotor
- Adanya pengelolaan sampah secara terpadu dan semakin banyaknya bank sampah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.

Hambatan/Masalah :

- Belum optimalnya pengelolaan sampah secara terpadu
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan sungai
- Terbatasnya tenaga SDM sehingga belum menyentuh seluruh cakupan daerah pelayanannya

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Pengawasan dan pemantauan kandungan air sungai dan udara guna mengetahui kualitas air dan udara di kawasan Kota secara berkala
- Pelaksanaan Car Free Day secara rutin yang bisa mengurangi beban polusi Kota
- Pelaksanaan penanaman 1 juta pohon guna memperbanyak ruang terbuka hijau di wilayah Kota
- Penerapan *eco office* di wilayah Kota melalui kebijakan Walikota

8. Indeks Reformasi Birokrasi

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2019 mencapai 61,62 pada tahun 2020 sebesar Pencapaian ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

- a. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Program Penataan Perundang-Undangan.
- c. Program Penataan ASN.
- d. Program Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Program Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini:

- Banyak Perangkat Daerah yang sudah memahami alur SAKIP, sehingga bisa meningkatkan kinerjanya.
- Telah ditandatanganinya Pakta Integritas Perangkat Daerah.
- Tingkat Maturitas SPIP berada di level 2.
- Opini BPK atas LKD 2019 Kota Pasuruan telah mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
- Hasil Evaluasi SAKIP Kota Pasuruan 2019 mendapatkan nilai B.

Hambatan/Masalah :

- Masih ada beberapa UPP yang tidak menjalankan prosedur sesuai SOPnya.
- Masih ada beberapa Perangkat Daerah yang berbicara Output pada target kinerjanya, karena terbentur pada dasar perencanaan (RPJMD) yang belum disahkan perubahannya.
- Masih rendahnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah.
- Masih rendahnya kualitas penerapan roadmap reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Penerapan si-Akur guna menyingkronkan dan memperjelas kinerja Perangkat Daerah.
- Penerapan si-Jaja guna memperjelas target dan realisasi kinerja setiap ASN.
- Integrasi database kinerja, mulai dari sektor perencanaan sampai sektor keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

- *Refocusing* program pada perencanaan tahun selanjutnya, sehingga arah pembangunan akan lebih terfokus di tiap tahunnya
- Menyegerakan pengesahan Perubahan RPJMD untuk menjadi dasar pembuatan RENSTRA Perangkat Daerah.
- Perlunya pendampingan kepada Perangkat Daerah khususnya dalam penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan.
- Perlunya peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pencapaian 8 goals reformasi birokrasi.

9. Indeks Modal Sosial

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Melalui rasa saling percaya, toleransi, dan kerja sama mereka dapat membangun jaringan di dalam kelompok masyarakatnya maupun dengan kelompok masyarakat lain. Sebaliknya, modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong-royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Modal Sosial diantaranya adalah:

- Kepercayaan publik

Modal sosial yang sebenarnya hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan, dimana kepercayaan merupakan dasar bagi sikap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat

- keterbukaan informasi

individu atau kelompok yang seperti itu dapat dikatakan mempunyai modal sosial yang tinggi dan individu atau kelompok yang mempunyai modal sosial yang tinggi akan mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat dan cepat sehingga menghasilkan keuntungan.

- Norma dan sanksi yang efektif

Hambatan/masalah :

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- Pada era saat ini banyak masyarakat yang percaya terhadap hoax atau fake news yang akan mengikis fondasi kepercayaan yang mendasari peradaban yang sehat
- Sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- pemupukan rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan, dan empati yang tinggi
- Kesadaran masyarakat
- sikap gotong-royong
- serta contoh-contoh yang baik dari para pengambil kebijakan dan pemimpin



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KOTA PASURUAN
TAHUN 2020**

BAB III

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN**

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah, selaras dengan tindak lanjut implementasi tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas pembantuan diatur dalam pasal yang sama pada ayat (4) yang pada intinya dinyatakan bahwa kegiatan tugas pembantuan di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan gubernur, bupati atau walikota.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Maksud Pemberian Tugas Pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan umum, sekaligus membantu pengembangan pembangunan bagi daerah (provinsi dan kabupaten/kota serta desa). Karena pada hakikatnya urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan kepada daerah dan kelurahan adalah urusan pemerintahan yang berasal dari kewenangan yang bersifat atributif, bukan kewenangan yang bersifat delegatif. Maka tugas pembantuan merupakan tugas membantu di dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan operasional di daerah.

Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2020 tidak menerima Tugas Pembantuan, sehingga tidak ada yang dilaporkan (**NIHIL**).



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KOTA PASURUAN
TAHUN 2020**

BAB IV

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
a.	Pendidikan Anak Usia Dini
b.	Pendidikan Dasar
c.	Pendidikan Kesenjangan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pelayanan pendidikan anak usia dini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan ditangani oleh Bidang PAUD dan Dikmas. Namun dalam melaksanakan tugasnya bidang ini bekerjasama dengan bidang lain yang terkait seperti Bidang Ketenagaan, Bidang Perguruan Agama (Pergurag), Bagian kesekretariatan dan Satuan-satuan Pendidikan. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan, menyusun rencana, member ipetunjuk, mengkoordinasi dan menilai pelaksanaan kegiatan PendidikanAnak Usia Dini serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan, mendistribusi sarana pendidikan sesuaidengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pelayanan pendidikan dasar di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ditangani oleh Seksi Pendidikan

Madrasah dan satuan-satuan pendidikan.

b. Pendidikan Dasar

Pelayanan pendidikan dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan ditangani oleh Bidang Pendidikan Dasar. Namun dalam melaksanakan tugasnya bidang ini bekerjasama dengan bidang lain yang terkait seperti Bidang Ketenagaan, Bidang Perguruan Agama (Pergurag), Bagian kesekretariatan dan Satuan-satuan Pendidikan. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan ,menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan menilai pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dasar serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan, mendistribusikan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pelayanan pendidikan dasar di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ditangani oleh Seksi Pendidikan Madrasah dan satuan-satuan pendidikan.

c. Pendidikan Kesetaraan

Pelayanan pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan ditangani oleh Bidang PAUD dan Dikmas.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kota Usia 5 - 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	100 %	2020
2.	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kota Usia 7-15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Dasar (SD/SMP)	100 %	2020
3.	Pendidikan Kesenjangan	Persentase (%) Warga Kota Usia 7-18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesenjangan	100 %	2020

4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kota Usia 5 - 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.633	6.706	98,91 %

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
2.	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kota Usia 7-15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Dasar (SD/SMP)	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.858	25.369	101,93 %
3.	Pendidikan Kesenjangan	Persentase (%) Warga Kota Usia 7-18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesenjangan	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	237	32.396	0,73 %

Sarana Dan Prasarana Bidang Pendidikan Serta Personil

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH KELAS	JUMLAH MURID	TENAGA PENGAJAR	KETERANGAN
1.	Sekolah Dasar Negeri	46	516	13.747	736	
2.	Sekolah Dasar Swasta Dan Sederajat	20	220	5.164	292	
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri	11	234	7.324	410	
4.	Sekolah Menengah Pertama Swasta	18	90	1.908	187	
5.	Sekolah PAUD Negeri	2	17	227	20	
6.	Sekolah PAUD Swasta	103	1.034	5.298	245	

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan, antara lain :

No	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	1.045.237.500
2.	Pendidikan Dasar	16.574.860.500
3.	Pendidikan Kesenjangan	3.012.021.000

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan, antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan	Dukungan Personil
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	43 Orang PNS 14 Orang Non PNS
2.	Pendidikan Dasar	
3.	Pendidikan Kesenjangan	

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Urusan Pendidikan, adalah :

- Data peserta didik sesuai usia sekolah masih banyak yang kurang sesuai dikarenakan Pengisian form pendataan masih banyak yang kurang memahami, hal tersebut menyebabkan kesalahan dalam pengisian.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan, adalah :

- Sosialisasi form pendataan dan pendampingan pengisian terhadap lembaga, khususnya lembaga PAUD, TK, RA, MI, dan Kesetaraan.

4.2. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Kesehatan, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita

No	Pelayanan DasarBidangUrusanKesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7.	Pelayanan Kesehatan pada UsiaLanjut
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TBC)
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	JumlahIbu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TBC)	Jumlah Orang terduga Tuberculosis (TBC) yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang menerima layanan kesehatan	100 %	2020

4.2.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	Dinas Kesehatan	2.966	3.612	82,12 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	Dinas Kesehatan	3.134	3.448	90,89 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	Dinas Kesehatan	3.005	3.284	93,03 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100 %	Dinas Kesehatan	8.181	13.009	62,89 %
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	32.628	32.881	99,23 %
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	110.492	133.300	82,89 %

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	7.770	19.063	40,76 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	27.086	50.585	53,55 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	4.829	5.637	85,67 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	389	383	101,57 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TBC)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	2.203	3.951	55,76 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	3.909	5.158	75,79 %

Sarana Dan Prasarana Bidang Pendidikan Serta Personil

NO	JENIS FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH	JUMLAH KAMAR RAWAT	JUMLAH DOKTER UMUM	JUMLAH DOKTER	JUMLAH DOKTER SPESIALIS	JUMLAH PERAWAT	JUMLAH BIDAN	JUMLAH TENAGA FARMASI	JUMLAH TENAGA UMUM/AD MIN
1.	RSUD Kota Pasuruan	2	337	25	9	42	296	83	30	491
2.	Puskesmas	8	0	19	16	0	81	94	9	109
3.	Klinik Kesehatan Swasta Rawat Inap	2	20	11	3	2	52	6	6	38
4.	Klinik Kesehatan Swasta Tanpa Rawat Inap	11	0	27	12	2	30	5	4	18
5.	Klinik Bidan Bersalin	3	0	4	0	3	0	10	0	2

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Pasuruan untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Tahun 2020 sebesar **Rp. 9.225.946.000,00** (*Sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran SPM sebesar **Rp. 5.242.312.067,00** (*Lima milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu enam puluh tujuh rupiah*), dengan capaian **56,82 %** yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan dan APBN (DAK Non Fisik).

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Dukungan Personil
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	623 Orang PNS (tersebar di Dinkes, Puskesmas dan RSUD dr. Soedarsono)
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.052 Orang Non PNS (tersebar di Dinkes, Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium, Optik, Praktek Dokter Mandiri dan Praktek Bidan Mandiri)
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TBC)	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	• Masa pandemi COVID-19 membuattidak optimalnyapemantauan wilayah setempat, • Kurangnya informasi mengenai pelayanan ANC yang seharusnya,	• Peningkatan Manajemen KIA dan Pembinaan KIA di Fasyankes termasuk Peningkatan Pemantauan Wilayah setempat • Penambahan tenaga kesehatan dalam pemantauan Sistem pemantauan wilayah setempat (surveilans kohort ibu)
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	• Masih adanya pemahaman sosial budaya yang salah kaprah, • Kurangnya mutu pelayanan kesehatan yang harus diterima ibu hamil, • Kurangnya kompetensi yang update tenaga kesehatan,	• Penambahan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan, agar mutu pelayanan dapat diberikan dengan tuntas (hal ini dikarenakan beberapa mutu pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan menjadi terlewati karena tumpukan pasien dengan jumlah nakes pemberi pelayanan tidak seimbang)
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	• Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan ibu hamil dengan status suspect/ confirm COVID-19, • Ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja kab/kota, • Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas,	• Peningkatan kompetensi secara berkala dalam bentuk pelatihan/ workshop/ orientasi/ refreshing dan sejenisnya termasuk sosialisasi juknis dan alur layanan kia dengan status suspect / konfirm COVID-19
4.	Pelayanan Kesehatan Balita		• Menambah sarana prasarana yang menunjang layanan kesehatan ibu hamil dengan status suspect COVID-19 dan confirm COVID-19. • Meningkatkan Frekuensi dan kualitas Pemberian Informasi di Masyarakat

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining SD SMP) sesuai dengan permenkes tentang SPM adalah dengan periode tahun ajaran yang telah selesai yakni 2019/2020. Sehingga capaiannya dihitung dari kinerja pelayanan kesehatan pada bulan Juli 2019 s.d bulan Juni 2020. Yang kebetulan pada bulan Maret 2020 (masa pandemi COVID-19) capaiannya telah sebesar 99,23%. Masa pandemi mengganggu capaian pada tahun 2020 ini tidak mencapai targetnya yaitu sebesar 99,3%, kurang 0,7%. Namun masa pandemi COVID-19 ini akan sangat mengganggu capaian di tahun selanjutnya yaitu capaian tahun ajaran 2020-2021.	Menghadapi masa pandemi COVID-19 yang belum usai, maka saat ini dikembangkan pemberian pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi tidak ada kegiatan tatap muka, maka pengembangan skrining dengan memakai google form.
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang mengumpulkan masyarakat seperti posbindu/deteksi dini faktor risiko PTM di luar gedung tidak dilaksanakan	• Melaksanakan kegiatan posbindu/deteksi dini faktor risiko PTM dengan menggunakan protokol kesehatan. • Meningkatkan peran kader posbindu dalam pemantauan deteksi dini Faktor Risiko PTM di wilayahnya.
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	• Kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut, • Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring Puskesmas ke Puskesmas, • Adanya usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di	• Peningkatan Manajemen Pemantauan Lansia • Penambahan tenaga kesehatan dalam pemantauan Lansia • Peningkatan kompetensi secara berkala dalam bentuk pelatihan/ workshop/ orientasi/ refreshing dan sejenisnya termasuk sosialisasi

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
		luar wilayah Kota Pasuruan • Ketersediaan sumber daya terbatas	juknis • Meningkatkan Frekuensi dan kualitas Pemberian Informasi di Masyarakat
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kurangnya deteksi dini penyakit tidak menular (Hipertensi dan Diabetes Mellitus) dan kunjungan ke Puskesmas dibatasi.	• Melaksanakan kegiatan posbindu/deteksi dini faktor risiko PTM dengan menggunakan protokol kesehatan dan merujuk pasien yang terindikasi Hipertensi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan. • Meningkatkan peran kader posbindu dalam pemantauan deteksi dini Faktor Risiko PTM di wilayahnya
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)		
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	-	• Pelayanan kesehaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	• Masa pandemi COVID- 19 mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan pasien di layanan kesehatan, sehingga mempengaruhi menurunnya jumlah kunjungan terduga TB. • Belum optimalnya rujukan horizontal terkait penanganan penderita TB • Kurangnya adherence terduga TB dalam hal pemeriksaan dahak di laboratorium • Adanya kekhawatiran terduga TB yang tidak mau pemeriksaan dahak dikarenakan pandemi COVID-19	• Untuk mendukung dan memastikan bahwa layanan TB tetap berjalan terhadap pasien TB sensitive obat (TB-SO) baik yang masih berstatus terduga TB maupun pasien yang berstatus sedang dalam pengobatan TB terdapat Proktokol Tata Laksana Pasien TB dalam masa Pandemi Covid-19 edisi II (30 Maret 2020). Di Dalam protocol ini mulai dari pencegahan;manajemen perencanaan; perawatan & pengobatan; laboratorium dan SDM • Melakukan Advokasi kepada faskes swasta terkait TB DOTS, kerjasama lintas program untuk optimalisasi rujukan

No	Jenis Layanan Dasar	Permasalahan	Solusi
			horizontal TB • Melakukan pengembangan jejaring faskes swasta terutama dalam melayani tb dots • Mengaktifkan kembali Public Private Mix TB melalui jejaring puskesmas • Pengaturan jejaring pemeriksaan TCM guna meningkatkan cakupan terduga TB
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Kunjungan KT HIV menurun pada masa pandemi	• Mengoptimalkan layanan konseling dan tes HIV di Puskesmas dan RSUD dengan memperhatikan protokol kesehatan dan penguatan konseling pada ODHA (orang dengan HIV AIDS), • Mengupayakan semua ibu hamil baik yang datang ke Puskesmas atau jemput bola untuk diinisiasi tes HIV
		Pemakaian proyeksi data sasaran program kesehatan belum sepenuhnya menggambarkan data sasaran riil di masyarakat	• Memakai data sasaran riil berdasarkan hasil survey keluarga sehat

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pekerjaan Umum, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga kota yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	2020
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga kota yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	2020

4.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga kota yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Dinas Perkim	87,43	100	87,43 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga kota yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Dinas Perkim	88,04	100	88,04 %

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidakl angsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dann pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum, antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Alokasi Dana (Rp)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.500.000.000
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2.494.706.000

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	8 Orang PNS 3 Orang Non PNS
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	8 Orang PNS 12 Orang Non PNS

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum, antara lain :

- Ada 1 (satu) paket pekerjaan septictank komunal di Kelurahan Bugul Lor tidak terlaksana dikarenakan KSM dan Lokasi tidak siap.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum, antara lain :

- Mempersiapkan dan memastikan kembali KSM siap melaksanakan kegiatan dan Lokasi juga siap/tersedia.

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	Persentase warga kota korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	2020
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota	Persentase warga kota yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	2020

4.4.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	PelayananDasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	Persentase warga kota korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	BPBD	13	13	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota	Persentase warga kota yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Dinas Perkim	N I H I L		

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Alokasi Dana (Rp)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	146.260.223

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Alokasi Dana (Rp)
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota	NIHIL

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	6 Orang PNS 4 Orang Non PNS
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota	NIHIL

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

- Tidak pernah ada program Relokasi Pemerintah Kota Pasuruan di Tahun 2019 sehingga tidak ada fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena program relokasi Pemerintah Kota Pasuruan akan tetapi telah ada program penyediaan perumahan dengan relokasi penghuni rumah liar pada pembangunan Rusunawa.
- Backlog rumah di Kota Pasuruan masih cukup tinggi.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

- Melakukan pendataan dan penertiban serta pengaturan pelaksanaan regulasinya.
- Berupaya membuat usulan bantuan ke Pemerintah Pusat terkait program Rusunawa atau Rusus di Kota Pasuruan pada tahun 2020.
- Memberikan fasilitasi kemudahan kepada pengembang perumahan untuk membangun rumah bersubsidi.

4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga kota yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	2020
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	2020
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	2020
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2020
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga kota yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	2020

4.5.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga kota yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Satpol PP	946	946	100 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	BPBD	66.509	66.509	100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	BPBD	16	34	66,66 %
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	BPBD	30	30	100 %
5.	a. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	Persentase warga kota yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	BPBD	32	32	100 %
	b. Layanan Penunjang Capaian SPM.	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.			10	10	100

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat	Alokasi Dana (Rp)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.294.731.140
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	317.160.000
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.319.013.300
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	317.160.000
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	306.300.000

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	DukunganPersonil
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90 Orang PNS 13 Orang Non PNS
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	36 Orang PNS 51 Orang Non PNS
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

- a. Tidak adanya tempat penampungan pembinaan dan rehabilitasi untuk para pelanggar pekat (gepeng, anjal dan orang gila) sehingga kelanjutannya dilepaskan kembali.
- b. Kurangnya personil untuk ketentraman dan ketertiban umum dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pasuruan.
- c. Anggaran Tahun 2020 untuk Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dialihkan atau dihapus untuk Covid-19.
- d. Kurang koordinasi antar Instansi terkait.
- e. SDM yang kurang terlatih dalam penanganan bencana.
- f. SOP kebencanaan yang belum maksimal dalam mengimplementasikannya.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

- a. Dibangunnya tempat penampungan dan rehabilitasi beserta petugas yang sesuai kemampuannya masing-masing.
- b. Penambahan jumlah personil yang sesuai dengan luas wilayah Kota Pasuruan.
- c. Melakukan koordinasi ke Instansi terkait secara maksimal.
- d. Mengusulkan kegiatan terkait peningkatan SDM dalam penanganan kebencanaan.
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam memaksimalkan SOP kebencanaan.

4.6. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Sosial, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Kota penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	2020
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	2020
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Kota lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	2020
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Kota yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	2020
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana skala Kota yang menerima perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	2020

4.6.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	PelayananDasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2020		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Kota penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Dinas Sosial	888	2.926	30,35 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlahanak telantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti					
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Kota lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Kota yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti					
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana skala Kota yang menerima perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	Dinas Sosial	4.025	11.532	34,9 %

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Sosial, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Alokasi Dana (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	381.918.500
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	562.783.390

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Sosial, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Dukungan Personil
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	23 Orang PNS 20 Orang Non PNS
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Sosial, antara lain :

- a. Dukungan anggaran dan peraturan daerah dalam pelaksanaan SPM.
- b. Data penerima bansos masih belum akurat.
- c. Kurangnya SDM yang profesional dan mempunyai keahlian di bidang sosial.
- d. Minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan SPM.
- e. Minimnya koordinasi lintas sektoral guna menunjang pelaksanaan SPM.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Sosial, antara lain :

- a. Pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan bimtek dan sertifikasi kepada pekerja sosial kemasyarakatan agar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial.
- c. Mengalokasikan anggaran APBD guna melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sosial.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan kemiskinan.
- e. Melaksanakan pemutakhiran data terpadu lewat SIKS NG.

4.7. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang sudah dilakukan OPD pengampu SPM masing-masing terhadap 6 Bidang SPM di bawah ini:

1. Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Dasar

Program	Kegiatan
1. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Pengembangan Potensi Peserta Didik PAUD
	2. Pembinaan Penyelenggaraan PAUD
	3. Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
	4. Sarana dan Prasarana PAUD (DAK Reguler)
2. Pelayanan Pendidikan Dasar	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian SLTP
	2. Peningkatan Mutu Pendidikan SD
	3. Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
	4. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK Reguler)
	5. Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK Reguler)
	6. Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK Reguler)
	7. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK Reguler)
	8. Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK Reguler)
	9. Pengadaan Sarana Pendidikan SD/SMP
	10. Pembinaan Kelembagaan Satuan Pendidikan SMP
	11. Pembinaan Kelembagaan Satuan Pendidikan SD
	12. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian SD/MI
	13. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SD/SMP
	14. Fasilitasi dan Pembinaan Sekolah Inklusi
	15. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba Tingkat SD
	16. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Lomba Tingkat Sekolah Menengah
3. Pelayanan Pendidikan Kesenjangan	1. Penyelenggaraan Kejar Paket dan Pelaksanaan Ujian Nasional Kejar Paket A, B dan C
	2. Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (Bantuan Provinsi)
	3. BOP Bosda Madin (Bantuan Keuangan Provinsi)
	4. Fasilitasi dan Pembinaan Pendidikan Masyarakat
	5. Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Pendidik Keagamaan
	6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dikmas
	7. Penyelenggaraan Kompetensi Baca Al Qur'an

2. Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

Program	Kegiatan
1. Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi Masyarakat
	2. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kebonagung (DBH Pajak Rokok)
	3. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Gadingrejo (DBH Pajak Rokok)
	4. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Karangketug (DBH Pajak Rokok)
	5. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kebonsari (DBH Pajak Rokok)
	6. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Sekargadung (DBH Pajak Rokok)
	7. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Bugul kidul (DBH Pajak Rokok)
	8. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kandang sapi (DBH Pajak Rokok)
	9. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Trajeng (DBH Pajak Rokok)
	10. Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kebonagung (DAK Non Fisik)
	11. Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Gadingrejo (DAK Non Fisik)
	12. Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Karangketug (DAK Non Fisik)
	13. Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kebonsari (DAK Non Fisik)
	14. Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Sekargadung (DAK Non Fisik)
	15. Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bugul kidul (DAK Non Fisik)
	16. Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kandang sapi (DAK Non Fisik)
	17. Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Trajeng (DAK Non Fisik)
	18. Bantuan Operasional Kesehatan Rujukan Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik)

Program	Kegiatan
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular
	2. Bantuan Operasional Kesehatan Rujukan Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik)
	3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
	4. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Puskesmas Kebonagung
	5. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Puskesmas Gadingrejo
	6. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Puskesmas Karangketug
	7. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Puskesmas Kebonsari
	8. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Puskesmas Sekargadung
	9. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Puskesmas Bugul kidul
	10. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Puskesmas Kandang sapi
	11. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Puskesmas Trajeng

3. Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program	Kegiatan
1. Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah (BPKA)	1. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD PDAM Kota Pasuruan
2. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	1. Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Air Limbah
	2. Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi
	3. Pembangunan Septictank Skala Individu Perkotaan

4. Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

Program	Kegiatan
1. Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana	1. Pelayanan dan Koordinasi Rehabilitasi Rekonstruksi Sarana Umum yang Rusak Akibat Bencana
	2. Pelayanan Rekonstruksi Sosial Bagi Masyarakat Korban Bencana
	3. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Akibat Bencana

5. Program dan Kegiatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Kegiatan
2. Peningkatan Perlindungan Masyarakat	1. Koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam ketertiban dan keamanan lingkungan
	2. Fasilitasi Operasional Satuan Linmas
	3. Pengamanan Pemilu
	4. Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas
	5. Penyelenggaraan Linmas dalam keamanan lingkungan dan Siaga Bencana
2. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1. Sosialisasi dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah
	2. Penertiban Pelanggaran PERDA
	3. Peningkatan kerjasama aparaturnya dalam pencegahan pelanggaran PERDA
	4. Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Penegak PERDA
	5. Pelaksanaan Pengamanan Aset Daerah
	6. Koordinasi, pengawasan dan penertiban kawasan rawan pelanggaran PERDA
	7. Penertiban PKL, parkir kendaraan dan pengawasan Hari Besar Islam dan Nasional.
	8. Pengamanan Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Covid-19
3. Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini	1. Kesiagaan Menghadapi Ancaman Bencana dan Pengelolaan Pusat Data Informasi Bencana
	2. Pelatihan Kesamaptaannya Tim Penanggulangan Bencana Kota Pasuruan
	3. Gelar Relawan dan Gladi Lapang Penanganan Darurat Bencana
	4. Pelayanan Kesiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19
4. Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan	1. Pelayanan Rekonstruksi Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana

Rekonstruksi Akibat Bencana	
	2. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Akibat Bencana
	3. Pelayanan dan Koordinasi Rehabilitasi Rekonstruksi Sarana Umum yang Rusak Akibat Bencana
5. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan	1. Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana dan Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)
	2. Pengadaan Logistik Penanganan Bencana
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana dan Kebakaran
	4. Pelatihan Rutin dan Uji Kesamaptaaan PMK
	5. Operasi Pelayanan Penanganan Pemadam Kebakaran

6. Program dan Kegiatan Bidang Sosial

Program	Kegiatan
1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	1. Pelayanan Sosial Psikologis bagi lanjut usia
	2. Pelayanan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas
	3. Updating data PMKS
	4. Pelayanan dan Rehabilitasi Anak
	5. Pelayanan dan pembinaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	1. Pelayanan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
	2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
	3. Verifikasi dan Validasi Data PBI JKN dan PBI Daerah
	4. Penyaluran Bantuan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
	5. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KOTA PASURUAN
TAHUN 2020**

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab demi bab dimuka bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2020, dengan Dasar Hukum penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dimana uraian tersebut adalah merupakan program / kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020. Adapun ruang lingkupnya atas Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Dimana tahun 2020 ini sendiri, banyak hal yang telah kita perbuat dan tidak sedikit pula keberhasilan yang telah kita raih sebagai usaha bersama dari semua pihak. Namun demikian, tentu juga masih ada tugas – tugas yang memang belum dapat kita selesaikan, karena berbagai keterbatasan. Semoga di masa mendatang kita akan mampu untuk berbuat lebih baik dalam memenuhi apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat Kota Pasuruan.

Oleh sebab itu dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur ini, diharapkan akan ada rekomendasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dapat dipergunakan sebagai perbaikan kinerja bagi Pemerintah Kota Pasuruan di masa yang akan datang, sehingga dalam pelaksanaan program / kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan akan lebih maksimal serta dapat lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pasuruan secara keseluruhan. Karena hanya dengan perbaikan kekurangan yang sekaligus adanya inovasi penetapan target kinerja, indikator kinerja yang terukur, serta transparan dan akuntabel, percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan dalam pembangunan daerah akan dapat segera terwujud.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup kami sampaikan bahwa kendati kami sudah melakukan upaya yang semaksimal mungkin, namun demikian kekurangan, kekeliruan tetap saja bisa terjadi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf atas segala kekurangan dan senantiasa membuka terhadap segala kritikan dan masukan guna perbaikan untuk di masa yang akan datang. Dengan segala keterbatasan tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta pemikiran bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Pasuruan sejauh ini.

Sekian Terima Kasih.

Pasuruan, Maret 2021

WALIKOTA PASURUAN



H. SAIFULLAH YUSUF